

LAPORAN PEREKONOMIAN

PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

FEBRUARI 2026





Laporan Perekonomian

Provinsi Kalimantan Selatan

Februari 2026

Visi & Misi

Bank Indonesia

Visi Bank Indonesia

Menjadi bank sentral digital terdepan dengan tata kelola kuat yang berkontribusi nyata terhadap perekonomian nasional dan terbaik di antara negara *emerging markets* untuk Indonesia Maju.

Misi Bank Indonesia

- 
1. Mencapai stabilitas nilai rupiah melalui efektivitas penetapan dan pelaksanaan kebijakan moneter dan bauran kebijakan Bank Indonesia secara berkelanjutan, konsisten, dan transparan dalam rangka mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan;
 2. Memelihara stabilitas sistem pembayaran melalui penetapan kebijakan, pengaturan, perizinan, penyelenggaraan, pengawasan sistem pembayaran, dan pengelolaan uang rupiah, termasuk memfasilitasi percepatan ekonomi dan keuangan digital dalam rangka mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan;
 3. Turut menjaga stabilitas sistem keuangan melalui penetapan dan pelaksanaan kebijakan makroprudensial dalam rangka mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan;
 4. Turut mendukung stabilitas makroekonomi dan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan melalui sinergi bauran kebijakan Bank Indonesia dengan Pemerintah pusat dan daerah, otoritas atau lembaga terkait, dan/atau mitra strategis lain, serta kerja sama internasional;
 5. Turut meningkatkan pendalaman pasar keuangan melalui pengaturan, pengawasan, dan pengembangan pasar uang dan pasar valas, termasuk infrastrukturnya, untuk memperkuat efektivitas kebijakan Bank Indonesia dan mendukung pembiayaan ekonomi nasional;
 6. Turut meningkatkan inklusi ekonomi-keuangan, dan keuangan berkelanjutan, baik secara konvensional maupun berdasarkan prinsip syariah, serta perlindungan konsumen melalui perumusan kebijakan dan pelaksanaan program kerja Bank Indonesia; dan
 7. Mewujudkan bank sentral berbasis digital dalam kebijakan dan kelembagaan, yang mengutamakan Sistem Tata Kelola Kebijakan dan Kelembagaan Bank Indonesia yang baik dan profesional, melalui pengelolaan organisasi dan sumber daya.

Visi & Misi

Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kalimantan Selatan

Visi Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kalimantan Selatan

Menjadi Kantor Perwakilan Bank Indonesia yang kredibel dalam mendukung kebijakan Bank Indonesia dan berkontribusi nyata bagi pembangunan ekonomi daerah dan nasional.

Misi Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kalimantan Selatan

Menjalankan kebijakan Bank Indonesia dalam menjaga stabilitas nilai Rupiah, stabilitas sistem keuangan, efektivitas pengelolaan uang rupiah dan kehandalan sistem pembayaran untuk mendukung pembangunan ekonomi daerah maupun nasional jangka panjang yang inklusif dan berkesinambungan.



Kata Pengantar

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, atas rahmat-Nya Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kalimantan Selatan dapat mempublikasikan Laporan Perekonomian Provinsi (LPP) Kalimantan Selatan triwulan IV 2025, sebagai perwujudan dari komitmen kami untuk memperkuat akuntabilitas dan transparansi Bank Indonesia di daerah, sebagaimana diamanatkan oleh UU Bank Indonesia. LPP dipublikasikan secara triwulanan oleh Bank Indonesia Provinsi setelah Rapat Dewan Gubernur (RDG) yang membahas Ekonomi dan Keuangan Daerah.

Laporan ini memiliki tiga fungsi utama, yaitu: (i) merupakan pandangan Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kalimantan Selatan terhadap dinamika perekonomian di Kalimantan Selatan; (ii) menyajikan informasi terkini mengenai kondisi makroekonomi, keuangan pemerintah, stabilitas sistem keuangan, inflasi, sistem pembayaran, ketenagakerjaan dan kesejahteraan serta prospek perekonomian Kalimantan Selatan ke depan untuk mendukung pembentukan ekspektasi masyarakat yang menjadi pertimbangan penting dalam perumusan berbagai kebijakan di Bank Indonesia; (iii) sebagai media bagi Kepala Perwakilan Bank Indonesia di Kalimantan Selatan untuk memberikan penjelasan kepada masyarakat luas khususnya di Kalimantan Selatan mengenai berbagai pertimbangan yang melandasi keputusan kebijakan moneter, makroprudensial dan sistem pembayaran yang ditempuh Bank Indonesia; dan (iv) menjadi referensi penting bagi seluruh stakeholders dalam melakukan perumusan kebijakan dan keputusan ekonominya.

Pada triwulan IV 2025, perekonomian Kalimantan Selatan tumbuh solid sebesar 5,46% (yoy), lebih tinggi dibandingkan triwulan sebelumnya yang tumbuh sebesar 5,20% (yoy). Peningkatan kinerja ekonomi ini bersumber dari peningkatan kinerja Lapangan Usaha (LU) Pertanian dan membaiknya kinerja LU Pertambangan. Peningkatan kinerja LU Pertanian didorong oleh peningkatan produksi padi yang tercatat tumbuh 36,31% (yoy), lebih tinggi dibandingkan Tw. III 2025 yang hanya tumbuh 4,09% (yoy), dampak masifnya program swasembada pangan berupa optimasi lahan (oplah) yang berdampak positif pada volume dan jumlah panen padi Tw. IV 2025. Sementara itu, LU Pertambangan mencatatkan perbaikan kinerja, tumbuh lebih tinggi setelah mengalami kontraksi 3 (tiga) triwulan berturut – turut seiring dengan membaiknya permintaan batu bara di Tw. IV 2025.

Namun, pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi tertahan oleh perlambatan pertumbuhan LU Industri Pengolahan, LU Konstruksi dan LU Perdagangan. Perlambatan pertumbuhan LU Industri Pengolahan disebabkan perlambatan kinerja industri makanan dan minuman, industri kayu dan industri karet seiring dengan gangguan produksi pada sisi hulu. Kondisi tersebut mempengaruhi perlambatan kinerja LU Perdagangan. Sementara itu, semakin terbatasnya kegiatan konstruksi sektor pemerintah berdampak pada perlambatan kinerja LU Konstruksi.

Dari sisi pengeluaran, pertumbuhan ekonomi Provinsi Kalimantan Selatan pada triwulan IV 2025 didorong oleh pertumbuhan Konsumsi RT, PMTB dan Ekspor meski tertahan oleh perlambatan kinerja Konsumsi Pemerintah. Peningkatan kinerja Konsumsi RT didorong peningkatan mobilitas dan kegiatan rekreasi masyarakat pada HBKN Nataru dan pelaksanaan peringatan Haul Guru Sekumpul yang didukung pemberian diskon transportasi oleh pemerintah. Kinerja PMTB mengalami peningkatan, utamanya didorong oleh investasi mesin dan peralatan untuk hilirisasi di Kawasan Industri (KI)/Kawasan Ekonomi Khusus (KEK). Sementara itu, peningkatan ekspor yang lebih tinggi didorong oleh peningkatan ekspor komoditas batu bara, olahan bijih besi dan komoditas yang tergabung dalam HS 16 (a.l daging, ikan, krustasea, dan moluska).

Perekonomian Provinsi Kalimantan Selatan tahun 2025 tumbuh 5,22% (yoy), lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan tahun 2024 yang hanya tumbuh 5,06% (yoy). Pertumbuhan positif ini ditopang oleh kinerja LU Industri Pengolahan yang tumbuh tinggi didorong oleh akselerasi aktivitas produksi di KI/KEK, LU Pertanian dari program swasembada pangan pemerintah yakni program Optimalisasi Lahan (Oplah), serta permintaan domestik yang masih tetap kuat sejalan dengan UMP dan gaji ASN yang meningkat di tahun 2025 serta pelaksanaan event perayaan momen 5 Rajab (penyelenggaraan Haul Guru Sekumpul) yang dilaksanakan 2 kali Pada tahun 2025.

Kata Pengantar

Pada tahun 2026, perekonomian Provinsi Kalimantan Selatan diperkirakan tumbuh pada kisaran 5,0% - 5,8%, melanjutkan tren pertumbuhan di tahun 2025. Prakiraan pertumbuhan positif seiring berlanjutnya aktivitas hilirisasi industri di KI/KEK, berlanjutnya program swasembada pangan dan makin masifnya program ekonomi kerakyatan (a.l MBG dan KDKMP).

Secara tahunan, inflasi Provinsi Kalimantan Selatan pada triwulan IV 2025 tercatat sebesar 3,66% (yoy), lebih tinggi dibandingkan dengan triwulan III 2025 sebesar 2,91% (yoy). Realisasi inflasi tersebut lebih tinggi dibandingkan dengan inflasi nasional sebesar 2,92% (yoy) (Grafik 3.1) dan lebih tinggi dibandingkan historis inflasi Provinsi Kalimantan Selatan selama tiga tahun terakhir sebesar 3,65% (yoy).

Ke depan, tekanan inflasi tahunan Provinsi Kalimantan Selatan pada tahun 2026 diperkirakan lebih rendah dibandingkan dengan tahun 2025 dan berada dalam rentang sasaran $2,5\% \pm 1\%$ (yoy). Hal ini disebabkan oleh harga emas global yang meningkat lebih terbatas seiring telah dilakukan pemotongan suku bunga The Fed pada tahun Desember 2025. Lebih lanjut, upaya perbaikan produksi tanaman pangan melalui program intensifikasi lahan, seperti Optimasi Lahan (OPLAH) penggunaan bibit unggul juga diperkirakan dapat menahan tekanan inflasi kelompok makanan, minuman dan tembakau.

Selanjutnya, kami menyampaikan penghargaan dan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi secara langsung maupun tidak langsung dalam penyusunan laporan ini. Kami berharap kemitraan strategis yang terjalin baik selama ini dapat terus ditingkatkan di masa yang akan datang. Kami juga mengharapkan saran dan masukan guna peningkatan kualitas laporan, sehingga dapat lebih bermanfaat bagi masyarakat secara luas.

Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberikan kelancaran dan kesuksesan kepada kita semua dalam upaya mengembangkan ekonomi Kalimantan Selatan guna mewujudkan kesejahteraan masyarakat menuju Indonesia maju.

Banjarmasin, Februari 2026
Kantor Perwakilan Bank Indonesia
Provinsi Kalimantan Selatan

Ttd

Fadjar Majardi

Direktur Eksekutif

Daftar Isi

Visi & Misi Bank Indonesia	II
Visi dan Misi KPw Bank Indonesia Provinsi Kalimantan Selatan	III
Kata Pengantar	IV
Daftar Isi	VI
Daftar Grafik	VIII
Daftar Tabel	XI
Cakupan Pembahasan	XII
Infografik Perekonomian	XIII
Tabel Indikator	XIV
Ringkasan Eksekutif	XVI
Daftar Istilah	75
Tim Penyusun	77

BAB I Perkembangan Ekonomi Provinsi Kalimantan Selatan

1

1.1 Sisi Lapangan Usaha: Sektor Utama Ekonomi	4
1.2 Sisi Pengeluaran	9
BOKS 1 Penguatan Produktivitas dalam Mencapai Transformasi Ekonomi Kalimantan Selatan Menuju 8,1%	15
BOKS 2 Dampak Program Makan Bergizi Gratis di Kalimantan Selatan	19

BAB 2 Keuangan Pemerintah

25

2.1 Realisasi Pendapatan Daerah	25
2.1.1 Realisasi Pendapatan Provinsi	25
2.1.2 Realisasi Pendapatan Kabupaten dan Kota	26
2.2 Realisasi Belanja Daerah	28
2.2.1 Realisasi Belanja Provinsi	28
2.2.2 Realisasi Belanja Pemerintah Kabupaten dan Kota	29

BAB 3 Perkembangan Inflasi Daerah

33

3.1 Perkembangan Inflasi	33
3.2 Inflasi Berdasarkan Kelompok Pengeluaran	34
3.3 Perkembangan Inflasi Triwulan I 2026	36
3.4 Pengendalian Inflasi Daerah	37





BAB 4

Pembiayaan Daerah, Serta Pengembangan Akses Keuangan dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)

41

4.1	Pembiayaan Daerah	41
4.1.1	Pembiayaan Rumah Tangga (RT)	41
4.1.2	Pembiayaan Korporasi	43
4.1.3	Total Aset dan Intermediasi Perbankan	44
4.2	Pengembangan Akses Keuangan Dan UMKM	47
4.2.1	Rasio Kredit UMKM	47
4.2.2	Penyaluran Kredit UMKM	47
4.2.3	Peningkatan Akses Keuangan UMKM	49

BAB 5

Penyelenggaraan Sistem Pembayaran dan Pengelolaan Uang Rupiah

53

5.1	Perkembangan Sistem Pembayaran Di Kalimantan Selatan	53
5.2	Perkembangan Elektronifikasi Dan Keuangan Inklusif	54
5.3	Upaya Menjaga Kelancaran Sistem Pembayaran	55
BOKS 3	Festival ANTASARI 2026, Mengakselerasi Akseptasi QRIS di Kalimantan Selatan	57

BAB 6

Ketenagakerjaan dan Kesejahteraan

63

6.1	Kondisi Ketenagakerjaan	63
6.2	Kondisi Kesejahteraan	65

BAB 7

Prospek Perekonomian

71

7.1	Prakiraan Kondisi Makro Ekonomi	71
7.2	Prakiraan Inflasi	72

Daftar Grafik

Grafik 1.1	Pertumbuhan Ekonomi Kalimantan Selatan, Kalimantan, dan Nasional	3	Grafik 1.24	Perkembangan Kredit Konstruksi Kalimantan Selatan	9
Grafik 1.2	Pertumbuhan Ekonomi Kalimantan Selatan Sisi Sektoral	3	Grafik 1.25	Survei Konsumen Bank Indonesia	10
Grafik 1.3	Produksi Padi GKP Provinsi Kalimantan Selatan	4	Grafik 1.26	Nilai Tukar Petani Provinsi Kalimantan Selatan	10
Grafik 1.4	Produksi Tandan Buah Segar (Sawit)	4	Grafik 1.27	Realisasi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN)	11
Grafik 1.5	Produksi Karet Provinsi Kalimantan Selatan	4	Grafik 1.28	Realisasi Penanaman Modal Asing (PMA)	12
Grafik 1.6	Harga Karet	4	Grafik 1.29	Pangsa Sektor PMA dan PMDN Tw-IV 2025 Kalimantan Selatan	12
Grafik 1.7	Pangsa Volume Ekspor Batu Bara Kalimantan Selatan Triwulan III 2025	5	Grafik 1.30	Realisasi Kredit Investasi Kalimantan Selatan	12
Grafik 1.8	Perkembangan Volume Ekspor Batu Bara Kalimantan Selatan	5	Grafik 1.31	Pertumbuhan Volume Ekspor CPO	12
Grafik 1.9	Produksi Batu Bara India	5	Grafik 1.32	Pertumbuhan Volume Ekspor Batu Bara	13
Grafik 1.10	Harga Batu Bara Dunia	5	Grafik 1.33	Pertumbuhan Volume Ekspor Karet Alam & Olahan	13
Grafik 1.11	Produksi CPO	6	Grafik 1.34	Distribusi Nilai Ekspor Triwulan IV 2025 Berdasarkan Komoditas	13
Grafik 1.12	Perkembangan Ekspor Karet	6	Grafik 1.35	Distribusi Nilai Ekspor Triwulan IV 2025 Berdasarkan Negara Tujuan	13
Grafik 1.13	Konsumsi Listrik Industri	6	Grafik 1.36	Pertumbuhan Nilai Ekspor Berdasarkan Negara Tujuan	13
Grafik 1.14	Hasil Survei Penjualan Eceran Kalimantan Selatan	7	Grafik 1.37	Pertumbuhan Volume Impor Luar Negeri	14
Grafik 1.15	Perkembangan Transaksi e-Commerce	7	Grafik 1.38	Perkembangan Volume Impor Material Mentah	14
Grafik 1.16	Perkembangan Kredit Perdagangan di Kalimantan Selatan	7	Grafik 1.39	Perkembangan Nominal Impor Bahan Kimia	14
Grafik 1.17	Perkembangan Kredit Kendaraan Bermotor di Kalimantan Selatan	7	Grafik 2.1	Rasio Kemandirian Fiskal Daerah Triwulan IV 2025	26
Grafik 1.18	Perkembangan Kredit Multiguna di Kalimantan Selatan	8	Grafik 3.1	Perkembangan Inflasi Nasional dan Provinsi Kalimantan Selatan	33
Grafik 1.19	Perkembangan Kredit Konsumsi di Kalimantan Selatan	8	Grafik 3.2	Perbandingan Gabungan Kota Inflasi untuk Provinsi se-Kalimantan pada Triwulan III 2025	33
Grafik 1.20	Realisasi Belanja Modal APBD Seluruh Pemda di Kalimantan Selatan	8	Grafik 3.3	Perkembangan Inflasi Kota Banjarmasin, Tanjung, Kotabaru, Kab. Hulu Sungai Tengah, dan Kab. Tanah Laut	33
Grafik 1.21	Perkembangan Kredit Ruko/Rukan di Kalimantan Selatan	8	Grafik 3.4	Perkembangan Inflasi Kelompok Perawatan Pribadi dan Jasa Lainnya	34
Grafik 1.22	Hasil Survei Kegiatan Dunia Usaha di Kalimantan Selatan	9			
Grafik 1.23	Perkembangan Pengadaan Semen di Kalimantan Selatan	9			

Daftar Grafik

Grafik 3.5	Perkembangan Inflasi Kelompok Makanan, Minuman, dan Tembakau	35	Grafik 4.15	Pertumbuhan DPK Periode Triwulan IV 2025	45
Grafik 3.6	Perkembangan Inflasi Kelompok Penyediaan Makanan dan Minuman/ Restoran	35	Grafik 4.16	Pertumbuhan Giro Pemda, Deposito Pemerintah, dan Tabungan Swasta Periode IV 2025	45
Grafik 3.7	Perkembangan Inflasi Kelompok Transportasi	35	Grafik 4.17	Pertumbuhan Kredit Periode Triwulan IV 2025	47
Grafik 4.1	Distribusi Kredit Konsumsi Periode Triwulan IV 2025	41	Grafik 4.18	Pertumbuhan dan NPL Kredit Periode Triwulan IV 2025	47
Grafik 4.2	Pertumbuhan Kredit Konsumsi Berdasarkan Jenisnya Periode Triwulan IV 2025	41	Grafik 4.19	Rasio Kredit UMKM Terhadap Total Kredit Periode Triwulan IV 2025	47
Grafik 4.3	Pertumbuhan Kredit Konsumsi Pemilikan Mobil Roda Empat, Truk dan Kendaraan Roda Enam atau Lebih Periode Triwulan IV 2025	41	Grafik 4.20	Pertumbuhan Kredit UMKM Berdasarkan Skala Usaha Periode Triwulan IV 2025	48
Grafik 4.4	Pertumbuhan Kredit Konsumsi – Kredit Pemilikan Rumah, KPR Tipe 22 s.d. 70 dan Kredit Pemilikan Rumah Tipe diatas 70.	42	Grafik 4.21	Pertumbuhan Kredit UMKM Berdasarkan Jenis Penggunaan Periode Triwulan IV 2025	48
Grafik 4.5	Pertumbuhan dan NPL Kredit Konsumsi Periode Triwulan IV 2025	42	Grafik 4.22	Distribusi Kredit UMKM Berdasarkan Lapangan Usaha Periode Triwulan IV 2025	48
Grafik 4.6	Presentase Penggunaan Penghasilan RT Periode Triwulan IV 2025	42	Grafik 4.23	Pertumbuhan Kredit UMKM Lapangan Usaha Utama Periode Triwulan IV 2025	48
Grafik 4.7	Indeks Penghasilan Konsumen & Ketersediaan Lapangan Kerja Saat Ini Periode Triwulan IV 2025	42	Grafik 4.24	Pertumbuhan dan NPL Kredit UMKM Periode Triwulan IV 2025	49
Grafik 4.8	Pertumbuhan Kredit Korporasi Berdasarkan Lapangan Usaha Ekonomi Utama Periode Triwulan IV 2025	43	Grafik 4.25	Penyaluran KUR Berdasarkan Kabupaten/ Kota Periode Triwulan IV 2025	49
Grafik 4.9	Komposisi Kredit Korporasi Periode Triwulan IV 2025	43	Grafik 4.26	Penyaluran KUR Berdasarkan Sektor Ekonomi Periode Triwulan IV 2025	49
Grafik 4.10	Pertumbuhan Kredit Korporasi sub-LU Pertambangan dan Penggalian Periode Triwulan IV 2025	43	Grafik 5.1	Transaksi Bank Indonesia <i>Real Time Gross Settlement</i> (BI-RTGS)	53
Grafik 4.11	Pertumbuhan Kredit Korporasi Sub-LU Pertanian Periode Triwulan IV 2025	44	Grafik 5.2	Transaksi Sistem Kliring Nasional Bank Indonesia (SKNBI)	53
Grafik 4.12	Pertumbuhan Kredit Korporasi sub-LU Industri Pengolahan Periode Triwulan IV 2025	44	Grafik 5.3	Penarikan dan Setoran Uang Kartal Melalui Bank Indonesia di Kalimantan Selatan	54
Grafik 4.13	NPL Kredit Korporasi Periode Triwulan IV 2025	44	Grafik 5.4	Jumlah <i>Merchant</i> QRIS Berdasarkan Kota/Kabupaten	54
Grafik 4.14	Pertumbuhan Aset, DPK, Kredit dan LDR Periode Triwulan IV 2025	45	Grafik 5.5	Jumlah <i>Merchant</i> QRIS Menurut Skala Usaha	55
			Grafik 5.6	Perkembangan Pemusnahan Uang Tidak Layak Edar (UTLE)	55
			Grafik 5.7	Perkembangan Temuan Uang Rupiah yang Diragukan Keasliannya	56

Daftar Grafik

Grafik 6.1	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	63
Grafik 6.2	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)	63
Grafik 6.3	Indeks Ketersediaan Lapangan Kerja	64
Grafik 6.4	Indeks Penghasilan Konsumen	65
Grafik 6.5	Indeks Keyakinan Konsumen (IKK)	66
Grafik 6.6	IPM Provinsi di Kalimantan dan Nasional	66
Grafik 7.1	Kondisi Negara Mitra Dagang Tahun 2025 dan Prospek pertumbuhan 2026	71

Daftar Tabel

Tabel 1.1	Pertumbuhan PDRB Kalimantan Selatan Sisi Lapangan Usaha Utama	3
Tabel 1.2	Pertumbuhan PDRB Sisi Permintaan	9
Tabel 1.3	Perkembangan Realisasi Belanja APBN di Kalimantan Selatan	11
Tabel 1.4	Perkembangan Realisasi Belanja APBD di Kalimantan Selatan	11
Tabel 2.1	Realisasi Pendapatan dan Belanja APBD Agregat (Provinsi, Kabupaten, dan Kota) Kalimantan Selatan (Rp Miliar kecuali disebutkan lain)	26
Tabel 2.2	Realisasi Pendapatan APBD Agregat (Provinsi, Kabupaten, dan Kota) Kalimantan Selatan (Rp Miliar kecuali disebutkan lain)	26
Tabel 2.3	Realisasi Pendapatan APBD Agregat (Provinsi, Kabupaten, dan Kota) Kalimantan Selatan (Rp Miliar kecuali disebutkan lain)	27
Tabel 2.4	Realisasi Pendapatan APBD Kabupaten dan Kota di Kalimantan Selatan (Rp Miliar kecuali disebutkan lain)	27
Tabel 2.5	Realisasi Pendapatan APBD Kabupaten/Kota di Kalimantan Selatan (Rp Miliar kecuali disebutkan lain)	28
Tabel 2.6	Realisasi Belanja APBD Agregat (Provinsi, Kabupaten, dan Kota) Kalimantan Selatan (Rp Miliar kecuali disebutkan lain)	28
Tabel 2.7	Realisasi Belanja APBD Provinsi Kalimantan Selatan (Rp Miliar kecuali disebutkan lain)	29
Tabel 2.8	Realisasi Belanja APBD Kabupaten dan Kota Kalimantan Selatan (Rp Miliar kecuali disebutkan lain)	30
Tabel 2.9	Realisasi Belanja APBD Kabupaten/Kota di Kalimantan Selatan (Rp Miliar kecuali disebutkan lain)	30
Tabel 3.1	Kelompok Utama Penyumbang Inflasi di Provinsi Kalimantan Selatan pada Triwulan IV 2025	34
Tabel 3.2	Komoditas Utama Penyumbang Inflasi (yoy) pada Triwulan IV 2025	34
Tabel 3.3	Komoditas Utama Penyumbang Deflasi (yoy) pada Triwulan IV 2025	34
Tabel 3.4	Komoditas Utama Pendorong Inflasi bulan Januari 2026 secara tahunan (%yoy)	36
Tabel 3.5	Komoditas Utama Penahan Inflasi bulan Januari 2026 secara tahunan (%yoy)	36
Tabel 3.6	Inflasi Kalimantan Selatan Januari 2026 Menurut Kelompok (yoy)	36
Tabel 4.2	Perkembangan DPK di Kalimantan Selatan secara Spasial Periode Triwulan IV 2025 (Lokasi KC/KCP)	46
Tabel 4.2	Perubahan Tingkat Pendapatan RT Triwulan IV 2025	43
Tabel 4.3	Perkembangan DPK di Kalimantan Selatan secara Spasial Periode Triwulan IV 2025 (Lokasi KC/KCP)	46
Tabel 5.1	Data Triwulanan Kas Titipan Triwulan IV 2025 (Rp Juta)	56
Tabel 5.2	Data Triwulanan Penukaran Uang Kartal Triwulan III 2025 (Rp Juta)	56
Tabel 6.1	Perkembangan Kondisi Ketenagakerjaan	64
Tabel 6.2	Perkembangan Serapan Tenaga Kerja Sektoral	65
Tabel 6.3	Perkembangan Nilai Tukar Petani (NTP)	67
Tabel 6.4	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	67
Tabel 7.1	Risiko PDRB Prov. Kalsel Tahun 2026	73
Tabel 7.2	Risiko Inflasi Prov. Kalsel Tahun 2026	73

Cakupan Pembahasan

Laporan Perekonomian Provinsi Kalimantan Selatan berisi kajian mengenai perkembangan ekonomi Kalimantan Selatan pada triwulan terakhir sesuai rilis Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Badan Pusat Statistik (BPS) dan tracking triwulan berjalan pada bulan penerbitan buku ini. Setiap bagian asesmen disertai oleh data dan informasi penjas antara lain hasil survei, *prompt indicators*, hasil liaison, *focus group discussion* (FGD), informasi anekdot dan data-data lain yang relevan.

- Bab I** Asesmen ringkas terkait evaluasi realisasi pertumbuhan ekonomi triwulan terakhir mencakup analisis evaluasi realisasi perkembangan masing-masing komponen dan faktor-faktor yang mempengaruhinya serta arah pertumbuhan ekonomi triwulan berjalan secara tahunan (yoy), baik dari sisi pengeluaran maupun lapangan usaha (LU).
- Bab II** Asesmen perkembangan terkini realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi dan APBD Kabupaten/Kota, dengan membandingkan realisasi periode terakhir, berjalan dan keseluruhan tahun terhadap periode yang sama tahun lalu, disertai faktor-faktor yang memengaruhi.
- Bab III** Asesmen terkait evaluasi realisasi inflasi triwulan terakhir dan arah perkembangan inflasi triwulan berjalan berdasarkan realisasi inflasi bulan terakhir, dilengkapi dengan faktor-faktor yang menjadi sumber penyebab terjadinya inflasi dengan mengedepankan aspek dinamika pasokan, produksi dan distribusi daerah serta implikasi adanya kebijakan daerah yang berdampak kepada harga-harga. Informasi mengenai pelaksanaan program pengendalian inflasi daerah juga disajikan dalam Bab ini.
- Bab IV** Asesmen pembiayaan daerah serta pengembangan akses keuangan dan usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) yang dilengkapi dengan informasi perkembangan intermediasi perbankan termasuk ketahanan korporasi dan kredit UMKM pada triwulan laporan.
- Bab V** Asesmen perkembangan penyelenggaraan layanan sistem pembayaran dan pengelolaan uang di Bank Indonesia dalam rangka menjaga kelancaran transaksi sistem pembayaran, pengembangan layanan keuangan nontunai, elektronifikasi, penyediaan uang layak edar dan upaya menekan peredaran uang palsu.
- Bab VI** Asesmen ketenagakerjaan menggambarkan perkembangan angkatan kerja dan pengangguran serta asesmen kesejahteraan antara lain mencakup Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) dan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT), Nilai Tukar Petani (NTP), dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) berdasarkan data rilis resmi.
- Bab VII** Prospek perekonomian daerah mencakup prakiraan pertumbuhan ekonomi dan inflasi satu triwulan ke depan dan secara tahunan untuk keseluruhan tahun berjalan

Kinerja ekonomi Kalimantan Selatan pada triwulan III 2025 tumbuh 5,19% (yoy), lebih rendah dibandingkan triwulan sebelumnya. Dari sisi penawaran, melandainya pertumbuhan ekonomi bersumber dari LU Pertanian, LU Industri, dan LU Perdagangan. Dari sisi permintaan, perlambatan disebabkan oleh Konsumsi RT yang termoderasi, meski tertahan oleh peningkatan PMTB, Konsumsi Pemerintah, dan membaiknya kontraksi Ekspor. Inflasi Kalsel pada triwulan III 2025 tercatat sebesar 2,91% (yoy) dan pada akhir tahun diperkirakan masih berada pada target inflasi Nasional, $2,5 \pm 1\%$ (yoy).

Infografis Perekonomian

PERTUMBUHAN EKONOMI

Kinerja ekonomi Kalimantan Selatan pada triwulan IV 2025 tumbuh 5,46% (yoy), lebih tinggi dibandingkan triwulan III 2025. Dari sisi penawaran, pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi didorong oleh kinerja LU Pertanian, dan perbaikan kinerja LU Pertambangan. Sementara dari sisi permintaan, pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi di dorong oleh kinerja Konsumsi Rumah Tangga, PMTB dan Ekspor.



Pertanian

6,91% (yoy)



Pertambangan

0,89% (yoy)

Kinerja LU Pertanian meningkat didorong peningkatan produksi padi yang tercatat tumbuh 36,31% (yoy), lebih tinggi dibandingkan Tw. III 2025 yang hanya tumbuh 4,09% (yoy), dampak masifnya program swasembada pangan berupa optimasi lahan (oplah) yang berdampak positif pada volume dan jumlah panen padi pada Tw. IV 2025.

Kinerja LU Pertambangan mengalami perbaikan setelah mengalami kontraksi 3 (tiga) triwulan berturut-turut, seiring dengan membaiknya permintaan batu bara dari India dan Jepang.



Konsumsi RT

5,27% (yoy)

Tumbuh lebih tinggi seiring dengan peningkatan mobilitas dan kegiatan rekreasi masyarakat pada HBKN Nataru dan pelaksanaan peringatan Haul Guru Sekumpul didukung pemberian diskon transportasi oleh pemerintah.



Ekspor

1,78% (yoy)

Ekspor tumbuh lebih tinggi dari Tw. III 2025 didorong oleh peningkatan ekspor komoditas batu bara, olahan bijih besi dan komoditas yang tergabung dalam HS 16: daging, ikan, krustasea, dan moluska.

INFLASI

Inflasi Kalimantan Selatan pada triwulan IV 2025 lebih tinggi dibandingkan triwulan sebelumnya



PENAHAN (ANDIL YOY)

Tarif Parkir	-0,10%
Tomat	-0,06%
Ikan Gabus	-0,04%

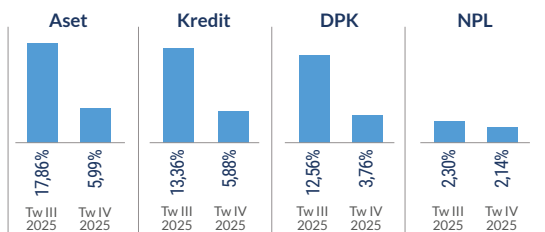
PENDORONG (ANDIL YOY)

Emas Perhiasan	1,50%
Beras	0,21%
Sigaret Kretek Mesin	0,13%

Sumber : BPS

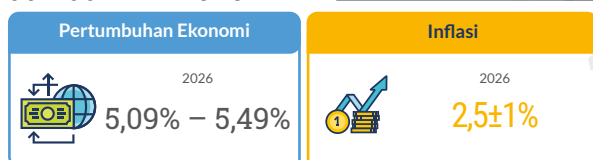
SISTEM KEUANGAN DI DAERAH

Stabilitas sistem keuangan di Kalimantan Selatan tetap terjaga.



Sumber: LBU Bank Indonesia, diolah

OUTLOOK PEREKONOMIAN



Sumber: Perkiraan Bank Indonesia Provinsi Kalimantan Selatan

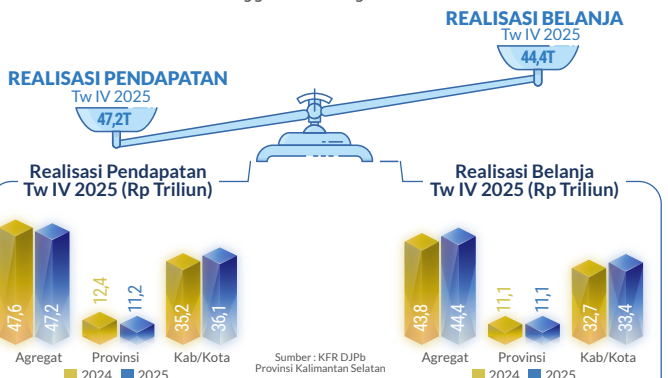
SISTEM PEMBAYARAN & PUR

Kelancaran sistem pembayaran tetap terjaga, eskalasi transaksi masyarakat yang beralih menggunakan BI-FAST.



KEUANGAN DAERAH

Realisasi Pendapatan pada Triwulan IV 2025 lebih rendah dibandingkan Triwulan IV 2024, sementara Realisasi Belanja pada Triwulan IV 2025 lebih tinggi dibanding Triwulan IV 2025



KETENAGAKERJAAN DAN KESEJAHTERAAN

Kondisi kesejahteraan dan ketenagakerjaan berada pada level yang sedikit lebih rendah



RISIKO

- Divergensi pertumbuhan ekonomi negara mitra dagang, peningkatan ketidakpastian global, dan dampak implementasi tarif resiprosal Amerika Serikat (AS).
- Peningkatan krisis geopolitik dan disrupsi rantai pasok komoditas.
- Pemangkasan RKAB dan terhambatnya hilirisasi industri.
- Peningkatan permintaan bahan makanan dampak implementasi MBG yang lebih akseleratif

Tabel Indikator

PDRB DAN INFLASI												
INDIKATOR	TAHUN 2022	TAHUN 2023	TAHUN 2024	TAHUN 2025	2024				2025			
					I	II	III	IV	I	II	III	IV
Pertumbuhan PDRB Harga Konstan (%yoy)	5,11%	4,84%	5,05%	5,22%	4,98%	4,81%	5,23%	5,15%	4,82%	5,39%	5,22%	5,46%
PDRB Harga Konstan	142.339	149.226	156.757	164.958	36.489	39.231	40.574	40.463	38.247	41.344	42.679	42.678
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	18.911	19.537	20.351	21.718	4.039	5.496	6.278	4.538	4.352	5.935	6.553	4.851
Pertambangan dan Penggalian	35.094	36.176	37.271	37.259	8.822	9.133	9.503	9.812	8.820	9.107	9.492	9.900
Industri Pengolahan	17.855	18.395	19.283	20.706	4.671	4.676	4.748	5.188	5.038	5.138	5.172	5.412
Pengadaan Listrik, Gas dan Produksi Es	185	200	213	230	52	53	53	55	58	56	58	58
Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	631	661	692	725	165	172	177	178	172	180	185	187
Konstruksi	10.791	11.470	12.150	12.784	2.765	2.879	3.074	3.433	2.760	3.036	3.256	3.674
Perdagangan Besar dan Eceran; Mobil dan Sepeda Motor	13.202	14.017	14.908	16.113	3.525	3.765	3.769	3.849	3.802	4.067	4.070	4.146
Transportasi dan Pergudangan	9.282	10.299	10.934	11.827	2.541	2.682	2.782	2.929	2.794	2.900	3.004	3.138
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	2.966	3.242	3.503	3.849	847	891	843	922	909	959	908	1.049
Informasi dan Komunikasi	6.319	6.734	7.187	7.809	1.754	1.791	1.811	1.831	1.877	1.948	1.972	2.013
Jasa Keuangan dan Asuransi	4.385	4.763	5.100	5.343	1.256	1.265	1.313	1.266	1.313	1.331	1.302	1.397
Real Estate	3.513	3.735	3.949	4.219	946	974	995	1.035	992	1.047	1.072	1.104
Jasa Perusahaan	898	966	1.033	1.106	244	260	262	268	260	280	282	285
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	7.182	7.392	7.906	8.206	1.948	2.044	1.901	2.012	2.010	2.042	2.033	2.125
Jasa Pendidikan	6.429	6.657	6.986	7.404	1.671	1.836	1.720	1.758	1.756	1.912	1.884	1.880
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	3.047	3.221	3.400	3.605	792	829	870	908	847	878	920	935
Jasa lainnya	1.647	1.761	1.892	2.055	450	486	474	482	488	528	515	524
PDRB Harga Berlaku	251.099	269.192	286.819	305.127	65.213	71.697	74.776	75.132	70.871	76.072	78.796	79.005
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	28.680	30.679	33.119	36.460	6.475	8.985	10.223	7.437	7.318	9.748	10.951	8.131
Pertambangan dan Penggalian	80.558	83.007	84.512	83.989	18.912	20.852	22.096	22.653	20.083	20.578	21.369	22.072
Industri Pengolahan	28.577	28.949	31.410	35.441	7.411	7.450	7.756	8.794	8.572	8.773	8.913	9.315
Pengadaan Listrik dan Gas	321	351	379	413	92	94	95	97	103	100	105	106
Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	913	985	1.061	1.149	247	263	273	278	271	284	294	300
Konstruksi	17.233	18.848	20.321	21.673	4.597	4.806	5.152	5.767	4.666	5.141	5.528	6.284
Perdagangan Besar dan Eceran; Mobil dan Sepeda Motor	22.759	26.027	28.179	31.206	6.584	7.103	7.165	7.327	7.314	7.849	7.874	8.113
Transportasi dan Pergudangan	15.596	19.073	20.816	22.260	4.855	5.165	5.317	5.479	5.217	5.415	5.616	5.834
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	4.507	5.004	5.534	6.245	1.327	1.405	1.335	1.468	1.464	1.556	1.477	1.709
Informasi dan Komunikasi	8.299	8.936	9.657	10.522	2.346	2.409	2.439	2.463	2.527	2.624	2.660	2.711
Jasa Keuangan dan Asuransi	7.462	8.261	8.925	9.515	2.184	2.215	2.305	2.221	2.320	2.367	2.322	2.506
Real Estate	5.072	5.524	5.992	6.602	1.417	1.475	1.514	1.586	1.525	1.620	1.699	1.754
Jasa Perusahaan	1.543	1.746	1.924	2.139	449	483	489	503	493	533	552	561
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	12.025	12.864	14.276	14.932	3.494	3.721	3.432	3.629	3.655	3.744	3.712	3.830
Jasa Pendidikan	9.932	10.538	11.513	12.579	2.692	2.991	2.847	2.983	2.985	3.251	3.193	3.197
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	4.865	5.297	5.756	6.244	1.322	1.394	1.474	1.567	1.464	1.522	1.590	1.626
Jasa lainnya	2.756	3.104	3.442	3.758	812	887	863	880	892	967	941	958
IHK Kalimantan Selatan	117,15	119,99	107,14	111,06	106,32	106,73	105,95	107,14	107,60	108,66	109,23	111,06
Inflasi Kalimantan Selatan (y-o-y)	6,99	2,43	1,95	3,66	2,58	2,34	1,98	1,95	1,20	1,81	2,91	3,66
IHK Banjarmasin	117,05	119,72	107,17	111,42	106,45	106,70	106,25	107,17	107,26	108,95	109,33	111,42
Inflasi Banjarmasin (y-o-y)	6,98	2,28	1,98	3,97	2,58	2,49	2,03	1,98	0,76	2,11	2,90	3,97
IHK Tanjung	114,86	117,61	106,27	109,62	104,57	104,96	104,81	106,27	106,95	107,89	108,00	109,62
Inflasi Tanjung (y-o-y)	5,01	2,39	2,24	3,15	1,64	1,96	2,28	2,24	2,28	2,79	3,04	3,15
IHK Kotabaru	119,83	124,40	106,82	110,06	106,44	107,19	106,73	106,82	107,68	108,63	109,30	110,06
Inflasi Kotabaru (y-o-y)	8,65	3,81	0,26	3,03	2,41	2,16	1,24	0,26	1,16	1,34	2,41	3,03
IHK Hulu Sungai Tengah			108,53	112,79	108,92	109,47	106,47	108,53	109,73	109,98	110,06	112,79
Inflasi Hulu Sungai Tengah (y-o-y)			1,11	3,93	3,68	3,53	1,97	1,11	0,74	0,47	3,37	3,93
IHK Tanah Laut			106,63	109,73	104,91	105,61	104,82	106,63	107,55	107,21	107,73	109,73
Inflasi Tanah Laut (y-o-y)			2,90	2,91	2,29	1,36	2,04	2,90	2,52	1,52	2,78	2,91

Tabel Indikator

SSK																	
INDIKATOR		2022				2023				2024				2025			
		I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV
Total Asset	(Rp Miliar)	81.580	86.604	90.501	99.402	95.293	99.034	98.347	101.871	105.161	109.379	113.465	116.429	119.479	122.391	133.726	123.408
	(%yoy)	12,55%	16,54%	17,91%	24,17%	16,81%	14,35%	8,67%	2,48%	10,35%	10,45%	15,37%	14,29%	13,62%	11,90%	17,86%	5,99%
DPK	(Rp Miliar)	64.473	68.895	72.846	75.948	76.133	77.581	77.239	80.155	82.345	86.063	87.928	92.362	94.602	94.462	98.973	95.834
	(%yoy)	14,40%	19,46%	14,41%	19,76%	18,08%	12,61%	6,03%	5,54%	8,16%	10,93%	13,84%	15,23%	14,88%	9,76%	12,56%	3,76%
Giro	(Rp Miliar)	14.359	17.441	18.776	20.334	19.274	18.895	18.062	22.129	21.289	21.291	21.345	27.127	23.469	22.541	25.736	28.554
	(%yoy)	23,11%	55,44%	28,79%	56,10%	34,24%	8,33%	-3,81%	8,83%	10,45%	12,68%	18,18%	22,59%	10,24%	5,87%	20,57%	5,26%
Tabungan	(Rp Miliar)	34.363	36.057	36.417	38.521	38.451	39.284	38.508	40.546	41.198	42.301	42.204	44.607	44.376	43.806	43.618	46.399
	(%yoy)	15,24%	14,55%	9,01%	12,51%	11,90%	8,95%	5,74%	5,26%	7,14%	7,68%	9,60%	10,01%	7,71%	3,56%	3,35%	4,02%
Deposito	(Rp Miliar)	15.751	15.397	17.653	17.093	18.407	19.402	20.669	17.480	19.636	22.471	24.379	20.628	26.757	28.116	29.619	20.881
	(%yoy)	5,91%	2,82%	12,52%	5,82%	16,86%	26,01%	17,09%	2,26%	6,67%	15,82%	17,95%	18,01%	36,27%	25,12%	21,50%	1,23%
Kredit (L. Proyek)	(Rp Miliar)	72.168	77.851	82.851	89.687	90.518	88.212	90.274	92.259	92.462	95.275	93.889	100.994	103.714	103.604	106.438	108.332
	(%yoy)	7,27%	12,18%	23,50%	24,62%	25,43%	13,31%	8,96%	2,87%	2,15%	8,01%	4,00%	9,47%	12,17%	8,74%	13,36%	5,88%
Modal Kerja	(Rp Miliar)	27.989	30.515	32.475	33.007	31.842	30.705	31.261	32.629	32.574	36.182	35.677	40.210	34.816	33.353	34.811	34.761
	(%yoy)	17,34%	21,90%	33,74%	17,57%	13,77%	0,62%	-3,74%	-1,15%	2,30%	17,84%	14,13%	23,23%	6,88%	-7,82%	-2,43%	-13,55%
Investasi	(Rp Miliar)	19.090	21.785	24.068	29.821	31.364	29.538	30.033	29.826	29.033	27.336	25.355	28.421	34.680	35.583	36.464	37.878
	(%yoy)	-2,06%	7,34%	29,52%	53,87%	64,29%	35,59%	24,78%	0,02%	-7,43%	-7,46%	-15,58%	-4,71%	19,45%	30,17%	43,82%	33,27%
Konsumsi	(Rp Miliar)	25.089	25.551	26.308	26.859	27.312	27.969	28.980	29.805	29.966	31.757	32.858	33.686	34.219	34.668	35.162	35.693
	(%yoy)	4,85%	6,17%	8,61%	9,56%	8,86%	9,47%	10,15%	10,97%	9,72%	13,54%	13,38%	13,02%	14,19%	9,16%	7,01%	5,96%
LDR- Lokasi Proyek		11,94%	113,00%	113,73%	118,09%	118,89%	113,70%	116,88%	115,10%	112,29%	110,70%	106,78%	109,35%	109,63%	109,68%	107,54%	113,04%
NPL (gross)		2,51%	2,48%	2,21%	1,76%	1,74%	1,87%	2,04%	1,83%	2,01%	1,88%	1,98%	1,99%	2,19%	2,28%	2,30%	2,14%

SPPUR													
INDIKATOR	2022	2023				2024				2025			
		TW-I	TW-II	TW-III	TW-IV	TW-I	TW-II	TW-III	TW-IV	TW-I	TW-II	TW-III	TW-IV
Transaksi RTGS	121,485	30,337	28,963	36,161	47,212	32,650	38,229	34,979	47,087	30,448	36,127	50,024	47,269
Pertumbuhan RTGS (%)	-28,96	9,51	-6,53	33,77	32,01	5,53	31,99	-3,27	-0,26	-4,89	-5,50	43,01	0,39
Transaksi Kliring	24,838	4,870	4,415	5,155	5,629	4,620	4,293	4,827	5,335	4,169	4,145	4,492	5,210
Pertumbuhan Kliring (%)	-12,41	-27,53	-31,45	-7,94	-7,58	-5,14	-2,76	-6,37	-5,23	-9,75	-3,43	-6,94	-2,33
Aliran Uang Masuk	13,69	4,252	3,831	3,712	1,724	4,145	3,980	2,655	1,560	2,668	4,124	1,989	0,636
Aliran Uang Keluar	9,85	1,652	3,695	1,709	3,508	2,730	2,930	-1,559	-3,012	-2,515	-1,460	-1,864	-3,277
Aliran Uang Masuk Neto	3,85	2,600	136	2,003	(1,784)	1,411	1,050	1,096	-1,452	0,153	2,664	0,125	-2,641



Ringkasan Eksekutif

PERKEMBANGAN MAKRO EKONOMI DAERAH

Ekonomi Kalimantan Selatan pada triwulan IV 2025 tetap tumbuh solid sebesar 5,46% (yoy), lebih tinggi dibandingkan triwulan III 2025 yang tumbuh sebesar 5,20% (yoy). Di sisi penawaran, pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi pada triwulan IV 2025 didorong pertumbuhan LU Pertanian dan perbaikan kinerja LU Pertambangan. Peningkatan LU Petanian didorong oleh peningkatan produksi padi yang tercatat tumbuh 36,31% (yoy), lebih tinggi dibandingkan triwulan III 2025 yang hanya tumbuh 4,09% (yoy), dampak masifnya program swasembada pangan berupa Optimasi Lahan (Oplah) yang berdampak positif pada volume dan jumlah panen padi triwulan IV 2025. Disisi lain, melandainya produksi Tandan Buah Segar (TBS) dan karet alam menjadi penahan peningkatan kinerja LU Pertanian yang lebih tinggi. Hal ini turut berdampak pada terbatasnya bahan baku industri makan-minum (CPO & turunannya), industri kimia (biodiesel) dan industri karet yang selanjutnya menjadi penahan pertumbuhan LU Industri Pengolahan dan LU Perdagangan. Sementara itu, LU Pertambangan mencatatkan perbaikan kinerja, tumbuh lebih tinggi setelah mengalami kontraksi pertumbuhan selama 3 (tiga) triwulan berturut-turut. Perbaikan kinerja sektor pertambangan seiring dengan membaiknya permintaan batu bara di triwulan IV 2025.

Dari sisi pengeluaran, pertumbuhan ekonomi Provinsi Kalimantan Selatan pada triwulan IV 2025 didorong oleh pertumbuhan Konsumsi Rumah Tangga, PMTB dan Ekspor meski tertahan oleh perlambatan kinerja Konsumsi Pemerintah. Peningkatan kinerja Konsumsi Rumah Tangga didorong peningkatan mobilitas dan kegiatan rekreasi masyarakat pada HBKN Nataru dan pelaksanaan peringatan Haul Guru Sekumpul yang didukung pemberian diskon transportasi oleh pemerintah. Kinerja PMTB mengalami peningkatan, utamanya didorong oleh investasi mesin dan peralatan untuk hilirisasi di KI/KEK Kalimantan Selatan sebagai persiapan commissioning produksi di triwulan IV 2025. Sementara itu, peningkatan ekspor yang lebih tinggi didorong oleh peningkatan ekspor komoditas batu bara, olahan bijih besi dan komoditas yang tergabung dalam HS 16 (a.l daging, ikan, krustasea, dan moluska).



KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH

Secara agregat, realisasi pendapatan daerah di Kalimantan Selatan hingga triwulan IV 2025 lebih rendah dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya. Total realisasi pendapatan daerah Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota di Kalimantan Selatan tercatat sebesar Rp47,02 triliun atau 107,86% dari pagu, lebih rendah dibandingkan realisasi triwulan IV 2024 yang tercatat sebesar Rp47,64 triliun atau 105,94% dari pagu. Penurunan realisasi pendapatan daerah ini bersumber dari penurunan komponen Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat ke Daerah yang berkontraksi sebesar 6,47% (yoy) pada tingkat provinsi maupun kabupaten/kota, serta penurunan pada komponen Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah di tingkat provinsi.

Dari sisi belanja, realisasi Belanja Daerah Pemerintah Provinsi serta Kabupaten/Kota di Kalimantan Selatan hingga triwulan IV 2025 lebih tinggi dibandingkan periode yang sama tahun 2024. Realisasi belanja agregat tercatat sebesar Rp44,44 triliun atau 83,73% dari pagu tahun 2025, lebih tinggi dibandingkan triwulan IV 2024 yang mencapai Rp43,83 triliun atau 87,41% dari pagu. Peningkatan tersebut utamanya didorong oleh komponen Belanja Pegawai yang mengalami peningkatan dari Rp10,78 triliun pada 2024 menjadi Rp11,72 triliun pada 2025 (8,73%, yoy).

PERKEMBANGAN INFLASI

Secara tahunan, inflasi Provinsi Kalimantan Selatan pada triwulan IV 2025 tercatat sebesar 3,66% (yoy), lebih tinggi dibandingkan dengan triwulan III 2025 sebesar 2,91% (yoy).

Berdasarkan kelompok pengeluaran, inflasi pada triwulan IV 2025 didorong oleh peningkatan tekanan inflasi pada kelompok Perawatan Pribadi dan Jasa Lainnya (andil 1,63%, yoy); kelompok Makanan, Minuman, dan Tembakau (andil 1,22%, yoy); kelompok Penyediaan Makanan dan Minuman/Restoran Realisasi inflasi tersebut lebih tinggi dibandingkan dengan inflasi nasional sebesar 2,92% (yoy) dan lebih tinggi dibandingkan historis inflasi Provinsi Kalimantan Selatan selama tiga tahun terakhir sebesar 3,65% (yoy). Berdasarkan kelompok pengeluaran, inflasi pada triwulan IV 2025 terutama didorong oleh kelompok Perawatan Pribadi dan Jasa Lainnya dengan andil sebesar 1,63% (yoy). Selanjutnya kelompok Makanan, Minuman, dan Tembakau (andil 1,22%, yoy); kelompok Penyediaan Makanan dan Minuman/Restoran (andil 0,27%, yoy); kelompok Pendidikan (andil 0,14%, yoy); kelompok Kesehatan (andil 0,12%, yoy); kelompok Transportasi (andil 0,11%, yoy); dan kelompok Pakaian dan Alas Kaki (andil 0,10%, yoy). Di sisi lain, kelompok Rekreasi, Olahraga, dan Budaya tidak mengalami perubahan inflasi (andil 0,00%, yoy). Sedangkan, kelompok Informasi, Komunikasi, dan Jasa Keuangan tercatat mengalami deflasi dengan andil sebesar -0,03% (yoy).

Ringkasan Eksekutif

Pada Januari 2026, inflasi di Provinsi Kalimantan Selatan lebih tinggi dibandingkan dengan Desember 2025. Inflasi di Provinsi Kalimantan Selatan pada Januari 2026 tercatat sebesar 4,66% (yoy), lebih tinggi dibandingkan dengan bulan sebelumnya dengan inflasi sebesar 3,66% (yoy). Dengan perkembangan pada bulan Januari 2026 dampak low base effect kebijakan diskon tarif listrik pada periode Januari 2025. Tekanan inflasi tahunan Provinsi Kalimantan Selatan pada triwulan I 2026 diperkirakan lebih tinggi dibandingkan dengan triwulan IV 2025 antara lain akibat kelompok perumahan, air, listrik, dan bahan bakar rumah tangga diperkirakan meningkat dibandingkan triwulan IV 2025 didorong faktor *base effect* dampak kebijakan diskon tarif listrik pada tahun 2025. Selanjutnya tekanan inflasi pada kelompok transportasi diperkirakan meningkat bersumber dari peningkatan permintaan masyarakat seiring momen HBKN Ramadan dan Idul Fitri 1447 H. Memperhatikan perkembangan terkini dan risiko inflasi ke depan, secara keseluruhan inflasi Provinsi Kalimantan Selatan pada tahun 2026 diperkirakan tetap berada dalam rentang target inflasi Nasional $2,5 \pm 1\%$.

PEMBIAYAAN DAERAH, PENGEMBANGAN AKSES KEUANGAN & USAHA MIKRO KECIL MENENGAH (UMKM)

Pertumbuhan ekonomi Kalimantan Selatan pada triwulan IV 2025 yang positif turut didukung peningkatan fungsi intermediasi perbankan yang tumbuh solid, walaupun lebih rendah dibandingkan triwulan sebelumnya. Kredit perbankan tumbuh positif sebesar 5,88% (yoy) dengan *outstanding* Rp108,33 triliun, lebih rendah dibandingkan dengan triwulan III 2025 yang tumbuh 13,36% (yoy) dengan *outstanding* Rp106,43 triliun; serta diikuti dengan kualitas kredit yang baik, tecermin dari NPL yang terjaga pada level 2,14%.

Pertumbuhan ekonomi Kalimantan Selatan pada triwulan IV 2025 yang positif turut didukung pertumbuhan fungsi intermediasi perbankan yang solid. Kredit perbankan tumbuh positif sebesar 5,88% (yoy) dengan *outstanding* Rp108,33 triliun, namun lebih rendah dibandingkan dengan triwulan III 2025 yang tumbuh 13,36% (yoy) dengan *outstanding* Rp106,43 triliun; serta diikuti dengan kualitas kredit yang baik, tecermin dari NPL yang terjaga pada level 2,14%.

Kredit Konsumsi pada triwulan IV 2025 dengan *outstanding* sebesar Rp35,69 triliun, tumbuh 5,96% (yoy), lebih rendah dibandingkan dengan triwulan sebelumnya yang tumbuh sebesar 7,01% (yoy) dengan *outstanding* sebesar Rp35,16 triliun, sejalan dengan Indeks Ekspektasi yang menurun, meski masih dalam rentang optimis. Berdasarkan distribusinya, Kredit Multiguna memiliki pangsa sebesar 42,93%, kredit kepemilikan rumah (KPR) sebesar 37,86% dan Kredit Kendaraan Bermotor (KKB) sebesar 7,03% serta Kredit Konsumsi lainnya meliputi Kredit Ruko/Rukan, Apartemen, dan Elektronik sebesar 12,10%.

Penyaluran Kredit Korporasi pada triwulan IV 2025 mengalami pertumbuhan sebesar 6,24% (yoy) dengan *outstanding* senilai Rp53,81 triliun, lebih rendah dibandingkan dengan triwulan sebelumnya yang tumbuh 21,67% (yoy) dengan *outstanding* senilai Rp52,13 triliun. Melambatnya pertumbuhan pada Kredit Korporasi terutama bersumber dari melambatnya penyaluran pembiayaan korporasi pada LU Pertambangan (dengan proporsi terbesar mencapai 53,39% dari Kredit Korporasi) yang tumbuh 4,90% (yoy) dengan *outstanding* senilai Rp29,18 triliun, melambat dibandingkan triwulan sebelumnya yang tumbuh 44,89% (yoy) dengan *outstanding* senilai Rp28,10 triliun.

Pada triwulan IV 2025, Kredit UMKM di Kalimantan Selatan berkontraksi 4,29% (yoy) dengan *outstanding* senilai Rp22,85 triliun, menurun dibandingkan dengan triwulan sebelumnya yang tumbuh sebesar 0,73% (yoy) dengan *outstanding* senilai Rp23,15 triliun. Pangsa kredit UMKM terhadap total kredit pada triwulan IV 2025 tercatat sebesar 21,09%, lebih rendah dibandingkan dengan pangsa pada triwulan sebelumnya sebesar 21,75%.

PENYELENGGARAAN SISTEM PEMBAYARAN DAN PENGELOLAAN UANG RUPIAH

Transaksi BI-RTGS pada Triwulan laporan tercatat sebesar Rp47,27 triliun atau tumbuh 0,39% (yoy), menurun dibandingkan triwulan sebelumnya yang tumbuh sebesar 43,01% (yoy) atau sebesar Rp50,02 triliun (Grafik 5.1). Penurunan tersebut sejalan dengan aktivitas perdagangan besar yang menurun tercermin dari LU Perdagangan Besar dan Eceran pada triwulan IV 2025 tumbuh sebesar 7,73% (yoy), melambat dibandingkan triwulan sebelumnya 7,98% (yoy). Nominal transaksi SKNBI tercatat sebesar Rp5,21 triliun atau tumbuh sebesar 5,21% (yoy), lebih tinggi dibandingkan triwulan sebelumnya sebesar 4,49% (yoy) atau sebesar Rp4,49 triliun. (Grafik 5.2). Peningkatan SKNBI seiring dengan semakin masifnya transaksi ritel selama HBKN Natal dan Tahun Baru serta Haul Guru Sekumpul sepanjang triwulan IV 2025.

Ringkasan Eksekutif

Transaksi belanja menggunakan kartu ATM/debit pada triwulan IV 2025 tercatat sebesar Rp1,09 triliun atau kontraksi 2,44% (yoy), lebih baik dibandingkan triwulan sebelumnya yang kontraksi 3,17% (yoy) atau sebesar Rp1,04 triliun. Peningkatan transaksi APMK sejalan dengan peningkatan LU Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum pada triwulan IV 2025 yang tumbuh 13,83% (yoy), lebih tinggi dibandingkan triwulan sebelumnya yang tumbuh 9,69% (yoy) seiring dengan peningkatan konsumsi masyarakat selama HBKN Natal dan Tahun Baru serta Haul Guru Sekumpul.

Dari sisi transaksi tunai, aliran uang kartal melalui Kantor Perwakilan Bank Indonesia Kalimantan Selatan mengalami net outflow sebesar Rp2,64 triliun. Kondisi tersebut berbeda dibandingkan triwulan sebelumnya yang mengalami *net inflow* sebesar Rp0,13 triliun (Grafik 5.3). Kondisi *net outflow* pada triwulan IV 2024 sejalan dengan pola historis kebutuhan uang kartal yang meningkat pada momen HBKN Nataru dan libur akhir tahun serta pergeseran penyelenggaraan Haul Guru Sekumpul yang berlangsung pada Desember 2025.

Perkembangan elektronifikasi dan digitalisasi terus mengalami peningkatan, tecermin dari peningkatan jumlah *merchant* yang telah memiliki QRIS di Kalimantan Selatan yang tumbuh sebesar 30,01% (yoy) atau mencapai 536,46 ribu *merchant*. Sementara itu, Kalimantan Selatan mampu mempertahankan pencapaian skor Indeks Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (IETPD) pada Semester II 2025 dengan status 100% digital.

PERKEMBANGAN KETENAGAKERJAAN DAERAH DAN KESEJAHTERAAN

Kondisi ketenagakerjaan Provinsi Kalimantan Selatan pada semester II 2025 berada pada level yang sedikit lebih rendah dibandingkan dengan semester II 2024. Meskipun demikian Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kalimantan Selatan menurun sejalan dengan peningkatan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK). Berdasarkan lapangan usaha (LU), penyerapan tenaga kerja di Provinsi Kalimantan Selatan pada November 2025 didominasi oleh sektor Pertanian, Perdagangan, Akomodasi dan Penyediaan Makan Minum, serta Industri Pengolahan. LU Pertanian menjadi penyerap tenaga kerja terbesar dengan pangsa 28,77% dengan peningkatan tenaga kerja hingga 39,72 ribu orang dibandingkan Agustus 2025.

Optimisme daya beli masyarakat pada triwulan IV 2025 masih terjaga, meskipun mengalami penurunan dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Hal ini tercermin dari Indeks Penghasilan Konsumen saat ini yang tercatat sebesar 119,44, lebih rendah dibandingkan 125,38 pada triwulan IV 2024. Pada tahun 2025, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Provinsi Kalimantan Selatan tercatat sebesar 76,10, meningkat dibandingkan tahun 2024 yang sebesar 75,19. Peningkatan IPM Kalimantan Selatan bersumber dari peningkatan seluruh dimensi umur panjang dan hidup sehat (UHH), serta pengetahuan yakni Harapan Lama Sekolah (HLS) dan Rata-rata Lama Sekolah (RLS) serta standar hidup layak (pengeluaran per kapita).

PROSPEK PEREKONOMIAN DAERAH

Perekonomian Provinsi Kalimantan Selatan tahun 2026 diperkirakan tetap tumbuh positif pada kisaran 5,0%-5,8% (yoy).

Dari sisi penawaran, pertumbuhan ekonomi diperkirakan didorong oleh berlanjutnya kinerja positif LU Pertanian, Industri Pengolahan, dan LU Perdagangan, ditopang oleh program swasembada pangan, peningkatan aktivitas investasi dan produksi di KI/KEK serta permintaan domestik yang masih tetap kuat sejalan dengan kenaikan UMP dan program ekonomi kerakyatan (a.l MBG dan KDKMP) yang diperkirakan lebih akseleratif di tahun 2026. Dari sisi pengeluaran, kinerja ekonomi Kalimantan Selatan ditopang oleh peningkatan kinerja Konsumsi Rumah Tangga, PMTB dan Ekspor. Kinerja Konsumsi RT diperkirakan tumbuh positif sejalan dengan daya beli masyarakat yang masih tumbuh kuat seiring program ekonomi kerakyatan (a.l MBG dan KDKMP), stimulus perekonomian dan ketersediaan lapangan pekerjaan yang lebih baik. PMTB diperkirakan tumbuh lebih tinggi seiring dengan aktivitas produksi dan hilirisasi yang diperkirakan meningkat. Hal tersebut diperkirakan turut mendorong peningkatan kinerja Ekspor.

Secara keseluruhan 2026, inflasi Provinsi Kalimantan Selatan diperkirakan lebih rendah dibandingkan dengan tahun 2025 dan berada dalam rentang sasaran $2,5 \pm 1\%$ (yoy). Menurunnya tekanan inflasi pada keseluruhan tahun 2026 dapat dilihat melalui sisi penawaran yang dipengaruhi oleh meningkatnya luasan lahan pertanian seiring implementasi program Optimasi Lahan (Oplah) dan Cetak Sawah Rakyat (CSR). Selanjutnya, prospek cuaca yang didominasi oleh fase netral juga diperkirakan meningkatkan produksi bahan makanan. Lebih lanjut, pasokan minyak mentah dunia yang dimiliki oleh negara-negara OPEC+ yang mengalami *oversupply* diperkirakan menurunkan harga bahan bakar.

01

Perkembangan Ekonomi Provinsi Kalimantan Selatan





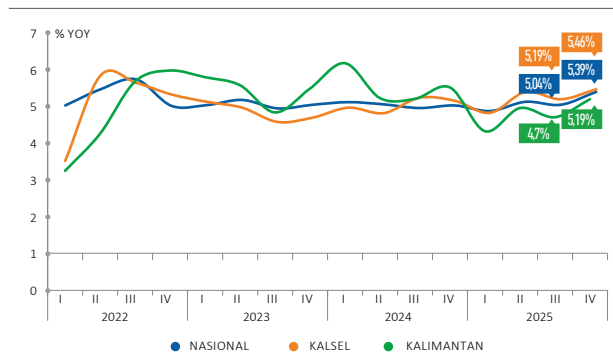
Pada triwulan IV 2025, perekonomian Provinsi Kalimantan Selatan tumbuh 5,46% (yoy), lebih tinggi dibandingkan triwulan III 2025 yang tumbuh sebesar 5,20% (yoy).

Dari sisi penawaran, pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi didorong oleh kinerja LU Pertanian dan membaiknya kinerja LU Pertambangan. Peningkatan kinerja LU pertanian didorong oleh peningkatan produksi padi yang tercatat tumbuh 36,31% (yoy), lebih tinggi dibandingkan Tw. III 2025 yang hanya tumbuh 4,09% (yoy), dampak masifnya program swasembada pangan berupa optimasi lahan (oplah) yang berdampak positif pada volume dan jumlah panen padi pada Tw. IV 2025. Sementara itu, LU Pertambangan mencatatkan perbaikan kinerja pertumbuhan yang lebih tinggi setelah mengalami kontraksi 3 (tiga) triwulan berturut-turut seiring dengan membaiknya permintaan batu bara di triwulan IV 2025. Pertumbuhan yang lebih tinggi tertahan oleh perlambatan kinerja LU Industri Pengolahan seiring dengan melambatnya Industri Makanan dan Minuman, Industri Kayu dan Industri Karet dampak gangguan produksi pada sisi hulu. Hal tersebut juga berdampak pada perlambatan kinerja LU Perdagangan. Selain itu, perlambatan kinerja LU Konstruksi turut menahan pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi, seiring dengan terbatasnya kinerja konstruksi sektor pemerintah.

Dari sisi pengeluaran, pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi didorong oleh peningkatan kinerja Konsumsi RT, PMTB dan Ekspor meski tertahan oleh perlambatan kinerja Konsumsi Pemerintah. Peningkatan kinerja Konsumsi RT didorong peningkatan mobilitas dan kegiatan rekreasi masyarakat pada HBKN Nataru dan pelaksanaan peringatan Haul Guru Sekumpul yang didukung pemberian diskon transportasi oleh pemerintah. Kinerja PMTB mengalami peningkatan, utamanya didorong oleh investasi mesin dan peralatan untuk hilirisasi di KI/KEK Kalimantan Selatan sebagai persiapan commissioning produksi di triwulan IV 2025. Sementara itu, peningkatan ekspor yang lebih tinggi didorong oleh peningkatan ekspor komoditas batu bara, olahan bijih besi dan komoditas yang tergabung dalam HS 16 (a.l daging, ikan, krustasea, dan moluska).

Pada 2025, perekonomian Provinsi Kalimantan Selatan tumbuh 5,22% (yoy), lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan tahun 2024 yang hanya tumbuh 5,06% (yoy). Pertumbuhan positif ini ditopang oleh kinerja LU Industri Pengolahan yang tumbuh tinggi didorong oleh akselerasi aktivitas produksi di KI/KEK, LU Pertanian dari program swasembada pangan pemerintah yakni Program Optimalisasi Lahan, serta permintaan domestik yang masih tetap kuat sejalan dengan UMP dan gaji ASN yang meningkat di tahun 2025 serta pelaksanaan event perayaan momen 5 Rajab (Haul Guru Sekumpul) yang dilaksanakan 2 kali Pada tahun 2025. Perekonomian Provinsi Kalimantan Selatan tahun 2026 diperkirakan melanjutkan tren pertumbuhan di tahun 2025, diperkirakan tumbuh pada kisaran 5,0%-5,8% seiring prakiraan berlanjutnya aktivitas hilirisasi industri di KI/KEK, berlanjutnya program swasembada pangan dan makin masifnya program ekonomi kerakyatan (a.l MBG dan KDKMP).

Perekonomian Kalimantan Selatan pada triwulan IV 2025 tetap tumbuh solid, lebih tinggi dibandingkan triwulan III 2025. Ekonomi Kalimantan Selatan tumbuh 5,46% (yoy), lebih tinggi dari triwulan sebelumnya yang tumbuh 5,20% (yoy). Angka pertumbuhan Kalimantan Selatan tercatat lebih tinggi dari pertumbuhan ekonomi wilayah Kalimantan maupun nasional yang masing-masing sebesar 5,19% (yoy) dan 5,39% (yoy) (Grafik 1.1).



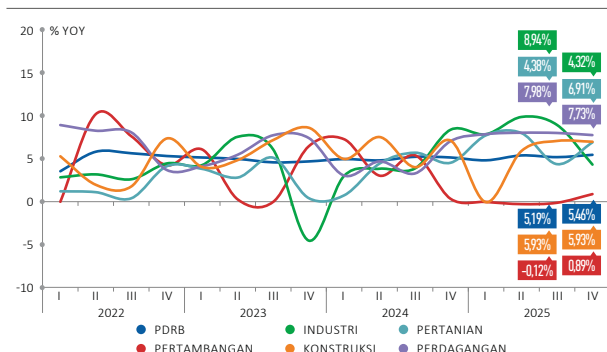
Sumber: BPS (diolah)

Grafik 1.1 Pertumbuhan Ekonomi Kalimantan Selatan, Kalimantan, dan Nasional

Dari sisi penawaran, pertumbuhan ekonomi Kalimantan Selatan yang lebih tinggi bersumber dari LU Pertanian, dan perbaikan kinerja sektor Pertambangan (Grafik 1.2). Pada triwulan IV 2025, LU Pertanian tumbuh 6,91% (yoy), lebih tinggi dibandingkan triwulan sebelumnya seiring dengan peningkatan produksi padi triwulan IV sebesar 33,52% (yoy). Sementara itu, perbaikan kinerja sektor pertambangan didorong oleh peningkatan aktivitas produksi dan ekspor komoditas batu bara sejalan dengan peningkatan permintaan dari aktivitas industri di India dan Jepang.

Pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi tertahan oleh melambatnya kinerja LU Industri Pengolahan, LU Perdagangan dan LU Konstruksi. LU Industri Pengolahan mengalami perlambatan seiring dengan penurunan kinerja industri turunan sawit dan karet akibat berkurangnya bahan baku industri karena tingginya curah hujan yang berdampak pada penurunan produktivitas

dan aktivitas di sisi hulu. Selain itu, pelemahan kinerja Industri Pengolahan tersebut juga berdampak pada penurunan kinerja LU Perdagangan. Sementara itu, LU Konstruksi juga mengalami perlambatan pertumbuhan seiring dengan aktivitas konstruksi sektor pemerintah yang lebih rendah dibandingkan triwulan yang sama tahun sebelumnya.



Sumber: BPS (diolah)

Grafik 1.2 Pertumbuhan Ekonomi Kalimantan Selatan Sisi Sektoral

Dari sisi pengeluaran, pertumbuhan ekonomi Provinsi Kalimantan Selatan pada triwulan IV 2025 didorong oleh Konsumsi Rumah Tangga, Pembentukan Nilai Tambah Bruto (PMTB) dan Ekspor. Peningkatan kinerja Konsumsi RT didorong oleh peningkatan mobilitas dan kegiatan rekreasi masyarakat pada HBKN Nataru dan pelaksanaan peringatan Haul Guru Sekumpul yang didukung pemberian diskon transportasi oleh pemerintah. Sementara itu, Kinerja PMTB tumbuh lebih tinggi, terutama didorong oleh masifnya belanja mesin dan peralatan untuk kebutuhan industri hilirisasi di Kalimantan Selatan seiring perampungan *smelter* prekursor katoda di KEK Setangga serta pembangunan fasilitas pendukung *smelter* besi di KI Sebuk yang diperkirakan berproduksi pada semester I tahun 2026. Ekspor tumbuh lebih tinggi dari triwulan sebelumnya, sejalan dengan perbaikan kinerja sektor pertambangan dan tingginya permintaan dari India dan Jepang.

Tabel 1.1 Pertumbuhan PDRB Kalimantan Selatan Sisi Lapangan Usaha Utama

SEKTOR	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024				2025			
								I	II	III	IV	I	II	III	IV
Pertanian	4,09	3,73	3,59	-0,91	1,17	1,59	3,31	0,72	4,73	5,72	4,53	7,74	7,99	4,38	6,91
Pertambangan	4,09	4,11	1,36	-4,44	4,14	5,57	3,08	6,46	1,92	3,87	0,34	-0,03	-0,28	-0,12	0,89
Pengolahan	5,69	4,34	1,72	-3,63	6,01	3,31	3,02	3,01	3,84	3,88	8,38	7,86	9,87	8,94	4,32
Konstruksi	5,78	5,89	6,08	-1,29	2,87	4,12	6,29	4,98	7,54	4,02	7,13	-0,17	5,46	5,93	6,99
Perdagangan	7,8	7,54	7,42	-3,38	2,91	7,15	6,17	4,79	7,08	6,45	7,02	7,84	8,01	7,98	7,73
Total PDRB	5,28	5,08	4,09	-1,82	3,48	5,11	4,84	4,98	4,81	5,23	5,15	4,82	5,39	5,20	5,46

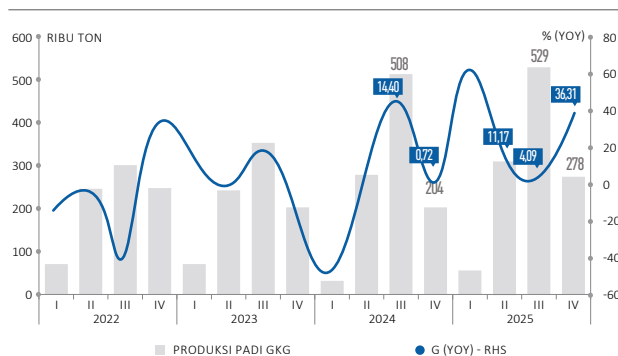
Sumber: BPS, diolah

1.1 SISI LAPANGAN USAHA: SEKTOR UTAMA EKONOMI

Dari sisi penawaran, struktur ekonomi Provinsi Kalimantan Selatan pada triwulan IV 2025 masih didominasi oleh LU Pertambangan dengan pangsa sebesar 27,94%; diikuti oleh LU Industri Pengolahan (11,79%), LU Pertanian (10,29%), LU Perdagangan (10,27%), dan LU Konstruksi (7,95%).

1.1.1 LU Pertanian

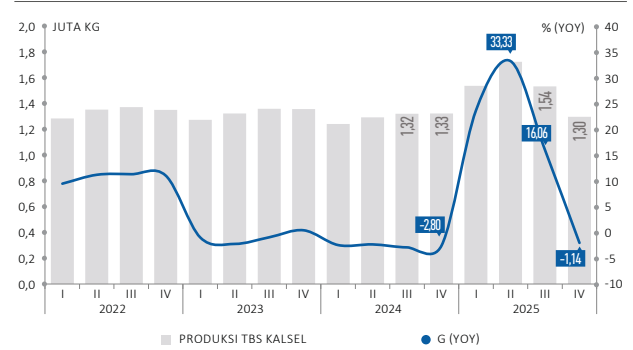
LU Pertanian pada triwulan IV 2025 tumbuh lebih tinggi didorong peningkatan produksi padi. LU Pertanian tercatat tumbuh sebesar 6,91% (yoy) pada triwulan IV 2025, lebih tinggi dibandingkan triwulan III 2025 yang tumbuh sebesar 4,64% (yoy). Peningkatan kinerja LU Pertanian bersumber dari peningkatan produksi padi pada triwulan IV 2025 yang tumbuh sebesar 36,31% (yoy) atau meningkat sebesar 68 ribu ton, lebih tinggi dibandingkan triwulan III 2025 yang tumbuh 4,09% (yoy) atau meningkat 25 ribu ton. Peningkatan produksi padi seiring dengan program optimasi lahan (oplah) di Kalimantan Selatan tahun 2025.



Sumber : BPS Kalsel, DPKP Kalsel (diolah)

Grafik 1.3 Produksi Padi GPK Provinsi Kalimantan Selatan

Di sisi lain, penurunan produksi TBS sawit menjadi penahan peningkatan kinerja LU Pertanian pada triwulan IV 2025. Perlambatan produksi sawit disebabkan oleh tingginya curah hujan dan berlanjutnya dampak musim trek, atau gangguan penyerbukan buah sawit pada triwulan IV 2025 (Grafik 1.3). Produksi sawit pada triwulan IV 2025 berkontraksi sebesar 1,99% (yoy) atau sebesar 1,30 juta ton, lebih rendah dibandingkan triwulan III 2025 yang tumbuh sebesar 1,54 juta ton.



Sumber : Angka Prakiraan Bank Indonesia dari GAPKI dan BPS Kalsel (diolah)

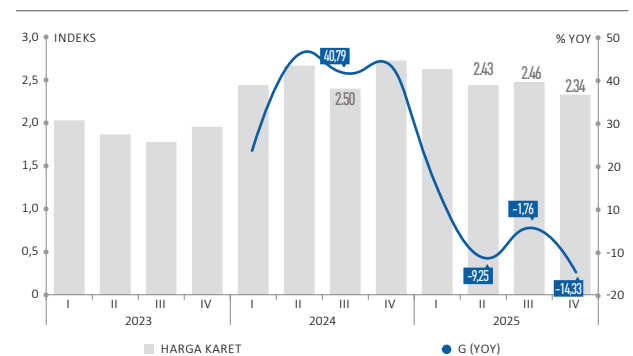
Grafik 1.4 Produksi Tandan Buah Segar (Sawit)

Lebih lanjut, produksi karet juga mencatatkan perlambatan. Produksi karet pada triwulan IV 2025 berkontraksi sebesar 14,33% (yoy), lebih dalam dibandingkan triwulan II 2025 yang juga berkontraksi sebesar 1,52% (yoy) (Grafik 1.5). Penurunan produksi karet sejalan dengan curah hujan tinggi yang mengurangi frekuensi penyadapan. Lebih lanjut, harga komoditas karet global juga masih mengalami kontraksi, yakni sebesar 7,73% (yoy) (Grafik 1.6).



Sumber : GAPKINDO KalselTengTim (diolah)

Grafik 1.5 Produksi Karet Provinsi Kalimantan Selatan



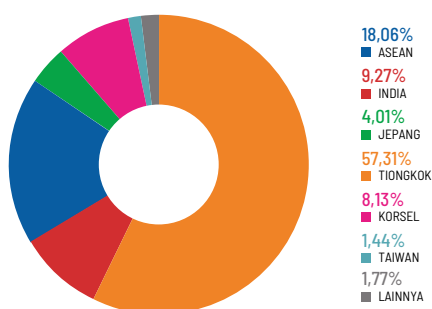
Sumber : MRESMVC Index

Grafik 1.6 Harga Karet

Kinerja Lapangan Usaha (LU) Pertanian pada triwulan I 2026 diperkirakan tumbuh lebih tinggi dibandingkan triwulan IV 2025. Peningkatan LU Pertanian didorong oleh meningkatnya produksi padi sejalan dengan prakiraan KSA produksi padi yang lebih tinggi dampak masifnya dukungan pemerintah dalam mendorong peningkatan produksi pangan melalui Program Optimalisasi Lahan. Hal tersebut terindikasi dari angka produksi padi yang diperkirakan meningkat.

1.1.2 LU Pertambangan

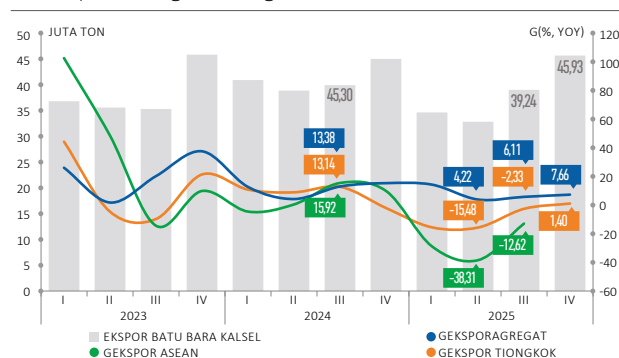
Kinerja LU Pertambangan pada Tw. IV 2025 meningkat. Pertumbuhan positif pertama setelah mengalami 3 triwulan kontraksi, tumbuh sebesar 0,89% (yoy), lebih tinggi dibandingkan Tw. III 2025 yang terkontraksi sebesar 0,27% (yoy). Perbaikan kinerja LU pertambangan ini didorong oleh membaiknya permintaan batu bara dari negara mitra dagang utama dan masih kuatnya permintaan batu bara domestik.



Sumber: Dirjen bea dan cukai, diolah

Grafik 1.7 Pangsa Volume Ekspor Batu Bara Kalimantan Selatan Triwulan III 2025

Pasar ekspor utama batu bara Kalimantan Selatan ditujukan ke Asia. Pada triwulan IV 2025, pangsa ekspor didominasi oleh Tiongkok (57,31%), ASEAN (18,06%), India (9,27%), Korsel (8,13%), dan Jepang (4,01%). Adapun jenis batu bara yang diminati oleh pasar Asia berupa batu bara termal yang diperuntukan untuk bahan bakar pembangkit energi listrik.

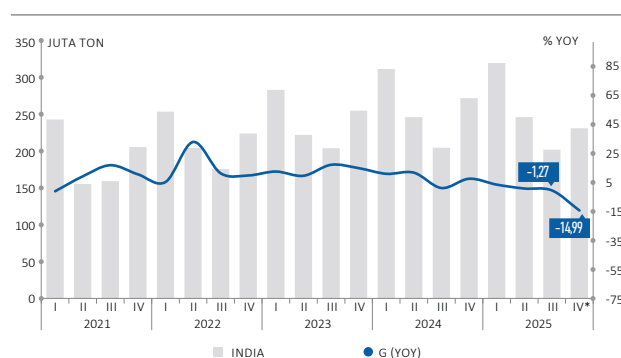


Sumber: Dirjen bea dan cukai, diolah

Grafik 1.8 Perkembangan Volume Ekspor Batu Bara Kalimantan Selatan

Kinerja LU Pertambangan yang tumbuh didorong oleh perbaikan kinerja ekspor. Secara agregat, volume ekspor batu bara Kalimantan Selatan pada triwulan IV 2025 mencapai 45,93 juta ton atau tumbuh 1,40% (yoy), membaik dibandingkan triwulan III 2025 yang mencapai 39,24 juta ton, atau tumbuh -2,33% (yoy) (Grafik 1.8).

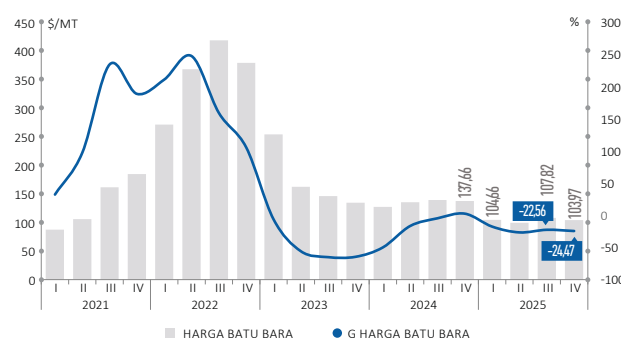
Peningkatan kinerja ekspor antara lain ditopang oleh perbaikan ekspor ke India dan ASEAN. Volume ekspor batu bara ke India tumbuh 17,69% (yoy) pada triwulan IV 2025, lebih tinggi dibandingkan triwulan sebelumnya yang tumbuh -5,98% (yoy). Selanjutnya, kinerja ekspor batu bara ke ASEAN tercatat meningkat 7,66% (yoy), lebih tinggi dibandingkan triwulan III 2025 yang tumbuh 6,11% (yoy).



Sumber: McCloskey, diolah

Grafik 1.9 Produksi Batu Bara India

Kinerja ekspor batu bara Kalimantan Selatan yang membaik sejalan dengan penurunan produksi batu bara India. Pada triwulan IV 2025, produksi batu bara India terkontraksi 15,50% (yoy), turun dibandingkan triwulan sebelumnya yang tumbuh 1,27% (yoy) (Grafik 1.9). Hal tersebut seiring musim monsun yang berdampak pada penurunan aktivitas pertambangan di India.



Sumber: Pink Sheet World Bank (diolah)

Grafik 1.10 Harga Batu Bara Dunia

Membaiknya permintaan batu bara terjadi di tengah pelemahan harga batu bara dunia. Rerata batu bara Newcastle pada triwulan IV 2025 mencapai \$103,97/

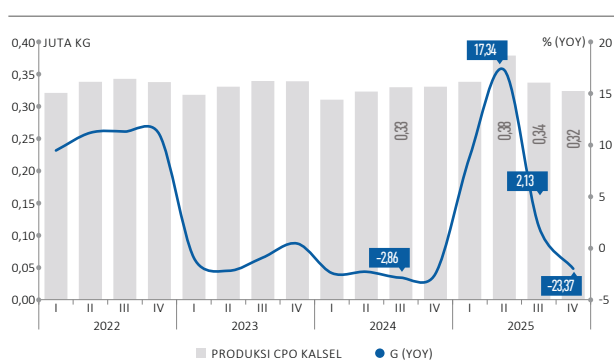
MT, atau terkontraksi -24,47% (yoy), lebih rendah dibandingkan triwulan III 2025 yang berada di level \$107,82/MT atau terkontraksi -22,56% (yoy).

Pada triwulan I 2026, LU Pertambangan diperkirakan mengalami kontraksi. Hal ini didorong oleh keterlambatan penerbitan Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) batu bara dan pemangkasan yang berdampak pada ketidakpastian produksi bagi pelaku usaha.

1.1.3 LU Industri Pengolahan

Pada triwulan IV 2025, kinerja LU Industri Pengolahan tumbuh tetap solid meski melandai dibandingkan triwulan sebelumnya. LU Industri Pengolahan pada triwulan IV 2025 tumbuh sebesar 4,32% (yoy), lebih rendah dibandingkan triwulan III 2025 yang tumbuh 8,10% (yoy). Perlambatan LU Industri sejalan dengan melandainya pertumbuhan produksi TBS dan Karet di LU Pertanian.

Perlambatan LU Industri tercermin dari produksi CPO yang tumbuh melambat. Pada triwulan IV 2025, produksi CPO menurun 1,99% (yoy), lebih rendah dibandingkan triwulan III 2025 yang tumbuh 2,13% (yoy). Terkontraksinya produksi CPO sejalan dengan penurunan produksi TBS sawit yang tertahan dampak curah hujan tinggi dan masih berlangsungnya dampak musim trek (Grafik 1.11).

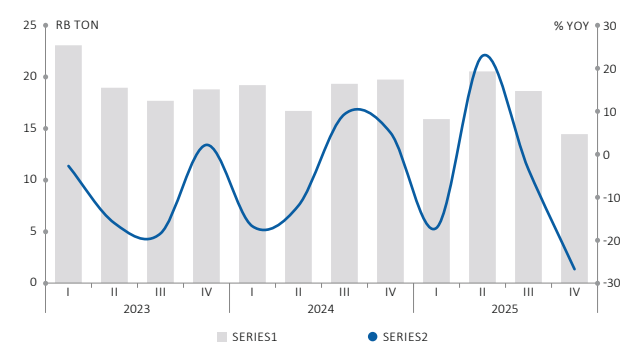


Sumber : Angka Prakiraan Bank Indonesia dari GAPKI dan BPS Kalsel (diolah)

Grafik 1.11 Produksi CPO

Lebih lanjut, melandainya pertumbuhan LU Industri antara lain tercermin dari penurunan ekspor olahan karet. Pada triwulan IV 2025, pertumbuhan volume ekspor karet terkontraksi sebesar 26,76% (yoy), jauh lebih rendah dibandingkan triwulan III 2025 yang terkontraksi

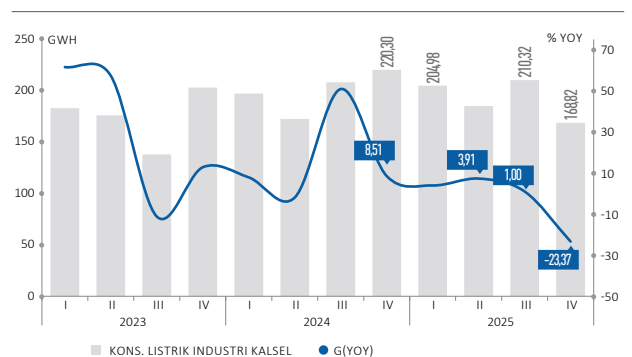
sebesar 3,55% (yoy) (Grafik 1.12). Penurunan kinerja ekspor tersebut sejalan dengan melambatnya hasil sadapan dan produksi karet, antara lain akibat curah hujan yang cukup intens sehingga mengganggu aktivitas penyadapan.



Sumber: Dirjen bea dan cukai, diolah

Grafik 1.12 Perkembangan Ekspor Karet

Perlambatan LU Industri Pengolahan juga terindikasi dari melambatnya konsumsi listrik industri. Pada triwulan IV 2025, konsumsi listrik mencapai 168,82 gWh terkontraksi 23,37% (yoy), lebih rendah dibandingkan triwulan III 2025 yang sebesar 210,32 gWh, atau 1,00% (yoy) (Grafik 1.13).



Sumber: PLN (diolah)

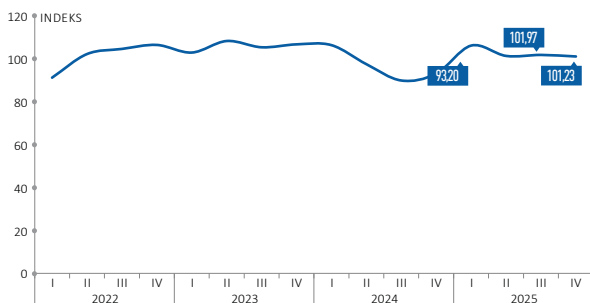
Grafik 1.13 Konsumsi Listrik Industri

Pada triwulan I 2026, LU Industri Pengolahan diperkirakan tumbuh solid, meningkat dibandingkan triwulan IV 2025. Pertumbuhan yang lebih tinggi didorong mulai berproduksinya *Smelter Pig iron* di kawasan industri yang telah *commissioning* pada bulan Desember 2025 dengan prakiraan produksi sepanjang triwulan I 2026 mencapai 12,7 ribu ton *Pig iron*. Selain itu, produksi beras diperkirakan mengalami peningkatan seiring dengan peningkatan produksi padi di LU Pertanian.

1.1.4 LU Perdagangan

Pada triwulan IV 2025, kinerja LU Perdagangan tumbuh melandai. LU Perdagangan tumbuh 7,73% (yoy), lebih rendah dibandingkan triwulan III 2025 yang tumbuh sebesar 7,73% (yoy). Perlambatan LU Perdagangan sejalan dengan aktivitas perdagangan produk pertanian (a.l TBS, Karet) dan perlambatan kinerja LU Industri Pengolahan CPO dan Karet.

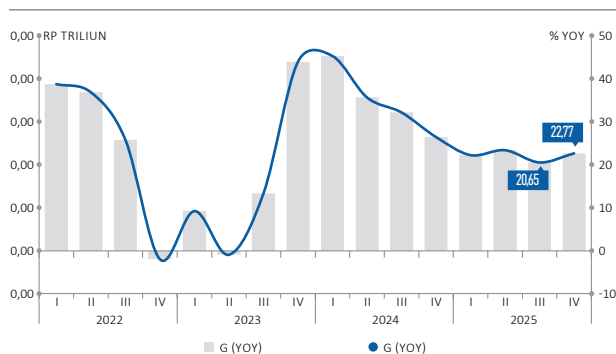
Selain itu, LU Perdagangan yang tumbuh melambat pada triwulan laporan tercermin dari indeks penjualan riil yang sedikit melandai. Indeks penjualan riil pada triwulan IV 2025 tercatat sebesar 101,23, melandai dibanding triwulan III 2025 yang sebesar 101,97 (Grafik 1.14).



Sumber: Survei Penjualan Eceran Bank Indonesia (Diolah)

Grafik 1.14 Hasil Survei Penjualan Eceran Kalimantan Selatan

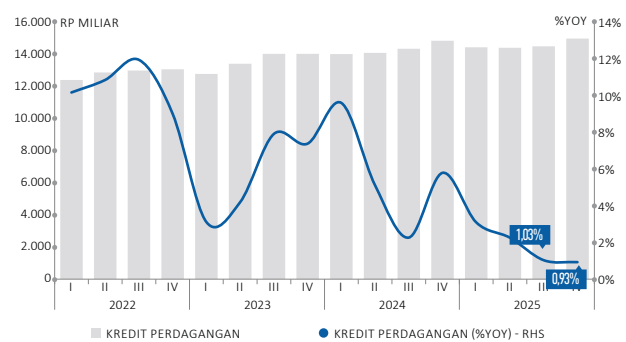
Masih tinggi dan positifnya pertumbuhan LU Perdagangan di Kalimantan Selatan ditopang tetap tingginya transaksi e-commerce. Pertumbuhan nilai transaksi e-commerce pada triwulan IV 2025 tumbuh 22,77% (yoy), meningkat dibandingkan triwulan III 2025 yang tumbuh 20,65% (yoy) (Grafik 1.15). Peningkatan nilai transaksi pada triwulan laporan seiring dengan pelaksanaan HBKN dan peringatan event kedaerahan 5 rajab.



Sumber: Agregasi Marketplace Indonesia (Diolah)

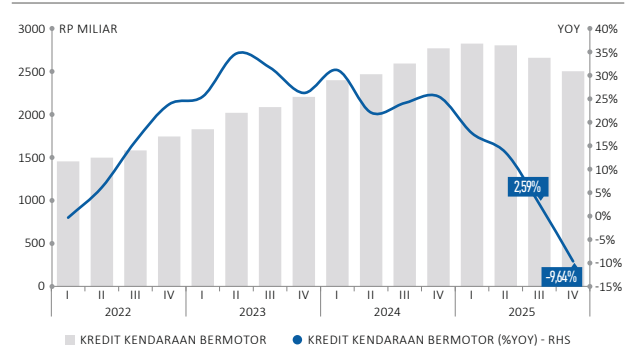
Grafik 1.15 Perkembangan Transaksi e-Commerce

Kredit perdagangan dan kredit kendaraan bermotor juga mengalami perlambatan. Kredit perdagangan tumbuh terbatas 0,93% (yoy), lebih rendah dibandingkan triwulan sebelumnya yang tumbuh 1,03% (yoy) (Grafik 1.16). Sejalan dengan kinerja kredit perdagangan yang melandai, penyaluran kredit kendaraan bermotor pada triwulan IV 2025 terkontraksi sebesar 9,64% (yoy), lebih dalam dibandingkan triwulan lalu -2,59% (yoy) (Grafik 1.17).



Sumber: Laporan Bank Umum (LBU) Bank Indonesia, diolah

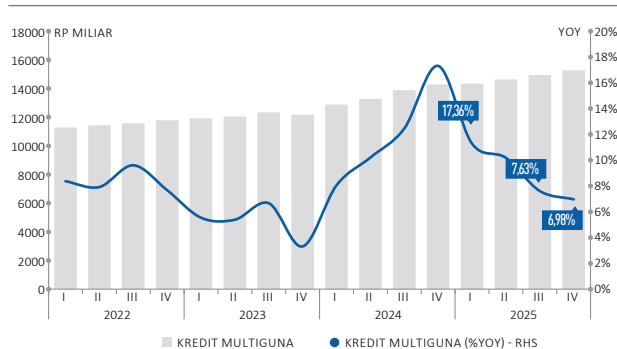
Grafik 1.16 Perkembangan Kredit Perdagangan di Kalimantan Selatan



Sumber: Laporan Bank Umum (LBU) Bank Indonesia, diolah

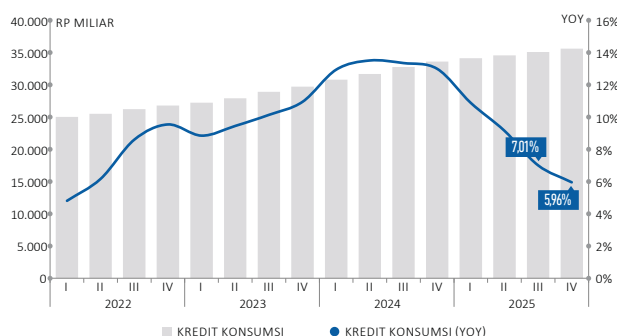
Grafik 1.17 Perkembangan Kredit Kendaraan Bermotor di Kalimantan Selatan

Normalisasi pola konsumsi juga tergambar dari perlambatan kredit multiguna dan konsumsi. Penyaluran kredit multiguna pada triwulan IV 2025 tumbuh 6,98% (yoy), melambat dibandingkan triwulan III 2025 yang tumbuh 7,63% (yoy) (Grafik 1.18). Selain itu, kredit konsumsi juga mengalami perlambatan, tumbuh 5,96% (yoy), lebih rendah dibandingkan triwulan III 2025 yang tumbuh sebesar 7,63% (yoy) (Grafik 1.19).



Sumber: Laporan Bank Umum (LBU) Bank Indonesia, diolah

Grafik 1.18 Perkembangan Kredit Multiguna di Kalimantan Selatan



Sumber: Laporan Bank Umum (LBU) Bank Indonesia, diolah

Grafik 1.19 Perkembangan Kredit Konsumsi di Kalimantan Selatan

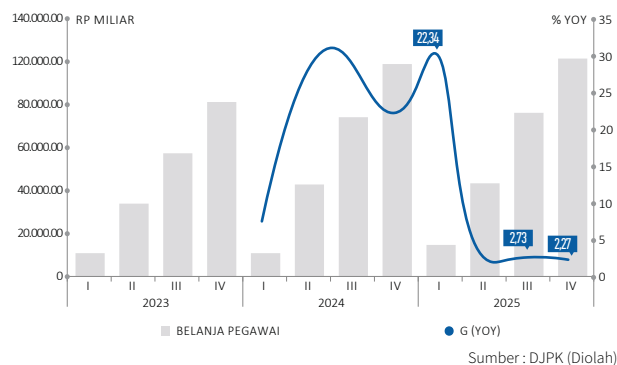
Kinerja LU Perdagangan pada triwulan I 2026 diperkirakan meneruskan tren perlambatan pertumbuhan, seiring dengan terbatasnya aktivitas di Perkebunan Sawit dan Pertambangan Batubara.

Kinerja LU Perdagangan diperkirakan melambat seiring dengan penurunan aktivitas di LU Pertanian, khususnya pada tanaman perkebunan sawit dampak belum pulihnya produktivitas pasca terjadinya musim trek buah. Selain itu, keterlambatan penerbitan RKAB dan pemangkasan produksi batu bara diperkirakan berdampak pada penurunan aktivitas pertambangan batu bara.

1.1.5 LU Konstruksi

LU Konstruksi pada triwulan laporan tumbuh 6,99% (yoy), lebih rendah dibandingkan pertumbuhan triwulan III 2025, seiring lebih terbatasnya kegiatan konstruksi proyek pemerintah. Perlambatan kinerja LU Konstruksi antara lain tercermin dari pertumbuhan realisasi belanja modal pemerintah yang lebih rendah. Realisasi belanja modal pemerintah pada triwulan IV 2025 tercatat sebesar 2,27% (yoy), lebih rendah dibandingkan

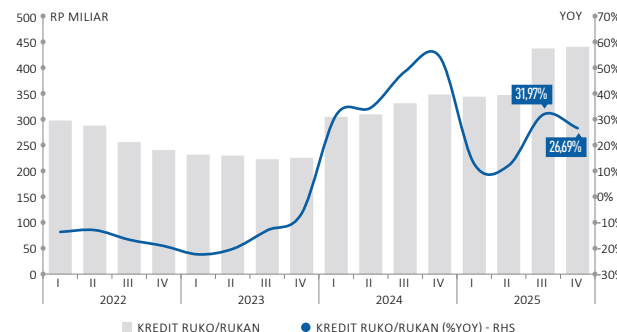
pertumbuhan triwulan sebelumnya yang tumbuh 2,73% (yoy) (Grafik 1.20). Perlambatan pertumbuhan LU Konstruksi disebabkan oleh lebih terbatasnya kegiatan konstruksi sektor pemerintah.



Sumber : DJPK (Diolah)

Grafik 1.20 Realisasi Belanja Modal APBD Seluruh Pemda di Kalimantan Selatan

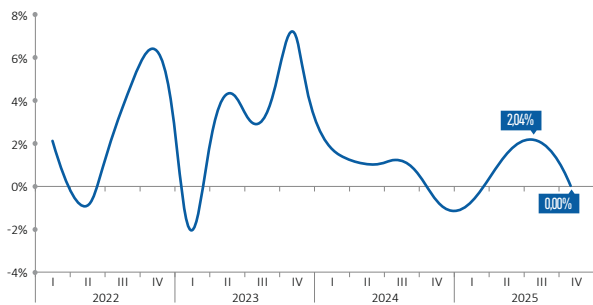
Lebih lanjut perlambatan pertumbuhan LU Konstruksi tercermin dari perlambatan penyaluran kredit Ruko/Rukan. Kegiatan konstruksi Ruko/Rukan pada triwulan IV 2025 tumbuh 26,69% (yoy), lebih rendah dari pertumbuhan penyaluran kredit triwulan III 2025 yang tumbuh sebesar 31,97% (yoy) (Grafik 1.21).



Sumber: Laporan Bank Umum (LBU) Bank Indonesia, diolah

Grafik 1.21 Perkembangan Kredit Ruko/Rukan di Kalimantan Selatan

Penurunan aktivitas LU Konstruksi juga tercermin dari penurunan optimisme pelaku usaha konstruksi di Kalimantan Selatan pada Survei Kegiatan Dunia Usaha (SKDU). Saldo Bersih Tertimbang (SBT) LU konstruksi pada triwulan IV 2025 yang sebesar 0,00%, lebih rendah dibandingkan triwulan sebelumnya yang berada pada level sebesar 2,04% (Grafik 1.22).

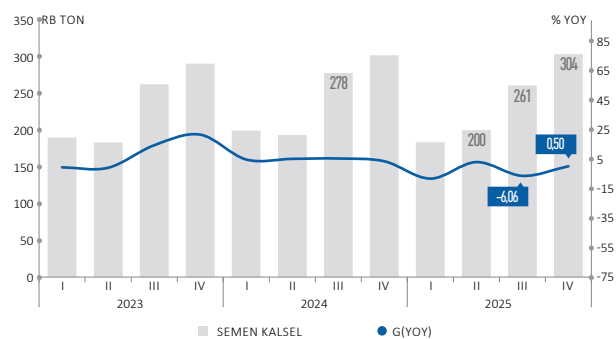


Sumber : Survei Kegiatan Dunia Usaha Bank Indonesia (Diolah)

Grafik 1.22 Hasil Survei Kegiatan Dunia Usaha di Kalimantan Selatan

Namun demikian, data pertumbuhan pengadaan semen di Kalimantan Selatan tercatat meningkat.

Volume pengadaan semen pada triwulan IV 2025 lebih tinggi dibandingkan triwulan III 2025, tumbuh 6,06% (yoy), lebih tinggi dibandingkan triwulan III 2025 (Grafik 1.24). Pertumbuhan pengadaan semen yang lebih tinggi di tengah perlambatan LU Konstruksi mengindikasikan[MT2.1] adanya proyek konstruksi jangka panjang yang baru berjalan pada triwulan IV 2025 atau terdapat proyek besar yang akan segera berjalan di triwulan berikutnya.



Sumber : Asosiasi Semen Indonesia (ASI), diolah

Grafik 1.23 Perkembangan Pengadaan Semen di Kalimantan Selatan

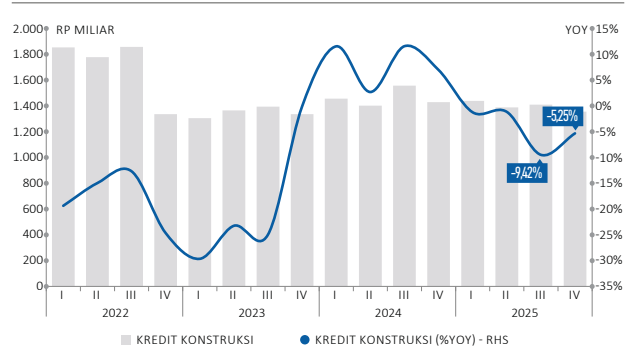
Tabel 1.2 Pertumbuhan PDRB Sisi Permintaan

SEKTOR	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2025			TW. IV-2025		
							TW. I	TW. II	TW. III	% (YOY)	PANGSA (%)	SOG
Konsumsi Rumah Tangga	-0,26	1,11	5,21	5,45	5,37	5,33	5,49	5,51	5,06	5,27	42,86%	2,41
Konsumsi LNPR	-2,40	1,10	5,02	6,54	13,61	5,18	2,98	6,68	4,88	6,13	1,03%	0,06
Konsumsi Pemerintah	-2,49	3,69	-0,64	3,72	4,76	3,42	1,19	-1,78	6,86	6,56	10,36%	0,74
Pembentukan Modal Tetap Bruto	-1,35	0,84	5,34	3,60	4,97	5,42	-0,78	5,48	6,28	7,95	21,89%	1,87
Perubahan Stok & Diskrepansi Statistik	-89,30	30,16	-908,12	768,74	-55,92	-127,54	-81,85	-286,01	-331,72	-350,17	0,07%	-0,39
Ekspor Barang dan Jasa	-11,17	18,58	13,29	55,47	4,95	-5,59	-14,98	-6,59	-2,97	1,78	62,46%	1,55
Impor Barang dan Jasa	-13,54	20,74	14,49	76,20	5,80	-8,56	-21,42	-10,09	-5,03	1,12	38,67%	0,77
PDRB	-1,82	3,48	5,11	5,15	5,05	5,05	4,81	5,39	5,20	5,46	100,00	5,46

Sumber: BPS Kalsel (diolah), % yoy menunjukkan pertumbuhan tahunan, SOG = source of growth

Hal tersebut sejalan dengan perkembangan kredit Konstruksi yang pada triwulan IV 2025 juga mengalami perbaikan kinerja. Pada triwulan laporan, pertumbuhan kredit konstruksi terkontraksi sebesar 5,25% (yoy), membaik dibandingkan triwulan III 2025 yang tumbuh -9,42% (yoy) (Grafik 1.24).

Pada triwulan I 2026, LU Konstruksi diperkirakan melambat, seiring dengan banyaknya hari libur d.r



Sumber: Laporan Bank Umum (LBU) Bank Indonesia, diolah

Grafik 1.24 Perkembangan Kredit Konstruksi Kalimantan Selatan

pelaksanaan HBKN. Kinerja LU Konstruksi pada triwulan I 2026 diperkirakan melambat seiring dengan banyaknya periode libur dalam rangka HBKN. Selain itu, prakiraan penurunan aktivitas LU Konstruksi utamanya di dorong oleh sektor pemerintah sesuai dengan pola realisasi belanja modal di daerah

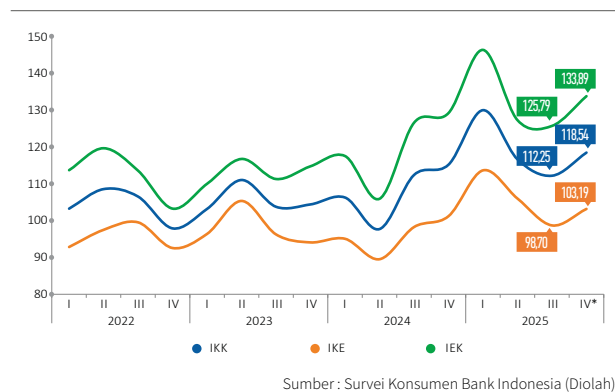
1.2 SISI PENGELUARAN

Dari sisi pengeluaran, pertumbuhan ekonomi Provinsi Kalimantan Selatan pada triwulan IV 2025 yang lebih tinggi, didorong oleh peningkatan Konsumsi RT, PMTB dan Ekspor. Peningkatan kinerja Konsumsi RT terutama didorong peningkatan mobilitas

dan kegiatan rekreasi masyarakat pada HBKN Nataru dan pelaksanaan peringatan Haul Guru Sekumpul di tengah adanya pemberian diskon untuk transportasi oleh pemerintah. Sementara itu, peningkatan kinerja PMTB didorong oleh investasi mesin untuk hilirisasi di KI/KEK serta penyelesaian proyek yang dibiayai APBN (a.l Cetak Sawah). Kinerja Ekspor pada triwulan IV 2025 tumbuh lebih tinggi dibandingkan triwulan III 2025 didorong oleh perbaikan kinerja ekspor komoditas batu bara, peningkatan ekspor olahan bijih besi dan komoditas yang tergabung dalam HS 16: daging, ikan, krustasea, dan moluska.

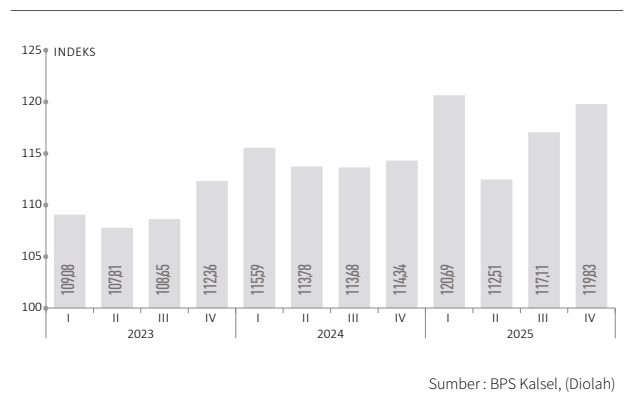
1.2.1 Konsumsi Rumah Tangga (RT)

Kinerja Konsumsi RT pada triwulan IV 2025 tumbuh 5,27% (yoy). Pertumbuhan Kinerja Konsumsi RT yang lebih tinggi dibandingkan triwulan III 2025 5,06% (yoy) ditopang oleh peningkatan mobilitas dan kegiatan rekreasi masyarakat pada pada HBKN Nataru dan pelaksanaan *festive event* 5 Rajab (Haul guru sekumpul) di tengah dukungan diskon transportasi. Peningkatan kinerja Konsumsi RT tercermin dari peningkatan indeks keyakinan konsumen (IKK) Provinsi Kalimantan Selatan yang tercatat berada pada level 122,38 pada triwulan IV 2025, lebih tinggi dibandingkan triwulan III 2025 yang berada pada level 112,25 (Grafik 1.25).



Grafik 1.25 Survei Konsumen Bank Indonesia

Peningkatan Konsumsi RT juga tercermin dari Nilai Tukar Petani (NTP) triwulan IV 2025 yang tercatat sebesar 119,83, lebih tinggi dibandingkan triwulan III 2025 yang tercatat sebesar 117,30. Peningkatan indeks penerimaan masyarakat yang bekerja di sektor pertanian (pekerjaan utama masyarakat Kalimantan Selatan) didorong oleh peningkatan NTP Tanaman Pangan yang meningkat dari 102,23 di triwulan III menjadi 109,97 di triwulan IV 2025 (Grafik 1.26).



Grafik 1.26 Nilai Tukar Petani Provinsi Kalimantan Selatan

Pada triwulan I 2026, konsumsi RT diperkirakan meningkat. Peningkatan kinerja Konsumsi RT diperkirakan didorong oleh akselerasi belanja masyarakat seiring pelaksanaan HBKN Imlek dan RAFI. Selain itu, implementasi program ekonomi kerakyatan (a.l MBG dan KDKMP), dan pemberian stimulus fiskal diperkirakan lebih masif dibandingkan triwulan IV 2025.

1.2.2 Konsumsi Pemerintah

Pada triwulan IV 2025, realisasi kinerja Konsumsi Pemerintah tercatat tumbuh 6.56% (yoy), melambat dibandingkan triwulan III 2025 yang tumbuh 6.86% (yoy). Perlambatan kinerja Konsumsi Pemerintah sejalan dengan realisasi belanja APBN yang mengalami penurunan pertumbuhan realisasi yang berkontraksi -2,20% (yoy) atau turun sebesar Rp906 miliar. Di sisi lain, realisasi belanja APBD mengalami pertumbuhan realisasi didorong peningkatan realisasi belanja operasional.

Belanja APBN di Kalimantan Selatan berkontraksi sebesar 2,20% (yoy). Realisasi belanja APBN di Kalimantan Selatan mengalami penurunan baik dari sisi Belanja Pemerintah Pusat maupun Transfer Ke Daerah dan Dana Desa (TKDD). Secara kumulatif, belanja APBN di Kalimantan Selatan hingga Desember 2025 mencapai Rp40,34 triliun atau sebesar 96,41%, dari pagu anggaran (Tabel 1.3). Penurunan pertumbuhan realisasi belanja pemerintah pusat di daerah seiring dengan penurunan pertumbuhan realisasi belanja barang yang berkontraksi 17,19% (yoy). Pada sisi TKDD, kontraksi didorong oleh berkontraksinya Dana Alokasi Khusus Fisik (DAK Fisik) dan Dana Bagi Hasil (DBH), masing-masing sebesar -60,86% (yoy) dan -4,43% (yoy).

Tabel 1.3 Perkembangan Realisasi Belanja APBN di Kalimantan Selatan

KOMPONEN	PAGU		REALISASI				GROWTH (% YOY)
	2024	2025	S.D. 30 DESEMBER 2024		S.D. 30 DESEMBER 2025		
			NOMINAL	PERSENTASE	NOMINAL	PERSENTASE	
Belanja Negara	41.671,93	41.848,70	41.253,67	99,00%	40.347,63	96,41%	-2,20
I. Belanja Pemerintah Pusat	10.044,14	11.277,69	9.770,50	97,28%	10.211,56	90,55%	4,51
II. Transfer Ke Daerah dan Dana Desa	31.627,79	30.571,01	31.483,17	99,54%	30.136,07	98,58%	-4,28
Dana Bagi Hasil	17.852,61	17.276,49	17.852,60	100,00%	17.061,18	98,75%	-4,43
Dana Alokasi Umum	8.525,78	8.578,32	8.477,78	99,44%	8.537,94	99,53%	0,71
Dana Alokasi Khusus Fisik	1.065,95	421,31	1.030,76	96,70%	403,40	95,75%	-60,86
Dana Alokasi Khusus Nonfisik	2.354,44	2.626,41	2.299,35	97,66%	2.576,43	98,10%	12,05
Hibah	314,61	182,28	308,88	98,18%	182,28	0,00%	-40,99
Dana Desa	1.514,40	1.486,20	1.513,81	99,96%	1.374,84	92,51%	-9,18

Sumber: Kanwil DJPb Prov. Kalsel

Kinerja belanja APBD tumbuh 5,12% (yoy), utamanya pada komponen belanja operasional. Pertumbuhan belanja APBD tersebut seiring dengan meningkatnya realisasi belanja APBD pada pos anggaran belanja operasional yang meningkat sebesar 30,13% (yoy) (Tabel 1.4).

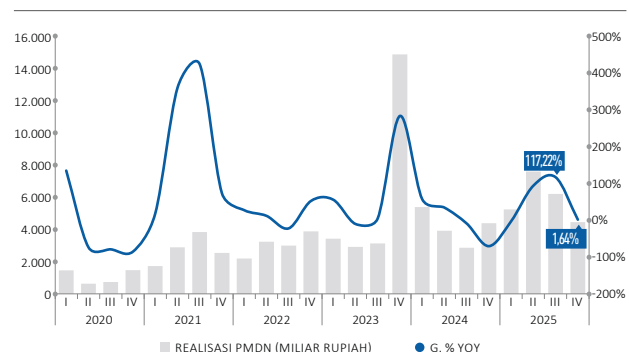
Konsumsi Pemerintah pada triwulan I 2026 diperkirakan tumbuh lebih tinggi dibandingkan triwulan IV 2025. Belanja APBN diperkirakan meningkat sesuai pola historisnya, selain berasal dari realisasi belanja rutin, belanja APBN juga berpotensi meningkat didorong oleh realisasi anggaran kegiatan pemerintah pusat di daerah seperti program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan juga Cetak Sawah Rakyat (CSR) dan Oplah (Optimasi lahan).

1.2.3 Investasi (Pembentukan Modal Tetap Bruto/ PMTB)

Investasi meningkat ditopang pertumbuhan PMA.

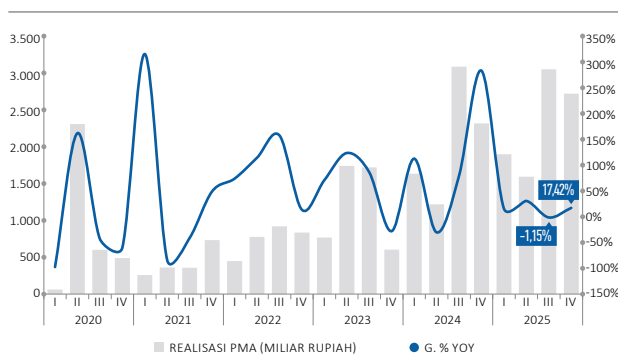
Kinerja investasi pada triwulan IV 2025 tercatat meningkat

sebesar 7,95% (yoy), lebih tinggi dibandingkan realisasi triwulan III 2025 yang tumbuh sebesar 7,58% (yoy). Peningkatan kinerja investasi yang lebih tinggi sejalan dengan realisasi Penanaman Modal Asing (PMA) yang meningkat tinggi, sebesar 17,42% (yoy) pada triwulan IV 2025 (Grafik 1.28). Di sisi lain, peningkatan kinerja investasi yang lebih tinggi, tertahan oleh perlambatan kinerja Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) yang tumbuh hanya 1,64% (yoy), lebih rendah dibandingkan triwulan III 2025 yang tumbuh hingga 117,22% (yoy).

**Grafik 1.27** Realisasi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN)**Tabel 1.4** Perkembangan Realisasi Belanja APBD di Kalimantan Selatan

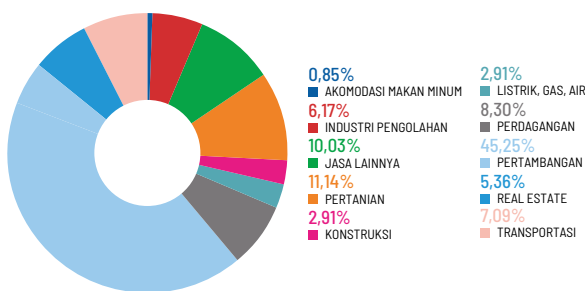
URAIAN POS APBD	PAGU APBD			REALISASI S.D. TRIWULAN IV		REALIASASI S.D. TRIWULAN IV	
	2024	2025	PERTUMBUHAN (%)	2024	2025	2024	2025
Pendapatan Daerah	44.973,00	43.788,70	-2,63	47.644,50	47.231,82	105,94%	107,86%
Pendapatan Asli Daerah	7.770,14	8.595,65	10,62	8.666,08	9.578,29	111,53%	111,43%
Pendapatan Transfer	36.050,00	33.967,38	-5,78	38.651,03	36.150,51	107,22%	106,43%
Lain-Lain Pendapatan yang Sah	1.152,86	1.225,67	6,32	327,39	1.503,02	28,40%	122,63%
Belanja Daerah	50.497,77	53.083,95	5,12	43.832,45	44.447,69	86,80%	83,73%
Belanja Operasional	29.488,40	32.874,44	11,48	25.838,09	26.988,60	87,62%	82,10%
Belanja Modal	13.967,67	13.490,54	-3,42	11.650,38	11.389,62	83,41%	84,43%
Belanja Tak Terduga	319,66	415,99	30,13	13,55	29,70	4,24%	7,14%
Dana Transfer Pemda	6.368,11	6.302,98	-1,02	6.330,44	6.039,77	99,41%	95,82%

Sumber: KFR Kanwil DJPb Provinsi Kalimantan Selatan, Kemenkeu



Grafik 1.28 Realisasi Penanaman Modal Asing (PMA)

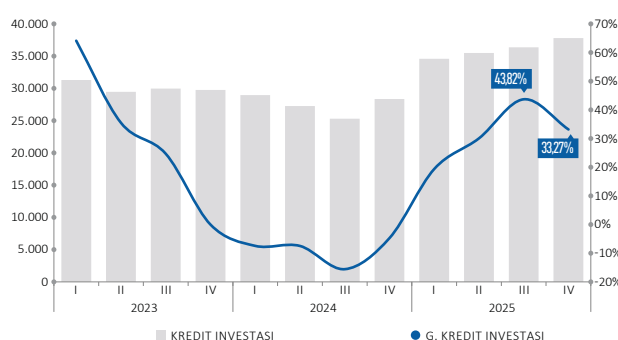
Secara umum, investasi baik PMA maupun PMDN masih didominasi oleh LU Pertambangan dan sub LU Tanaman Pangan, Perkebunan, dan Peternakan dengan pangsa masing-masing sebesar 45,25% dan 11,41% (Grafik 1.29).



Sumber: BKPM (Diolah)

Grafik 1.29 Pangsa Sektor PMA dan PMDN Tw-IV 2025 Kalimantan Selatan

Pertumbuhan investasi didukung oleh pembiayaan perbankan. Kredit investasi triwulan IV tumbuh tinggi sebesar 33,27% (yoy), meskipun lebih rendah dibandingkan triwulan III 2025 yang tumbuh sebesar 43,82% (yoy). Pertumbuhan tinggi kredit Investasi terutama didorong oleh masih tingginya kegiatan investasi di LU pertambangan yang mengindikasikan masih prospektifnya kinerja subsektor tersebut.



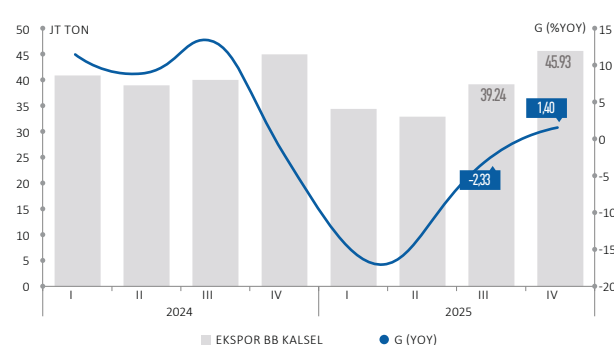
Sumber: LBU Bank Indonesia, diolah

Grafik 1.30 Realisasi Kredit Investasi Kalimantan Selatan

Kinerja investasi Kalimantan Selatan pada triwulan I 2026 diperkirakan tumbuh lebih tinggi dibandingkan dengan triwulan IV 2025. Prakiraan pertumbuhan yang lebih tinggi utamanya didorong oleh investasi mesin di kawasan Pertambangan dan KI/KE. Selain itu, akselerasi program ekonomi kerakyatan diperkirakan turut mendorong realisasi investasi di Kalimantan Selatan. Selain itu, Berlanjutnya investasi proyek *multiyears* Jembatan Pulau Laut senilai Rp 750 Miliar serta adanya tambahan anggaran dari Kementerian PU untuk pembangunan pondasi jembatan sebesar Rp 2,9 Triliun diperkirakan menopang aktivitas investasi bangunan yang relatif terbatas.

1.2.4 Ekspor

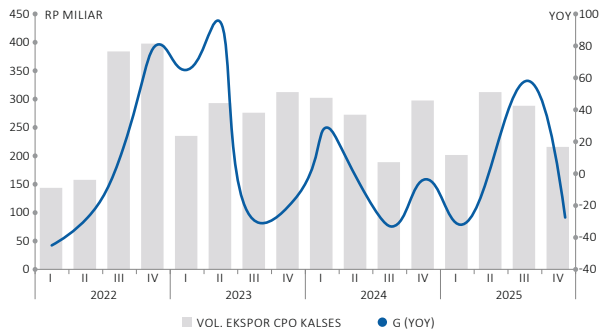
Pada triwulan IV 2025, kinerja ekspor Kalimantan Selatan tercatat tumbuh 1,78% (yoy), lebih tinggi dibandingkan dengan realisasi triwulan III 2025 yang berkontraksi sedalam 2,80% (yoy). Peningkatan kinerja ekspor terutama bersumber dari meningkatnya volume ekspor batu bara yang tercatat meningkat 1,40% (yoy), lebih tinggi dari triwulan III 2025 yang mengalami kontraksi 2,33% (yoy) (Grafik 1.31). Adapun beberapa negara tujuan ekspor batu bara di antaranya Tiongkok, India, Jepang dan ASEAN.



Sumber: Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (Diolah)

Grafik 1.31 Pertumbuhan Volume Ekspor CPO

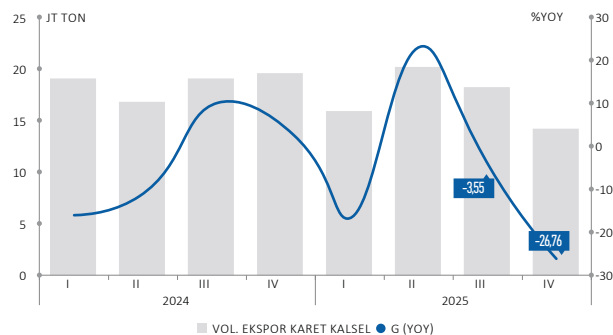
Di sisi lain, pertumbuhan kinerja ekspor Kalimantan Selatan yang lebih tinggi tertahan oleh menurunnya ekspor CPO dan karet alam/olahan. Perlambatan pertumbuhan Ekspor komoditas CPO disebabkan oleh terbatasnya kinerja produksi buah sawit, selain itu penurunan permintaan pasca *frontloading* pemenuhan *festive season* Diwali di India diperkirakan menjadi penahan kinerja ekspor komoditas CPO Kalimantan Selatan (Grafik 1.32).



Sumber : Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (Diolah)

Grafik 1.32 Pertumbuhan Volume Ekspor Batu Bara

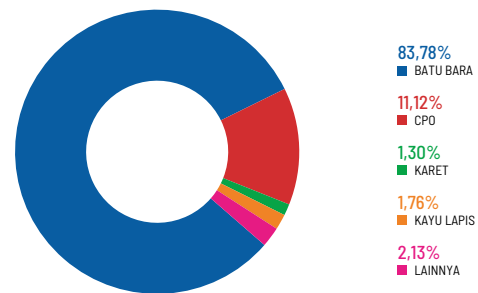
Lebih lanjut, ekspor karet dan olahannya juga mengalami kontraksi 26,76% (yoy), lebih dalam daripada kontraksi triwulan III 2025 yang mengalami kontraksi 3,55% (yoy) (Grafik 1.33). Perlambatan kinerja ekspor komoditas karet dan olahan karet terutama disebabkan oleh melambatnya hasil sadapan dan produksi karet, antara lain akibat harga karet dunia yang relatif menurun serta curah hujan yang tinggi. Lebih lanjut, permintaan global karet diperkirakan melandai akibat: i) meningkatnya penggunaan karet sintesis; ii) lemahnya pasar otomotif.



Sumber : Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (Diolah)

Grafik 1.33 Pertumbuhan Volume Ekspor Karet Alam & Olahan

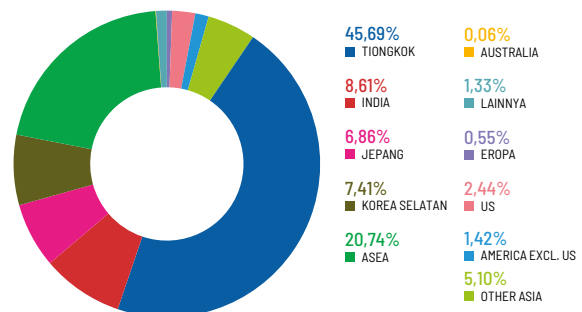
Komposisi nilai ekspor berdasarkan komoditas sampai dengan triwulan IV 2025 masih didominasi oleh komoditas batu bara. Dominasi batu bara dalam struktur ekspor Kalimantan Selatan tecermin dari pangsa yang signifikan, yaitu 83,37% dari total ekspor Kalimantan Selatan. Pangsa nilai ekspor batu bara Kalimantan Selatan mengalami peningkatan dari periode sebelumnya sebesar 81,32%, sejalan dengan perbaikan kinerja LU Pertambangan. Sementara itu, CPO menjadi komoditas ekspor terbesar kedua dengan pangsa sebesar 11,12%, diikuti kayu lapis sebesar 1,67% dan karet sebesar 1,30% (Grafik 1.34).



Sumber : Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (Diolah)

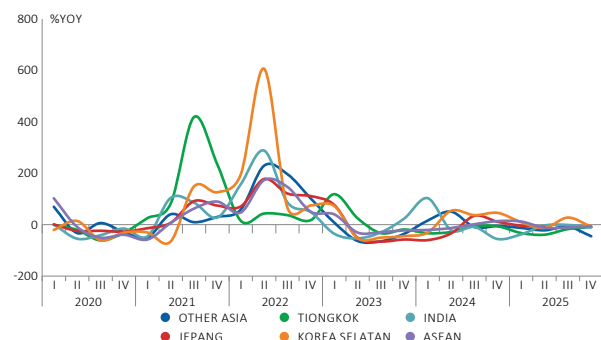
Grafik 1.34 Distribusi Nilai Ekspor Triwulan IV 2025 Berdasarkan Komoditas

Berdasarkan negara tujuan, pangsa ekspor Kalimantan Selatan pada triwulan IV 2025 ditujukan ke Tiongkok (45,69%), ASEAN (20,74%), India (8,61%), dan Jepang (6,86%) (Grafik 1.35). Secara umum, Pertumbuhan nilai ekspor negara mitra dagang utama tersebut tercatat meningkat dibandingkan triwulan sebelumnya, sejalan dengan perbaikan permintaan Tiongkok dan India di tengah meredanya ketidakpastian global dan tensi geopolitik serta masuknya periode *festive season* (Grafik 1.35).



Sumber : Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (Diolah)

Grafik 1.35 Distribusi Nilai Ekspor Triwulan IV 2025 Berdasarkan Negara Tujuan



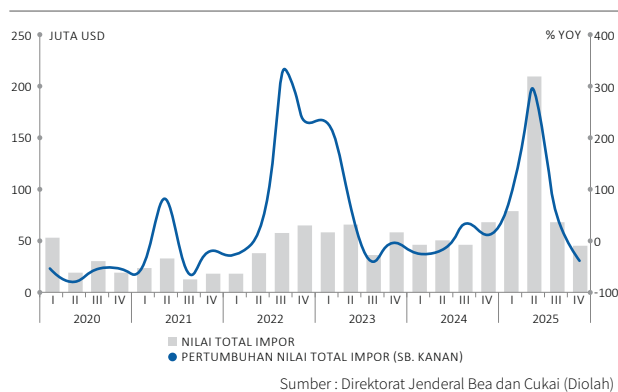
Sumber : Data Ekspor Impor Bank Indonesia (Diolah)

Grafik 1.36 Pertumbuhan Nilai Ekspor Berdasarkan Negara Tujuan

Kinerja ekspor Kalimantan Selatan pada triwulan I 2026 diperkirakan melambat dibandingkan periode laporan. Perlambatan aktivitas ekspor diperkirakan sejalan dengan keterlambatan penerbitan dan pemangkasan RKAB yang menahan aktivitas LU Pertambangan. Selain itu, Ketidakpastian penerbitan RKAB dan kebijakan pembatasan produksi 25% bagi perusahaan pemegang RKAB 3 tahunan sebelumnya diperkirakan berdampak pada lebih terbatasnya kinerja ekspor. Sementara itu, perlambatan kinerja ekspor juga dipengaruhi perlambatan ekspor CPO seiring dengan terbatasnya bahan baku di sisi hulu.

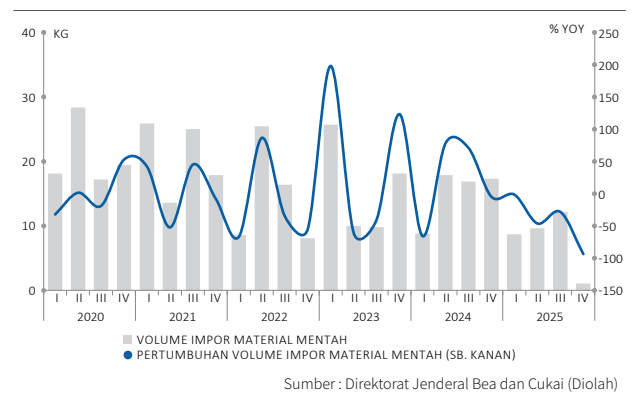
1.2.5 Impor

Impor Kalimantan Selatan pada triwulan IV 2025 tercatat tumbuh sebesar 1,12% (yoy), lebih tinggi dibandingkan triwulan sebelumnya yang berkontraksi sebesar 4,30% (yoy). Pertumbuhan impor didorong aktivitas impor barang dan jasa domestik. Di sisi lain, nilai impor LN pada triwulan IV 2025 mengalami kontraksi sebesar 33,70% (yoy), lebih rendah dibandingkan triwulan III 2025 yang tumbuh sebesar 47,79% (yoy) (Grafik 1.37).

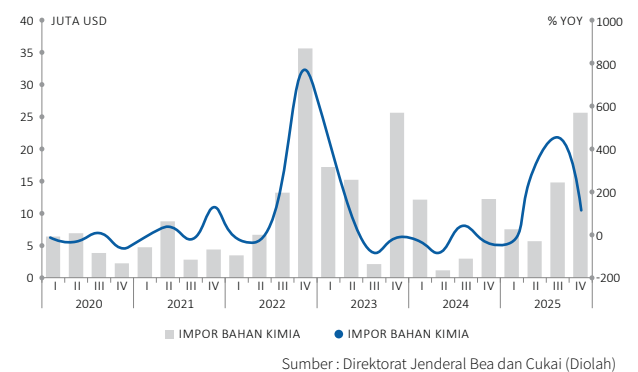


Grafik 1.37 Pertumbuhan Volume Impor Luar Negeri

Perlambatan nilai impor LN Kalimantan Selatan pada triwulan IV 2025 terutama disebabkan oleh penurunan impor Material mentah -32,36% (yoy), Barang Manufaktur -1,43% (yoy), mesin dan peralatan -67,84% (yoy) (Grafik 1.39). Di sisi lain, Impor Bahan Kimia terpantau mengalami peningkatan sebesar 109,22% (yoy) (Grafik 1.38).



Grafik 1.38 Perkembangan Volume Impor Material Mentah



Grafik 1.39 Perkembangan Nominal Impor Bahan Kimia

Pada triwulan I 2026, impor Kalimantan Selatan diperkirakan meningkat dibandingkan periode sebelumnya.

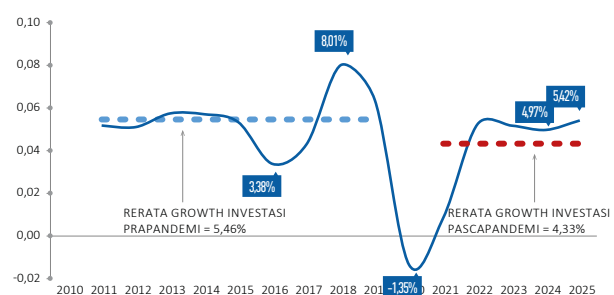
Peningkatan tersebut diperkirakan didorong oleh aktivitas investasi hilirisasi di industri besar dan KI/KEK. Selain itu, prakiraan menurunnya produksi TBS diperkirakan meningkatkan impor bahan baku CPO. Lebih lanjut, kinerja impor yang meningkat juga diperkirakan sejalan dengan beberapa proyek pembangunan yang sudah dan akan berjalan pada tahun 2026.

BOKS 1

Penguatan Produktivitas dalam Mencapai Transformasi Ekonomi Kalimantan Selatan Menuju 8,1%

Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan menargetkan pertumbuhan ekonomi sebesar 8,1% pada tahun 2029 yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025-2029. Pencapaian target tersebut memerlukan akselerasi investasi yang tidak hanya tumbuh secara nominal, tetapi juga semakin efisien dan produktif sehingga mampu mendorong pertumbuhan di atas tren jangka panjang. Berdasarkan simulasi *Solow Growth Model*, kebutuhan tambahan investasi pada periode 2026-2029 diperkirakan mencapai Rp250 triliun. Dengan demikian, diperlukan penguatan strategi untuk mendorong tambahan investasi swasta dalam skala signifikan, sekaligus memastikan kualitas efektivitas investasi tersebut dalam meningkatkan kapasitas produksi perekonomian.

Secara historis, kinerja investasi/Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) pascapandemi COVID-19 menunjukkan pemulihan yang belum sepenuhnya optimal. Rerata pertumbuhan PMTB pada periode pascapandemi COVID-19 tercatat lebih rendah dibandingkan periode prapandemi dan masih berada di bawah tren pertumbuhan jangka panjang. Meskipun nilai investasi, baik Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) maupun Penanaman Modal Asing (PMA), menunjukkan peningkatan secara nominal dan pertumbuhan, akselerasi tersebut belum sepenuhnya tercermin dalam penguatan pembentukan modal riil. Kondisi ini mengindikasikan bahwa peningkatan kuantitas investasi belum sepenuhnya diiringi oleh peningkatan kualitas dan produktivitasnya.

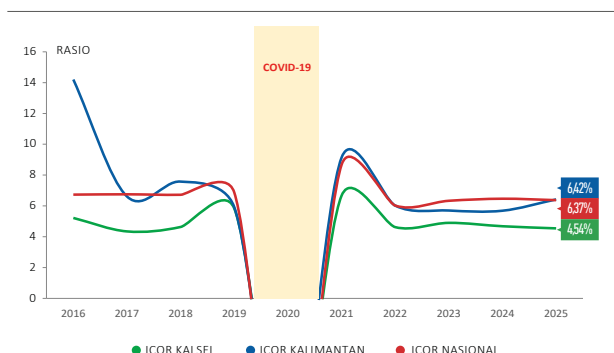


Grafik B1.1

Perkembangan Pertumbuhan Investasi (PMTB)

Peningkatan *Incremental Capital Output Ratio* (ICOR) pada periode pascapandemi mengindikasikan menurunnya efisiensi pembentukan modal, tercermin dari meningkatnya kebutuhan tambahan investasi untuk menghasilkan satu unit tambahan *output*. Perkembangan tersebut terjadi di tengah perlambatan rerata pertumbuhan investasi pascapandemi (4,33%), lebih rendah dibandingkan periode prapandemi (5,46%).

Secara spasial, kenaikan ICOR di wilayah Kalimantan (6,42) dan nasional (6,37) menunjukkan bahwa akselerasi investasi belum sepenuhnya diiringi oleh peningkatan produktivitas faktor produksi. Hal ini mengindikasikan bahwa kualitas investasi relatif belum optimal. Struktur investasi yang masih terkonsentrasi pada sektor berbasis komoditas dan ekstraktif dengan nilai tambah relatif rendah berpotensi membatasi penguatan kapasitas produksi jangka menengah, memperlambat proses diversifikasi ekonomi, serta meningkatkan sensitivitas perekonomian terhadap volatilitas harga komoditas global.



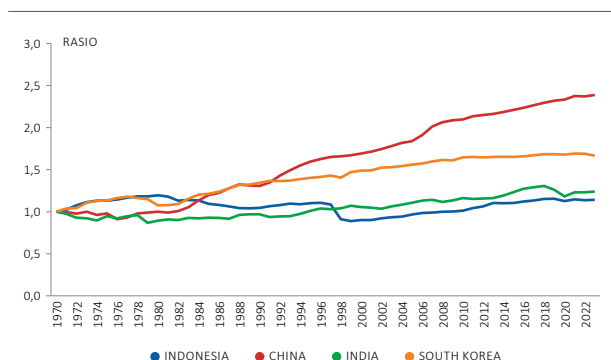
Grafik B1.2 Perkembangan ICOR Kalsel, Kalimantan, dan Nasional

Tambahan investasi swasta sebesar Rp250 triliun belum memadai untuk mencapai target pertumbuhan sebesar 8,1% pada tahun 2029 jika tidak disertai dengan peningkatan produktivitas.

Tanpa dukungan perbaikan efisiensi dan kualitas faktor produksi, tambahan investasi berpotensi hanya menghasilkan peningkatan *output* yang terbatas. Oleh karena itu, penguatan *Total Factor Productivity* (TFP) menjadi faktor penentu dalam memastikan bahwa investasi yang masuk tidak hanya menambah kapasitas modal, tetapi juga meningkatkan efisiensi, nilai tambah, dan kualitas pertumbuhan ekonomi secara berkelanjutan.

Secara empiris, negara yang mampu meningkatkan produktivitas secara konsisten cenderung mencatatkan pertumbuhan ekonomi dan peningkatan pendapatan per kapita yang lebih tinggi. Transformasi ekonomi di China dan Korea Selatan menunjukkan bahwa penguatan produktivitas yang berkelanjutan menjadi fondasi utama pertumbuhan yang cepat dan berdaya tahan. Sebaliknya, Indonesia dan India menunjukkan dinamika TFP yang relatif lebih moderat dan berfluktuasi. Perbedaan tersebut menegaskan bahwa keberlanjutan dan kualitas pertumbuhan sangat ditentukan oleh konsistensi dalam memperkuat TFP.

Penguatan TFP pada dasarnya mencerminkan peningkatan efisiensi dan kualitas kombinasi faktor produksi berupa modal, tenaga kerja, dan teknologi dalam menghasilkan *output*. Dalam konteks Kalimantan Selatan, perbaikan TFP menjadi krusial untuk memastikan bahwa tambahan investasi yang dibutuhkan tidak hanya memperbesar kapasitas produksi, tetapi juga



Sumber : Simulasi Bank Indonesia, Penn World Table

Grafik B1.3 Akumulasi Pertumbuhan TFP Antarnegara

meningkatkan produktivitas per kapita dan daya saing ekonomi daerah secara berkelanjutan. Sejalan dengan itu, terdapat sejumlah determinan kunci yang perlu diperkuat untuk mendorong peningkatan TFP secara sistematis dan terintegrasi, diantaranya:

1. Reformasi Tata Kelola, Kelembagaan dan Kebijakan Publik

Negara dengan tata kelola institusi dan kebijakan yang kuat cenderung memiliki tingkat kemajuan ekonomi yang lebih tinggi. Perbandingan indikator *government effectiveness* dan *regulatory quality* menunjukkan bahwa negara dengan kualitas tata kelola pada persentil tertinggi memiliki PDB per kapita yang tinggi. Hal ini menegaskan bahwa kepastian hukum, efektivitas regulasi, dan kualitas kebijakan berperan langsung dalam menciptakan iklim usaha yang kondusif serta meningkatkan produktivitas. Dalam konteks Kalimantan Selatan, penguatan tata kelola tersebut sejalan dengan agenda *debottlenecking* investasi melalui percepatan perizinan, penyelesaian isu lahan dan tata ruang, serta penguatan koordinasi lintas instansi guna memastikan proyek strategis berjalan lebih cepat dan efektif.

2. Produktivitas Sumber Daya Manusia

Kalimantan Selatan didukung oleh struktur demografi dengan proporsi usia produktif yang besar, sehingga memberikan potensi bonus demografi bagi pertumbuhan jangka menengah. Kualitas sumber daya manusia juga menunjukkan capaian yang solid, tercermin dari Indeks Pembangunan Manusia (IPM) 2025 sebesar 76,01, sedikit di atas rerata nasional (75,90), serta perbaikan kondisi ketenagakerjaan

Tabel B1.1 Perbandingan Kualitas Tata Kelola dan Indikator Ekonomi

	SWISS	SWEDIA	SINGAPURA	NORWEGIA	DENMARK	INDONESIA
PDB/kapita (ribu USD)	118,17	66,12	99,04	96,58	82,71	5,40
Gov. Effectiveness (percentile)	99,53	94,81	93,51	97,64	98,58	69,81
Regulatory Quality (percentile)	95,75	95,75	100	93,40	98,11	60,85

Sumber: worldbank, IMF (2025)

melalui peningkatan penyerapan tenaga kerja dan penurunan tingkat pengangguran. Selain itu, Indeks Masyarakat Digital 2025 sebesar 47,71 yang melampaui nasional (44,53) mencerminkan kesiapan adaptasi terhadap transformasi digital. Ke depan, berbagai capaian tersebut perlu diperkuat secara konsisten untuk mendorong peningkatan produktivitas per kapita dan memperkuat daya saing ekonomi daerah secara berkelanjutan, termasuk melalui penguatan pendidikan dan pelatihan berbasis STEM (*Science, Technology, Engineering, and Mathematics*) guna memastikan ketersediaan talenta teknis yang relevan dengan kebutuhan industri pengolahan, hilirisasi, dan transformasi ekonomi di Kalimantan Selatan.

3. Pembangunan Infrastruktur & Ekonomi Aglomerasi

Aglomerasi melalui KI/KEK Memperkuat Ekonomi Kalimantan Selatan

Perekonomian Kalimantan Selatan diperkirakan menguat sejalan dengan akselerasi investasi dan mulai beroperasinya kawasan industri berbasis hilirisasi Sumber Daya Alam (SDA). Hasil simulasi menunjukkan bahwa tambahan investasi pada kawasan tersebut berpotensi mendorong pertumbuhan PDRB melampaui skenario baseline (*business as usual*/BAU) dalam periode 2026–2029. Peningkatan tersebut terutama ditopang oleh proses hilirisasi nikel yang menghasilkan nilai tambah lebih tinggi, melalui transformasi dari bijih nikel menjadi *Mixed Hydroxide Precipitate* (MHP) hingga *battery precursor*. Proses pendalaman struktur industri ini tidak hanya meningkatkan output sektoral, namun juga memperkuat kontribusi industri pengolahan terhadap struktur PDRB secara berkelanjutan.

Di sisi lain, pengembangan industri logam dasar pada kawasan industri terpadu di Kalimantan Selatan diperkirakan memberikan tambahan pertumbuhan PDRB sebesar 0,11–0,70% pada

tahun 2026. Tambahan pertumbuhan tersebut bersumber dari aktivitas hilirisasi bijih besi menjadi produk dengan nilai tambah lebih tinggi, mulai dari konsentrat bijih besi, *sponge iron*, *pig iron*, hingga *pig iron alloy*. Estimasi dampak dilakukan dengan mempertimbangkan asumsi tingkat realisasi produksi sebesar 25–75%, harga komoditas acuan tahun 2016, serta konversi berbasis tabel *input-output* regional untuk menangkap keterkaitan antarsektor. Hal ini mengindikasikan bahwa penguatan hilirisasi industri logam dasar berpotensi meningkatkan kapasitas produksi domestik, memperdalam struktur industri, serta memperkuat ketahanan pertumbuhan ekonomi Kalimantan Selatan dalam jangka menengah.

Pengembangan Infrastruktur Program Cetak Sawah dan OPLA Memperkuat Produktivitas Pertanian

Secara nasional, program Cetak Sawah dan Optimalisasi Lahan (OPLAH) 2026 ditargetkan mencapai sekitar 480 ribu hektare dengan dukungan anggaran Rp10 triliun. Efektivitas pelaksanaan perlu diperkuat melalui konsistensi RTRWP dan LP2B serta sinkronisasi pembangunan jaringan irigasi untuk menjamin keberlanjutan produktivitas pertanian.

Berdasarkan uraian tersebut, pencapaian target pertumbuhan ekonomi Kalimantan Selatan sebesar 8,1% pada 2029 mensyaratkan kombinasi antara tambahan investasi swasta sebesar Rp250 triliun

Tabel B1.2 Realisasi Program Cetak Sawah

PROVINSI	CETAK SAWAH 2025 (HA)				
	TARGET	HASIL SID	KONSTRUKSI	OLAHAH LAHAN	REALISASI TANAM
Kalbar	2.338	2.332	379	55	19
Kalteng	39.857	71.041	24.977	14.246	2.419
Kalsel	30	22.696	8.579	2.908	0
Kaltim	1.89	1.052	0	0	0
Kaltara	1.015	2,8	98	98	98
Kalimantan	7,51	99.921	34.033	17.302	2.536

Sumber: Dinas Pertanian se-Kalimantan (realisasi per Desember'25), diolah

Tabel B1.3 Realisasi Program Optimalisasi Lahan (OPLAH)

PROVINSI	OPTIMASI LAHAN 2025 (HA)			
	TARGET	HASIL SID	HASIL KONSTRUKSI/ REALISASI FISIK	HASIL OLAHAN
Kalbar	27.013	26.297	17.816	9.441
Kalteng	6.482	7.572	6.882	421
Kalsel	20.984	30.566	13.602	14,69
Kaltim	10.427	13.973	13.531	0
Kaltara	5,43	10.221	7.715	2.642
Kalimantan	70.336	88.629	59.546	27.194

Sumber: Dinas Pertanian se-Kalimantan (realisasi per Desember'25), diolah

dan penguatan determinan TFP secara menyeluruh. Transformasi struktur investasi menuju sektor bernilai tambah tinggi, penguatan tata kelola dan kelembagaan, peningkatan kualitas sumber daya manusia, adopsi teknologi, serta pengembangan aglomerasi industri dan infrastruktur produktif menjadi fondasi utama untuk mendorong pertumbuhan yang lebih tinggi, inklusif, dan berkelanjutan.

BOKS 2

Dampak Program Makan Bergizi Gratis di Kalimantan Selatan

Di Balik Dapur MBG: Energi Baru bagi Ekonomi Banua

Dalam RPJMN 2025–2029, pemerintah menetapkan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) sebagai salah satu langkah nyata untuk menekan kemiskinan, meningkatkan kualitas sumber daya manusia, dan menjaga pertumbuhan ekonomi tetap kuat. Program ini berada di bawah koordinasi Badan Gizi Nasional (BGN) yang bekerja sama dengan berbagai institusi kontributor, untuk memastikan makanan yang diberikan memenuhi standar gizi dan tersalurkan dengan baik melalui jaringan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). MBG bukanlah

program yang hanya membagikan makanan secara gratis, namun merupakan investasi jangka panjang untuk kesehatan dan masa depan generasi Indonesia.

Secara nasional, target awal MBG pada bulan Mei 2025 ditargetkan 5,6 juta penerima. Namun realisasinya

sudah jauh melampaui angka tersebut. Hingga 21 Februari 2026, program ini telah menyerap anggaran Rp36,6 triliun dan menjangkau 60,24 juta penerima melalui 23.678 SPPG. Bahkan, sejak awal pelaksanaan hingga 6 Januari 2026, hampir 790 ribu tenaga kerja sudah terlibat. Artinya, selain bertujuan memperbaiki gizi masyarakat, MBG juga berperan menggerakkan dapur-dapur ekonomi—mulai dari petani, pemasok bahan pangan, hingga pekerja di lapangan.

Lebih lanjut, realisasi MBG di Bumi Lambung Mangkurat bergerak cukup progresif. Provinsi

Kalimantan Selatan mendapat target pendirian 355 SPPG dan berpotensi naik menjadi 370 SPPG dengan sasaran hampir 881 ribu penerima manfaat. Hingga akhir 2025, sudah terdapat 200 SPPG aktif yang melayani lebih dari 569 ribu orang (**Tabel B2.2**).

Ini yang membuat MBG menjadi semakin relevan untuk kita cermati lebih dalam: program ini bukan hanya

Tabel B2.1 Institusi Kontributor Program MBG

NO	INSTITUSI KONTRIBUTOR
1	Kementerian Kesehatan
2	Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah
3	Kementerian Agama
4	Kementerian Pertanian
5	Badan Pangan Nasional
6	Kementerian Kelautan dan Perikanan
7	Kementerian Koperasi
8	Kementerian Usaha Kecil dan Menengah
9	Badan Pengawas Obat dan Makanan
10	Kementerian Pekerjaan Umum
11	Kementerian Lingkungan Hidup
12	Kementerian Desa PDT
13	Pemerintah Daerah

Sumber: Badan Perencanaan Pembangunan Nasional

Tabel B2.2 Perkembangan Program MBG di Kalimantan Selatan

WILAYAH	PENERIMA MANFAAT (ORANG)			SPPG (UNIT)		
	TARGET	REALISASI	%	TARGET	REALISASI	%
Kalimantan	5.304.750	1.209.848	22,81	2.014	689	34,21
Kalbar	1.658.630	422.584	25,48	607	294	48,43
Kalteng	1.278.195	148.286	11,60	488	60	12,30
Kalsel	880.985	400.000	45,40	355	200	56,34
Kaltim	1.251.082	175.859	14,06	450	106	23,56
Kaltara	235.858	63.119	26,76	114	29	25,44

Sumber: Focus Group Discussion dengan Himnunan Mitra Dapur MBG se-Kalimantan |
*) Realisasi hingga tahun 2025

tentang makanan yang tersaji di atas piring, tetapi juga tentang bagaimana aktivitas ekonomi ikut bergerak di belakangnya—dari belanja bahan baku di pasar, pembangunan dapur, hingga penyerapan tenaga kerja dan peningkatan daya beli masyarakat. Di Banua, satu dapur SPPG mampu melayani sekitar 3.500–4.000 porsi per hari, sehingga kebutuhan bahan pokok yang harus disiapkan tentu sangat besar.

Berdasarkan proyeksi kebutuhan bahan pokok tahun 2026, skala kebutuhan MBG menunjukkan angka yang tidak kecil. Dalam setahun, diperkirakan diperlukan sekitar **2.829 ton beras, 4.789 ton daging ayam, dan 4.476 ton telur ayam.** Untuk sumber protein dan pelengkap lainnya, kebutuhan mencapai **1.140 ton tempe, 3.272 ton tahu, serta sekitar 812 ton minyak goreng.** Sementara itu, komoditas pendukung seperti **712 ton LPG, 506 ton ikan, 96 ton bawang merah, dan 82 ton gula pasir** juga menjadi bagian dari rantai kebutuhan program ini **(Tabel B2.3).**

Tabel B2.3 Kebutuhan Pokok Kalimantan Selatan

KEBUTUHAN KOMODITAS (SATUAN TON ATAU KL)	BULANAN*	TAHUNAN**
Beras	235,78	2.829,36
Daging Ayam	399,03	4.788,36
Telur Ayam	373,01	4.476,12
Ikan	42,38	508,56
Bawang Merah	7,94	95,28
Tempe	94,96	1.139,52
Tahu	272,69	3.272,28
Minyak Goreng	69,26	831,12
Gula Pasir	6,81	81,72
LPG	59,39	712,68

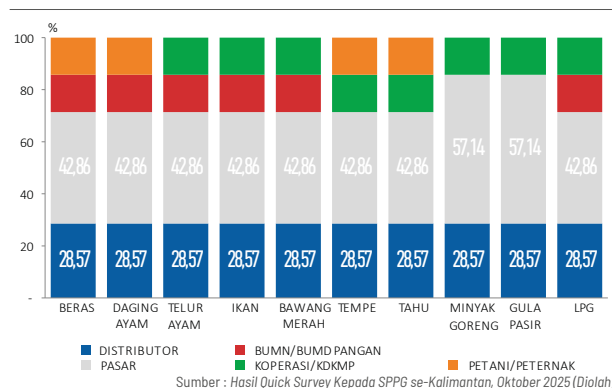
Sumber: Hasil Quick Survey Kepada SPPG se-Kalimantan, Oktober 2025 (Diolah)

*) Penerima KPM sesuai Target KPM sebesar 880,9rb

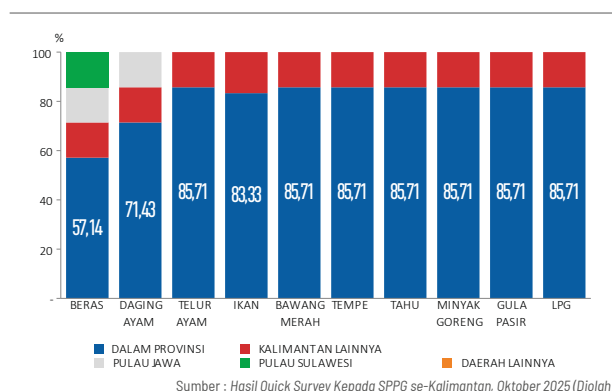
**) Merupakan Kebutuhan Bulanan Selama 12 Bulan

Dari perspektif rantai pasok, mayoritas bahan baku SPPG diperoleh melalui pasar dengan porsi sekitar 42–57%, sementara kurang lebih 28% dipasok langsung oleh distributor (Grafik B2.1). Untuk sebagian besar komoditas—seperti telur ayam, bawang merah, tempe, tahu, minyak goreng, gula, dan LPG—sekitar 85% bersumber dari dalam Kalimantan Selatan. Namun, untuk komoditas strategis seperti beras dan

daging ayam, kontribusi pasokan dari luar daerah masih relatif lebih besar **(Grafik B2.2).** Bahkan untuk susu dan buah-buahan, sebagian masih bergantung pada impor.



Grafik B2.1 Pangsa Mitra Supplier Bahan Baku SPPG



Grafik B2.2 Pangsa Asal Daerah Bahan Baku SPPG

Sementara itu, variasi menu MBG yang saat ini masih didominasi oleh daging ayam dan telur ayam, sehingga berpotensi meningkatkan permintaan secara bersamaan pada dua komoditas tersebut. Dengan kebutuhan yang dapat mencapai ribuan ton dalam satu triwulan, peningkatan permintaan perlu diimbangi dengan ketersediaan pasokan yang memadai agar dinamika harga tetap terjaga. Oleh karena itu, diperlukan langkah antisipatif untuk memastikan pelaksanaan program tetap berjalan selaras dengan stabilitas pasokan dan harga bahan pokok di Kalimantan Selatan.

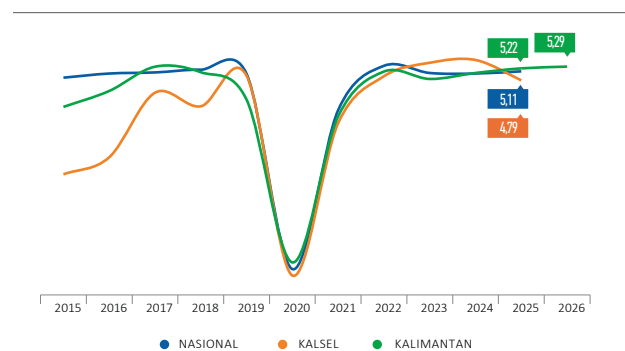
Oleh sebab itu, agar manfaat ekonominya tetap terasa tanpa menimbulkan gejolak harga pangan, dibutuhkan pengelolaan yang responsif dan terukur. Peningkatan produktivitas pada pertanian dan peternakan menjadi

krusial untuk menjaga stabilitas harga pangan. Selain itu, Penguatan Kerja Sama Antar Daerah (KAD) penting untuk menjaga kelancaran distribusi komoditas utama, sehingga ketika satu daerah mengalami keterbatasan pasokan, daerah lain dapat menjadi penyangga.

Di samping itu, pemanfaatan *dashboard monitoring* yang terintegrasi akan membantu memantau kebutuhan dan ketersediaan bahan pokok secara *real-time*, sehingga potensi tekanan inflasi bisa diantisipasi lebih awal. Bahkan, penjadwalan menu MBG dapat diselaraskan dengan kalender panen raya antar daerah, sehingga saat produksi melimpah, serapan program meningkat tanpa memicu kenaikan harga. Dengan strategi yang tepat, MBG di Banua bukan hanya menjadi pendorong aktivitas ekonomi daerah, tetapi juga berperan dalam menjaga harga tetap stabil dan menjaga daya beli masyarakat.

Jika kita mencermati kinerja pertumbuhan ekonomi Kalimantan Selatan, terlihat bahwa dinamika ekonomi daerah menunjukkan tren yang cukup solid.

Pertumbuhan ekonomi Kalimantan Selatan pada 2025 tumbuh 5,22% (yoy), lebih tinggi dari tahun sebelumnya dan juga di atas rata-rata Kalimantan maupun nasional. Jika ke depan terealisasi pembangunan 157 dapur SPPG baru dengan nilai rata-rata sekitar Rp1,6 miliar per unit, serta adanya tambahan lebih dari 311.455 penerima manfaat, maka secara ceteris paribus pertumbuhan ekonomi Kalsel diperkirakan dapat meningkat sekitar 0,07% (yoy) dari *baseline*¹ (**Gambar B2.3**).



Sumber : Badan Pusat Statistik

Grafik B2.3

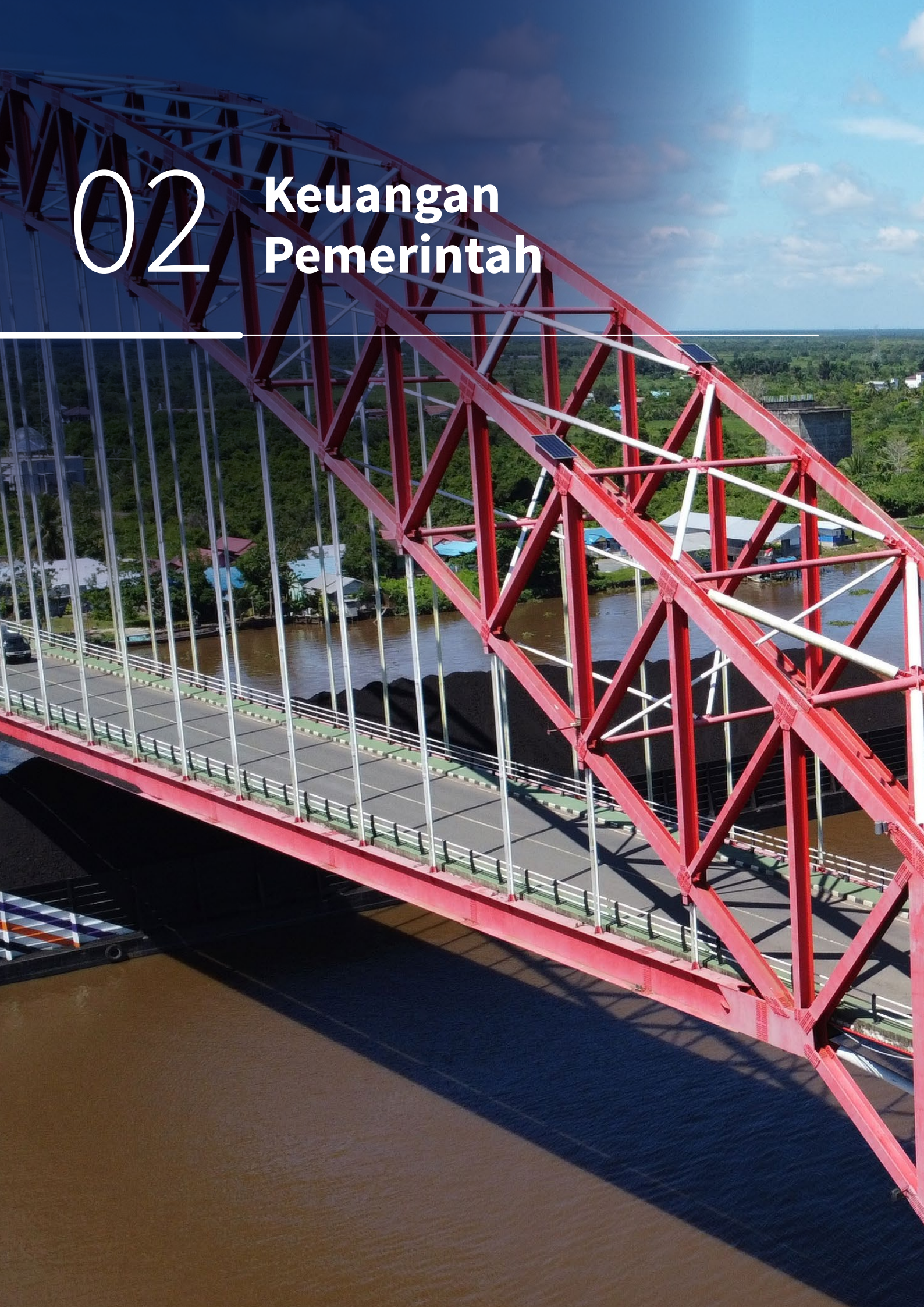
Pertumbuhan Ekonomi Nasional, Kalimantan, Kalimantan Selatan

¹ Menggunakan perhitungan model Input-Output (IO) Tahun 2016 dengan asumsi jumlah pembangunan Dapur SPPG sebanyak 157 unit dengan tambahan penerima manfaat sebanyak 311.455 penerima manfaat pada tahun 2026 dapat berdampak pada sektor konstruksi, perdagangan, serta penyediaan akomodasi dan makan minum



02

Keuangan Pemerintah





Secara agregat, realisasi pendapatan daerah Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota di Kalimantan Selatan hingga triwulan IV 2025 lebih rendah dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya. Penurunan realisasi pendapatan bersumber dari penurunan komponen Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat ke Daerah yang berkontraksi sebesar 6,47% (yoy) pada tingkat provinsi maupun kabupaten/kota, serta penurunan pada komponen lain-lain pendapatan asli daerah yang sah di tingkat provinsi.

Dari sisi belanja, realisasi Belanja Daerah Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota hingga triwulan IV 2025 tercatat lebih tinggi dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Peningkatan tersebut utamanya didorong oleh komponen Belanja Pegawai yang mengalami peningkatan dari Rp10,78 triliun pada 2024 menjadi Rp11,72 triliun pada 2025 (8,73%, yoy).

Kinerja fiskal Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota di Kalimantan Selatan hingga triwulan IV 2025 menunjukkan arah yang meningkat di sisi belanja, namun menurun dari sisi pendapatannya. Hal ini menunjukkan masih terbukanya ruang khususnya untuk penguatan perencanaan penerimaan pendapatan dan juga optimalisasi penyerapan belanja untuk meningkatkan efek multiplier kebijakan fiskal daerah. Pada aspek kontribusi terhadap pertumbuhan, kontribusi fiskal mengalami perlambatan pada triwulan IV 2025 sebesar 5,64% (yoy), lebih rendah dibandingkan triwulan sebelumnya yang sebesar 6,68% (yoy). Ke depan akselerasi belanja daerah menjadi kunci perekonomian Kalimantan Selatan tumbuh tinggi dan berkualitas.



2.1 REALISASI PENDAPATAN DAERAH

Secara agregat, realisasi pendapatan daerah di Kalimantan Selatan hingga triwulan IV 2025 lebih rendah dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya. Total realisasi pendapatan daerah Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota di Kalimantan Selatan tercatat sebesar Rp47,23 triliun atau 107,86% dari pagu, lebih rendah dibandingkan realisasi triwulan IV 2024 yang tercatat sebesar Rp47,64 triliun atau 105,94% dari pagu. Penurunan realisasi pendapatan bersumber dari penurunan komponen Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat ke Daerah yang berkontraksi sebesar 6,47% (yoy) pada tingkat provinsi maupun kabupaten/kota, serta penurunan pada komponen Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah di tingkat provinsi. Namun, dari sisi realisasi persentase pagu masih mengalami peningkatan yang disebabkan oleh Pagu Pendapatan tahun 2025 yang turun sebesar Rp1,09 triliun dibandingkan dengan tahun 2024.

Secara struktur, pendapatan daerah masih didominasi oleh Pendapatan Transfer, diikuti oleh Pendapatan Asli Daerah (PAD), dan Lain-Lain Pendapatan yang Sah. Sementara itu, rasio Kemandirian Fiskal Agregat juga menunjukkan penguatan dari tahun sebelumnya, meningkat sejalan dengan naiknya kontribusi PAD terhadap total pendapatan daerah.

2.1.1 Realisasi Pendapatan Provinsi

Realisasi pendapatan Provinsi Kalimantan Selatan sampai dengan triwulan IV 2025 mengalami penurunan dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Hingga triwulan IV 2025, realisasi pendapatan tercatat sebesar Rp11,18 triliun atau 106,28% dari pagu, lebih rendah dibandingkan realisasi triwulan IV 2024 yang mencapai Rp12,40 triliun atau 106,85% dari pagu.

Penurunan tersebut dipengaruhi oleh penurunan pada seluruh komponen pendapatan daerah, yaitu Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer, serta Lain-Lain Pendapatan yang Sah. Realisasi PAD hingga triwulan IV 2025 mencapai Rp5,28

triliun atau 115,28% dari pagu APBD 2025, lebih rendah dibandingkan capaian tahun sebelumnya yang sebesar Rp5,33 triliun atau 111,12% dari pagu APBD 2024.

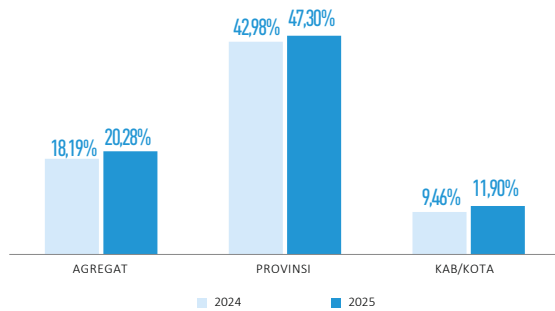
Pendapatan Transfer juga menunjukkan penurunan dari sisi nominal yang lebih rendah dibandingkan tahun sebelumnya. Sampai dengan triwulan IV 2025, realisasi Pendapatan Transfer mencapai Rp5,72 triliun atau 99,28% dari pagu, lebih rendah dibandingkan realisasi triwulan IV 2024 yang sebesar Rp6,86 triliun atau 103,48% dari pagu.

Selain itu, Lain-Lain Pendapatan yang Sah juga mencatatkan penurunan dibandingkan tahun sebelumnya. Realisasi triwulan IV 2025 tercatat sebesar Rp171,92 miliar atau 100,72% dari pagu, lebih rendah dibandingkan capaian triwulan IV 2024 yang sebesar Rp212,94 miliar atau 116,72% dari pagu.

Rasio Kemandirian Fiskal Provinsi Kalimantan Selatan menunjukkan peningkatan pada triwulan IV 2025. Sepanjang tahun 2025, Rasio Kemandirian Fiskal tercatat sebesar 47,30%, lebih tinggi dibandingkan periode yang sama tahun 2024 yang sebesar 42,98% (Grafik 2.1). Kenaikan ini terutama ditopang oleh peningkatan realisasi komponen Hasil Retribusi Daerah.

Pada level kabupaten/kota, kemandirian fiskal juga menunjukkan perbaikan. Hingga triwulan IV 2025, Rasio Kemandirian Fiskal kabupaten/kota tercatat sebesar 11,90%, lebih tinggi dibandingkan capaian pada periode yang sama tahun sebelumnya yang sebesar 9,46%. Meskipun masih berada pada level yang relatif rendah dibandingkan pemerintah provinsi. Peningkatan kemandirian fiskal ini mengindikasikan adanya penguatan kapasitas fiskal daerah, terutama kemampuan dalam optimalisasi Pendapatan Asli Daerah di masing-masing kabupaten/kota.

Secara agregat (provinsi dan kab/kota), tingkat kemandirian fiskal Kalimantan Selatan juga meningkat dari 18,19% pada 2024 menjadi 20,28% pada 2025, sejalan dengan perbaikan kinerja pendapatan daerah khususnya di tingkat kabupaten/kota.



Sumber: KFR Kanwil DJPb Provinsi Kalimantan Selatan

Grafik 2.1 Rasio Kemandirian Fiskal Daerah Triwulan IV 2025

2.1.2 Realisasi Pendapatan Kabupaten dan Kota

Realisasi total Pendapatan Daerah Kabupaten/Kota di Kalimantan Selatan hingga triwulan IV 2025 mencatatkan peningkatan dibandingkan periode yang sama pada tahun sebelumnya. Secara nominal, realisasi pendapatan mencapai Rp36,05 triliun, lebih tinggi dibandingkan triwulan IV 2024 yang sebesar Rp35,23 triliun. Dari sisi pencapaian terhadap pagu, realisasi tahun 2025 tercatat sebesar 108,36%, lebih tinggi dibandingkan realisasi triwulan IV 2024 yang mencapai 105,62% (Tabel 2.4).

Tabel 2.1 Realisasi Pendapatan dan Belanja APBD Agregat (Provinsi, Kabupaten, dan Kota) Kalimantan Selatan (Rp Miliar kecuali disebutkan lain)

URAIAN POS APBD	PAGU APBD		REALISASI S.D. TRIWULAN IV		% REALISASI S.D. TRIWULAN IV	
	2024	2025	2024	2025	2024	2025
Pendapatan Daerah	44.973,00	43.788,70	47.644,50	47.231,82	105,94%	107,86%
Pendapatan Asli Daerah	7.770,14	8.595,65	8.666,08	9.578,29	111,53%	111,43%
Pendapatan Transfer	36.050,00	33.967,38	38.651,03	36.150,51	107,22%	106,43%
Lain-Lain Pendapatan yang Sah	1.152,86	1.225,67	327,39	1.503,02	28,40%	122,63%
Belanja Daerah	50.143,84	53.083,95	43.832,45	44.447,69	87,41%	83,73%
Belanja Operasional	29.488,40	32.874,44	25.838,09	26.988,60	87,62%	82,10%
Belanja Modal	13.967,67	13.490,54	11.650,38	11.389,62	83,41%	84,43%
Belanja Tak Terduga	319,66	415,99	13,55	29,70	4,24%	7,14%
Dana Transfer Pemda	6.368,11	6.302,98	6.330,44	6.039,77	99,41%	95,82%

Sumber: KFR Kanwil DJPb Provinsi Kalimantan Selatan, Kemenkeu

Tabel 2.2 Realisasi Pendapatan APBD Agregat (Provinsi, Kabupaten, dan Kota) Kalimantan Selatan (Rp Miliar kecuali disebutkan lain)

URAIAN POS APBD	PAGU APBD		REALISASI S.D. TRIWULAN IV		% REALISASI S.D. TRIWULAN IV	
	2024	2025	2024	2025	2024	2025
Pendapatan Asli Daerah	7.770,14	8.595,65	8.666,08	9.578,29	111,53%	111,43%
Hasil Pajak Daerah	5.158,70	5.612,01	5.569,34	6.121,81	107,96%	109,08%
Hasil Retribusi Daerah	1.108,23	1.120,04	430,45	1.123,90	38,84%	100,34%
Hasil Pengelolaan Kekayaan yang Dipisahkan	246,00	323,63	215,08	273,71	87,43%	84,58%
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	1.257,21	1.539,96	2.451,20	2.058,86	194,97%	133,70%
Pendapatan Transfer	36.050,00	33.967,38	38.651,03	36.150,51	107,22%	106,43%
Transfer Pemerintah Pusat	33.921,39	31.905,05	36.171,02	33.743,24	106,63%	105,76%
Transfer Pemerintah Daerah	2.077,77	1.859,83	2.412,87	2.204,77	116,13%	118,55%
Transfer Bantuan Keuangan	50,84	202,50	67,15	202,50	132,09%	100,00%
Lain-lain Pendapatan yang Sah	1.152,86	1.225,67	327,39	1.503,02	28,40%	122,63%
Total Pendapatan Daerah	44.973,00	43.788,70	47.644,50	47.231,82	105,94%	107,86%

Sumber: KFR Kanwil DJPb Provinsi Kalimantan Selatan, Kemenkeu

Tabel 2.3 Realisasi Pendapatan APBD Agregat (Provinsi, Kabupaten, dan Kota) Kalimantan Selatan (Rp Miliar kecuali disebutkan lain)

URAIAN POS APBD	PAGU APBD		REALISASI S.D. TRIWULAN IV		% REALISASI S.D. TRIWULAN IV	
	2024	2025	2024	2025	2024	2025
Pendapatan Asli Daerah	4.799,50	4.588,17	5.333,26	5.289,07	111,12%	115,28%
Hasil Pajak Daerah	3.980,00	3.711,66	4.409,34	4.225,09	110,79%	113,83%
Hasil Retribusi Daerah	632,06	691,76	127,15	742,82	20,12%	107,38%
Hasil Pengelolaan Kekayaan yang Dipisahkan	62,29	67,66	63,18	72,36	101,44%	106,95%
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	125,16	117,09	733,58	248,81	586,13%	212,50%
Pendapatan Transfer	6.632,54	5.762,20	6.863,53	5.720,53	103,48%	99,28%
Transfer Pemerintah Pusat	6.349,94	5.562,20	6.586,36	5.520,53	103,72%	99,25%
Transfer Pemerintah Daerah	-	-	-	-	0,00%	0,00%
Transfer Bantuan Keuangan	282,59	200,00	277,17	200,00	98,08%	100,00%
Lain-lain Pendapatan yang Sah	182,44	170,69	212,94	171,92	116,72%	100,72%
Total Pendapatan Daerah	11.614,48	10.521,05	12.409,73	11.181,52	106,85%	106,28%

Sumber: KFR Kanwil DJPb Provinsi Kalimantan Selatan, Kemenkeu

Tabel 2.4 Realisasi Pendapatan APBD Kabupaten dan Kota di Kalimantan Selatan (Rp Miliar kecuali disebutkan lain)

URAIAN POS APBD	PAGU APBD		REALISASI S.D. TRIWULAN IV		% REALISASI S.D. TRIWULAN IV	
	2024	2025	2024	2025	2024	2025
Pendapatan Asli Daerah	2.970,64	4.007,48	3.332,82	4.289,22	112,19%	107,03%
Hasil Pajak Daerah	1.178,70	1.900,35	1.160,00	1.896,73	98,41%	99,81%
Hasil Retribusi Daerah	476,17	428,28	303,30	381,08	63,70%	88,98%
Hasil Pengelolaan Kekayaan yang Dipisahkan	183,72	255,98	151,90	201,36	82,68%	78,66%
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	1.132,05	1.422,88	1.717,62	1.810,05	151,73%	127,21%
Pendapatan Transfer	29.417,46	28.205,18	31.787,50	30.429,98	108,06%	107,89%
Transfer Pemerintah Pusat	27.571,44	26.342,85	29.584,66	28.222,71	107,30%	107,14%
Transfer Pemerintah Daerah	2.077,77	1.859,83	2.412,87	2.204,77	116,13%	118,55%
Transfer Bantuan Keuangan	(231,76)	2,50	(210,02)	2,50	90,62%	100,00%
Lain-lain Pendapatan yang Sah	970,42	1.054,99	114,45	1.331,10	11,79%	126,17%
Total Pendapatan Daerah	33.358,52	33.267,65	35.234,77	36.050,30	105,62%	108,36%

Sumber: KFR Kanwil DJPb Provinsi Kalimantan Selatan, Kemenkeu

Dari sisi komponennya, Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten/Kota sampai dengan triwulan IV 2025 mencapai Rp4,28 triliun, lebih tinggi dibandingkan realisasi tahun sebelumnya yang sebesar Rp3,33 triliun. Namun demikian, pencapaian terhadap pagu tercatat sebesar 107,03%, lebih rendah dibandingkan periode yang sama tahun 2024 yang mencapai 112,19%, seiring dengan meningkatnya target PAD pada tahun 2025.

Pendapatan Transfer hingga triwulan IV 2025 mengalami penurunan dibandingkan periode yang sama di tahun sebelumnya. Hingga triwulan IV 2025, Pendapatan Transfer terealisasi sebesar Rp30,42 triliun, lebih rendah dibandingkan realisasi triwulan IV 2024 sebesar Rp31,78 triliun. Dari sisi pencapaian terhadap pagu juga mengalami penurunan dari 108,06% pada

2024 menjadi 107,89% pada 2025, seiring penurunan komponen Transfer Pemerintah Pusat ke Daerah.

Sementara itu, Lain-Lain Pendapatan yang Sah mengalami kenaikan yang sangat signifikan.

Realisasi mencapai Rp1,33 triliun atau 126,17% dari pagu, meningkat dibandingkan triwulan IV 2024 yang sebesar Rp114,44 miliar atau 11,79% dari pagu. Lonjakan ini terutama berasal dari penerimaan insidental seperti pengembalian belanja atau pendapatan lainnya yang tidak bersifat rutin.

Secara keseluruhan, peningkatan pendapatan Kabupaten/Kota hingga triwulan IV 2025 menunjukkan adanya penguatan kapasitas fiskal daerah, meskipun tantangan optimalisasi PAD tetap perlu diperhatikan, khususnya pada komponen yang lebih fluktuatif seperti hasil retribusi daerah.

Secara spasial, persentase realisasi pendapatan tertinggi tercatat di Kab. Banjar yakni 121,39% dari pagu 2025 atau sebesar Rp3,11 triliun, sedangkan persentase realisasi pendapatan terendah terdapat di Kab. Kotabaru yakni 85,25% dari pagu 2025 atau sebesar Rp3,22 triliun (Tabel 2.5).

Tabel 2.5 Realisasi Pendapatan APBD Kabupaten/Kota di Kalimantan Selatan (Rp Miliar kecuali disebutkan lain)

NO	KOTA/KAB	PAGU 2025	REALISASI S.D. TW IV 2025	% REALISASI S.D. TW IV 2025
1	KAB. BANJAR	2.563,40	3.111,65	121,39%
2	KAB. TANAH LAUT	2.164,55	2.567,51	118,62%
3	KAB. HULU SUNGAI SELATAN	1.667,73	1.970,50	118,15%
4	KAB. TANAH BUMBU	3.326,67	3.889,55	116,92%
5	KAB. TABALONG	2.966,24	3.460,29	116,66%
6	KOTA BANJARBARU	1.480,03	1.716,66	115,99%
7	KAB. HULU SUNGAI UTARA	3.326,67	3.813,13	114,62%
8	KAB. BALANGAN	3.355,76	3.638,77	108,43%
9	KOTA BANJARMASIN	2.595,71	2.754,55	106,12%
10	KAB. TAPIN	2.222,99	2.271,01	102,16%
11	KAB. BARITO KUALA	1.762,65	1.764,03	100,08%
12	KAB. HULU SUNGAI TENGAH	2.057,09	1.871,91	91,00%
13	KAB. KOTABARU	3.778,15	3.220,73	85,25%

Sumber: KFR Kanwil DJPb Provinsi Kalimantan Selatan, Kemenkeu

2.2 REALISASI BELANJA DAERAH

Secara agregat, realisasi Belanja Daerah Pemerintah Provinsi serta Kabupaten/Kota di Kalimantan Selatan hingga triwulan IV 2025 lebih tinggi dibandingkan periode yang sama tahun 2024.

Realisasi belanja agregat tercatat sebesar Rp44,44 triliun atau 83,73% dari pagu tahun 2025, lebih tinggi dibandingkan triwulan IV 2024 yang mencapai Rp43,83 triliun atau 87,41% dari pagu (Tabel 2.6). Peningkatan tersebut utamanya didorong oleh komponen Belanja Pegawai yang mengalami peningkatan dari Rp10,78 triliun pada 2024 menjadi Rp11,72 triliun pada 2025 (8,73%, yoy).

2.2.1 Realisasi Belanja Provinsi

Realisasi belanja Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan sampai dengan triwulan IV 2025 lebih rendah dibandingkan periode yang sama tahun 2024. Total realisasi belanja daerah sepanjang tahun 2025 tercatat sebesar Rp11,09 triliun atau 82,76% dari pagu, lebih rendah dibandingkan tahun 2024 yang tercatat sebesar Rp11,13 triliun atau 83,63% terhadap pagu. Penurunan realisasi belanja provinsi bersumber dari penurunan kinerja pada komponen Belanja Operasional dan Transfer Pemda sedangkan komponen Belanja Modal mengalami peningkatan.

Realisasi Belanja Operasional hingga triwulan IV 2025 tercatat sebesar Rp5,63 triliun atau 76,58% dari pagu. Realisasi tersebut lebih rendah dibandingkan periode yang sama tahun 2024 yang mencapai Rp5,75 triliun atau 85,10% dari pagu. Penurunan realisasi tersebut bersumber dari penurunan komponen Belanja Barang dan Jasa yang mengalami penurunan dari Rp3,09 triliun atau 88,24% dari pagu pada tahun 2024, menjadi Rp3,09 triliun atau 88,47% dari pagu pada tahun 2025. Komponen Belanja Hibah juga mengalami penurunan

Tabel 2.6 Realisasi Belanja APBD Agregat (Provinsi, Kabupaten, dan Kota) Kalimantan Selatan (Rp Miliar kecuali disebutkan lain)

URAIAN POS APBD	PAGU APBD		REALISASI S.D. TRIWULAN IV		% REALISASI S.D. TRIWULAN IV	
	2024	2025	2024	2025	2024	2025
Belanja Operasional	29.488,40	32.874,44	25.838,09	26.988,60	87,62%	82,10%
Belanja Pegawai	12.240,67	14.574,18	10.786,45	11.728,58	88,12%	80,48%
Belanja Barang dan Jasa	14.621,02	16.048,61	12.658,30	13.408,86	86,58%	83,55%
Hibah	2.314,42	1.990,37	2.114,05	1.616,23	91,34%	81,20%
Belanja Modal	13.967,67	13.490,54	11.650,38	11.389,62	83,41%	84,43%
Belanja Tak Terduga	319,66	415,99	13,55	29,70	4,24%	7,14%
Transfer Pemda	6.368,11	6.302,98	6.330,44	6.039,77	99,41%	95,82%
Transfer Bagi Hasil	2.486,35	2.280,39	2.484,13	2.270,77	99,91%	99,58%
Transfer Bantuan Keuangan	3.881,76	3.985,29	3.846,30	3.731,70	99,09%	93,64%
Total Belanja Daerah	50.143,84	53.083,95	43.832,45	44.447,69	87,41%	83,73%

Sumber: KFR Kanwil DJPb Provinsi Kalimantan Selatan, Kemenkeu

dari Rp454,19 miliar atau 87,66% dari pagu pada tahun 2024, menjadi Rp294,46 miliar atau 92,11% dari pagu pada tahun 2025. Selain itu, komponen Transfer Pemda juga mengalami penurunan dengan realisasi yang tercatat sebesar Rp2,18 triliun atau 100% dari pagu yang lebih rendah dibandingkan periode yang sama tahun 2024 yang tercatat Rp2,41 triliun atau 100% dari pagu.

Sementara itu, Belanja Modal mencatatkan peningkatan pada triwulan IV 2025. Belanja modal mengalami peningkatan dengan total realisasi tercatat Rp3,26 triliun atau 90,65% dari pagu, lebih tinggi dibandingkan capaian tahun sebelumnya sebesar Rp2,96 triliun atau 73,32% dari pagu.

2.2.2 Realisasi Belanja Pemerintah Kabupaten dan Kota

Realisasi belanja seluruh Pemerintah Kabupaten/Kota di Kalimantan Selatan sampai dengan triwulan IV 2025 menunjukkan peningkatan dibandingkan periode yang sama tahun 2024. Total realisasi belanja daerah sepanjang tahun 2025 tercatat sebesar Rp21,35 triliun atau 83,69% dari pagu APBD 2025, lebih tinggi dibandingkan dengan realisasi triwulan IV 2024 yang sebesar Rp20,08 triliun atau 88,37% dari pagu (Tabel 2.8). Peningkatan realisasi belanja ini bersumber dari peningkatan kinerja pada komponen belanja operasional dan belanja tak terduga, sedangkan komponen belanja modal dan transfer Pemda mengalami penurunan.

Realisasi Belanja Operasional sampai dengan triwulan IV 2025 tercatat sebesar Rp21,35 triliun atau 83,69% dari pagu, lebih tinggi dibandingkan realisasi triwulan IV 2024 yang mencapai Rp20,08 triliun atau 88,37% dari pagu. Peningkatan realisasi Belanja Operasional utamanya bersumber dari peningkatan Belanja Pegawai serta belanja barang dan jasa. Realisasi Belanja Pegawai pada triwulan IV 2025 secara nominal adalah sebesar Rp9,44 triliun, atau 85,95% terhadap pagu. Realisasi tersebut lebih tinggi dibandingkan triwulan IV tahun 2024 yang mencapai Rp8,59 triliun atau 64,85% dari pagu. Selanjutnya, realisasi Belanja Barang dan Jasa juga meningkat menjadi Rp10,37 triliun atau 82,22% terhadap pagu, lebih tinggi dibandingkan triwulan IV 2024 yang mencapai Rp9,56 triliun atau 86,05% dari pagu.

Komponen Belanja Tak Terduga juga mengalami peningkatan pada triwulan IV 2025. Komponen Belanja Tak Terduga mengalami peningkatan realisasi belanja yang tercatat sebesar Rp26,69 triliun atau 17,89% dari pagu, lebih tinggi dibandingkan realisasi triwulan IV 2024 yang hanya mencapai 4,24% dari pagu atau Rp9,43 miliar.

Sementara itu, realisasi Belanja Modal dan Transfer Pemda mengalami penurunan. Hingga triwulan IV 2025, Belanja Modal terealisasi sebesar Rp8,12 triliun atau 82,16% dari pagu, lebih rendah dibandingkan

Tabel 2.7 Realisasi Belanja APBD Provinsi Kalimantan Selatan (Rp Miliar kecuali disebutkan lain)

URAIAN POS APBD	PAGU APBD		REALISASI S.D. TRIWULAN IV		% REALISASI S.D. TRIWULAN IV	
	2024	2025	2024	2025	2024	2025
Belanja Operasional	6.759,45	7.361,07	5.752,22	5.636,84	85,10%	76,58%
Belanja Pegawai	2.717,77	3.589,83	2.186,94	2.287,04	80,47%	63,71%
Belanja Barang dan Jasa	3.505,14	3.425,85	3.092,89	3.031,01	88,24%	88,47%
Belanja Bunga	-	-	-	-	0,00%	0,00%
Belanja Subsidi	-	-	-	-	0,00%	0,00%
Belanja Hibah	518,14	319,70	454,20	294,46	87,66%	92,11%
Belanja Bansos	18,41	25,69	18,20	24,33	98,86%	94,71%
Belanja Modal	4.049,85	3.606,68	2.969,37	3.269,32	73,32%	90,65%
Belanja Tak Terduga	97,03	250,00	4,11	0,00	4,24%	0,00%
Transfer Pemda	2.412,87	2.188,10	2.412,87	2.188,10	100,00%	100,00%
Transfer Bagi Hasil	2.412,87	2.150,80	2.412,87	2.150,80	100,00%	100,00%
Transfer Bantuan Keuangan	-	-	-	-	-	-
Total Belanja Daerah	13.319,21	13.405,84	11.138,57	11.094,26	83,63%	82,76%

Sumber: KFR Kanwil DJPb Provinsi Kalimantan Selatan, Kemenkeu

Tabel 2.8 Realisasi Belanja APBD Kabupaten dan Kota Kalimantan Selatan (Rp Miliar kecuali disebutkan lain)

URAIAN POS APBD	PAGU APBD		REALISASI S.D. TRIWULAN IV		% REALISASI S.D. TRIWULAN IV	
	2024	2025	2024	2025	2024	2025
Belanja Operasional	22.728,94	25.513,38	20.085,86	21.351,75	88,37%	83,69%
Belanja Pegawai	9.522,91	10.984,35	8.599,51	9.441,54	90,30%	85,95%
Belanja Barang dan Jasa	11.115,88	12.622,77	9.565,41	10.377,86	86,05%	82,22%
Belanja Bunga	14,11	6,60	11,52	3,10	81,67%	47,03%
Belanja Subsidi	6,20	5,69	2,02	2,73	32,55%	47,91%
Belanja Hibah	1.796,28	1.670,67	1.659,85	1.321,76	92,40%	79,12%
Belanja Bansos	273,57	223,31	247,55	204,77	90,49%	91,70%
Belanja Modal	9.917,82	9.883,87	8.681,01	8.120,30	87,53%	82,16%
Belanja Tak Terduga	222,63	165,99	9,44	29,70	4,24%	17,89%
Transfer Pemda	3.955,24	4.114,88	3.917,57	3.851,67	99,05%	93,60%
Transfer Bagi Hasil	73,48	129,59	71,26	119,98	96,98%	92,58%
Transfer Bantuan Keuangan	3.881,76	3.985,29	3.846,30	3.731,70	99,09%	93,64%
Total Belanja Daerah	36.824,63	39.678,11	32.693,88	33.353,43	88,78%	84,06%

Sumber: KFR Kanwil DJPB Provinsi Kalimantan Selatan, Kemenkeu

realisasi triwulan IV 2024 yang sebesar Rp8,68 triliun atau 87,53% dari pagu. Penurunan ini menandakan bahwa percepatan pembangunan fisik dan investasi daerah belum sekuat tahun sebelumnya.

Komponen realisasi Transfer Pemda juga mengalami penurunan pada triwulan IV 2025.

Komponen realisasi Transfer Pemda hingga triwulan IV 2025 tercatat sebesar Rp3,85 triliun atau 93,60% dari pagu, lebih rendah dibandingkan realisasi triwulan IV 2024 yang mencapai Rp3,91 triliun atau 99,05% dari pagu.

Secara spasial, persentase realisasi belanja tertinggi tercatat di Kab. Banjar yakni 90,80% dari pagu 2025 atau sebesar Rp2,91 triliun, sedangkan persentase realisasi belanja terendah terdapat di Kota Banjarbaru yakni 77,29% dari pagu 2025 atau sebesar Rp1,45 triliun (Tabel 2.9).

Tabel 2.9 Realisasi Belanja APBD Kabupaten/Kota di Kalimantan Selatan (Rp Miliar kecuali disebutkan lain)

NO	KOTA/KAB	PAGU 2025	REALISASI S.D. TW IV 2025	% REALISASI S.D. TW IV 2025
1	KAB. BANJAR	3.209,46	2.914,30	90,80%
2	KAB. TANAH LAUT	2.862,91	2.596,35	90,69%
3	KAB. BARITO KUALA	1.957,87	1.715,88	87,64%
4	KAB. TAPIN	2.211,63	1.911,28	86,42%
5	KAB. HULU SUNGAI TENGAH	2.353,34	2.024,10	86,01%
6	KOTA BANJARMASIN	2.666,26	2.287,07	85,78%
7	KAB. BALANGAN	3.993,67	3.391,23	84,92%
8	KAB. TABALONG	3.598,15	3.034,10	84,32%
9	KAB. HULU SUNGAI SELATAN	2.116,27	1.757,52	83,05%
10	KAB. TANAH BUMBU	4.124,27	3.349,08	81,20%
11	KAB. KOTABARU	4.580,83	3.666,17	80,03%
12	KAB. HULU SUNGAI UTARA	4.124,27	3.253,94	78,90%
13	KOTA BANJARBARU	1.879,18	1.452,42	77,29%

Sumber : KFR Kanwil DJPB Provinsi Kalimantan Selatan

03

Perkembangan Inflasi Daerah





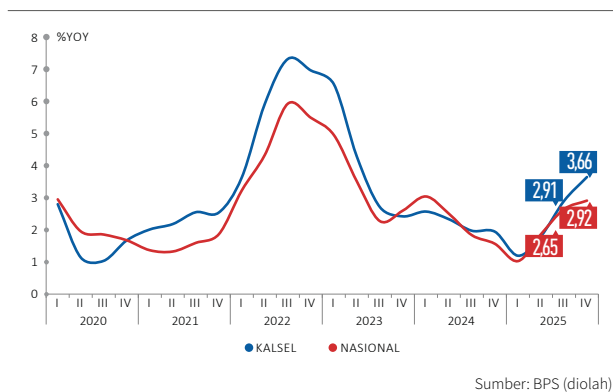
Secara tahunan, inflasi Provinsi Kalimantan Selatan pada triwulan IV 2025 tercatat sebesar 3,66% (yoy), lebih tinggi dibandingkan dengan triwulan III 2025 sebesar 2,91% (yoy). Realisasi inflasi tersebut lebih tinggi dibandingkan dengan inflasi nasional sebesar 2,92% (yoy) (Grafik 3.1) dan lebih tinggi dibandingkan historis inflasi Provinsi Kalimantan Selatan selama tiga tahun terakhir sebesar 3,65% (yoy).

Berdasarkan kelompok pengeluaran, inflasi pada triwulan IV 2025 terutama didorong oleh kelompok Perawatan Pribadi dan Jasa Lainnya dengan andil sebesar 1,63% (yoy). Selanjutnya kelompok Makanan, Minuman, dan Tembakau (andil 1,22%, yoy); kelompok Penyediaan Makanan dan Minuman/Restoran (andil 0,27%, yoy); kelompok Pendidikan (andil 0,14%, yoy); kelompok Kesehatan (andil 0,12%, yoy); kelompok Transportasi (andil 0,11%, yoy); dan kelompok Pakaian dan Alas Kaki (andil 0,10%, yoy). Di sisi lain, kelompok Rekreasi, Olahraga, dan Budaya tidak mengalami perubahan inflasi (andil 0,00%, yoy). Sedangkan, kelompok Informasi, Komunikasi, dan Jasa Keuangan tercatat mengalami deflasi dengan andil sebesar -0,03% (yoy).

Pada Februari 2026, inflasi di Provinsi Kalimantan Selatan lebih tinggi dibandingkan dengan Desember 2025. Inflasi di Provinsi Kalimantan Selatan pada Februari 2026 tercatat sebesar 5,97% (yoy), lebih tinggi dibandingkan dengan bulan Desember 2025 dengan inflasi sebesar 3,66% (yoy). [MT5.1] Dengan perkembangan pada bulan Februari 2026, tekanan inflasi tahunan Provinsi Kalimantan Selatan pada triwulan I 2026 diperkirakan lebih tinggi dibandingkan dengan triwulan IV 2025. Kelompok Perumahan, Air, Listrik, dan Bahan Bakar Rumah Tangga diperkirakan meningkat dibandingkan triwulan IV 2025 didorong faktor *base effect* dampak kebijakan diskon tarif listrik pada tahun 2025. Selanjutnya tekanan inflasi pada kelompok Transportasi diperkirakan meningkat bersumber dari peningkatan permintaan masyarakat seiring momen HBKN Ramadan dan Idul Fitri 1447 H. Memperhatikan perkembangan terkini dan risiko inflasi ke depan, secara keseluruhan inflasi Provinsi Kalimantan Selatan pada tahun 2026 diperkirakan tetap berada dalam rentang target inflasi Nasional 2,5±1%.

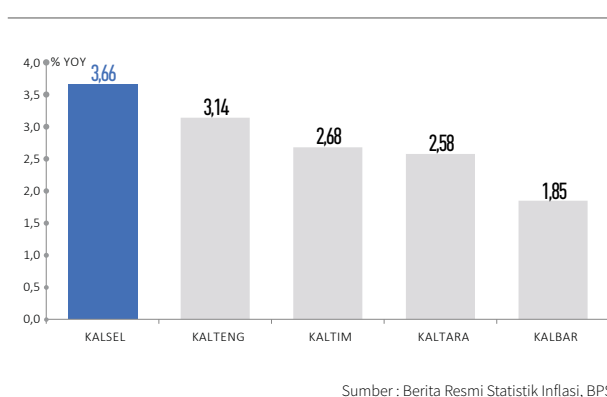
3.1 PERKEMBANGAN INFLASI

Secara tahunan, inflasi Provinsi Kalimantan Selatan pada triwulan IV 2025 tercatat sebesar 3,66% (yoy), lebih tinggi dibandingkan dengan triwulan III 2025 sebesar 2,91% (yoy). Realisasi inflasi tersebut lebih tinggi dibandingkan dengan inflasi nasional sebesar 2,92% (yoy) (Grafik 3.1) dan lebih tinggi dibandingkan historis inflasi Provinsi Kalimantan Selatan selama tiga tahun terakhir sebesar 3,65% (yoy).

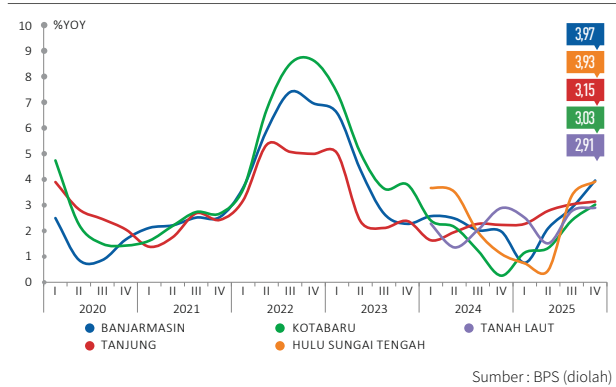


Grafik 3.1 Perkembangan Inflasi Nasional dan Provinsi Kalimantan Selatan

Realisasi Inflasi Provinsi Kalimantan Selatan pada triwulan IV merupakan yang tertinggi di wilayah Kalimantan (Grafik 3.2). Sementara itu, secara spasial, Banjarmasin mencatatkan inflasi tertinggi yaitu sebesar 3,97% (yoy), diikuti oleh Hulu Sungai Tengah sebesar 3,93% (yoy), Tanjung sebesar 3,15% (yoy), Kotabaru sebesar 3,03% (yoy) dan Tanah Laut sebesar 2,91% (yoy) (Grafik 3.3).



Grafik 3.2 Perbandingan Gabungan Kota Inflasi untuk Provinsi se-Kalimantan pada Triwulan III 2025



Grafik 3.3 Perkembangan Inflasi Kota Banjarmasin, Tanjung, Kotabaru, Kab. Hulu Sungai Tengah, dan Kab. Tanah Laut

Tekanan Inflasi pada triwulan IV 2025 utamanya bersumber dari kelompok Perawatan Pribadi dan Jasa Lainnya serta kelompok Makanan, Minuman, dan Tembakau dengan andil inflasi tahunan masing-masing sebesar 1,63% (yoy) dan 1,22% (yoy). Peningkatan tekanan inflasi pada kelompok Perawatan Pribadi dan Jasa Lainnya didorong oleh kenaikan harga emas perhiasan seiring meningkatnya harga emas global sejalan dengan ekspektasi pemangkasan lanjutan suku bunga oleh The Fed di 2026, paska *cut rate* di bulan Desember 2025. Sementara itu, kelompok Makanan, Minuman, dan Tembakau tercatat mengalami peningkatan tekanan inflasi akibat bencana hidrometeorologi di sentra produksi, serta tingginya permintaan komoditas pangan di tengah pelaksanaan *festive event* Haul Guru Sekumpul yang diperkirakan dihadiri 4,9 juta jamaah. Selanjutnya, harga komoditas bawang merah dan cabai rawit meningkat akibat gangguan produksi terdampak cuaca buruk di sentra produksi. Lebih lanjut, harga komoditas ikan gabus juga mengalami peningkatan seiring penurunan hasil tangkap di tengah curah hujan tinggi. Selain itu, berakhirnya panen padi serta tingginya permintaan meningkatkan harga beras selama bulan Desember 2025. (Tabel 3.1)

Di sisi lain, tekanan inflasi yang lebih tinggi tertahan oleh deflasi kelompok Informasi, Komunikasi, dan Jasa Keuangan seiring penurunan sub kelompok Peralatan Informasi dan Komunikasi pada komoditas telepon seluler dan televisi berwarna. Selain itu, beberapa komoditas pada kelompok Makanan, Minuman, dan Tembakau juga mengalami deflasi seperti tomat, ikan gabus, bawang putih, bayam, jagung manis, ikan patin, sawi hijau, dan ikan nila. (Tabel 3.3).

Tabel 3.1 Kelompok Utama Penyumbang Inflasi di Provinsi Kalimantan Selatan pada Triwulan IV 2025

NO	KOMODITI	KELOMPOK
1	Emas Perhiasan	Perawatan Pribadi dan Jasa Lainnya
2	Beras	Makanan, Minuman, dan Tembakau
3	Sigaret Kretek Mesin	Makanan, Minuman, dan Tembakau
4	Bawang Merah	Makanan, Minuman, dan Tembakau
5	Cabai Rawit	Makanan, Minuman, dan Tembakau
6	Nasi Dengan Lauk	Penyediaan Makanan dan Minuman/Restoran
7	Daging Ayam Ras	Makanan, Minuman, dan Tembakau
8	Tarif Rumah Sakit	Kesehatan
9	Sewa Rumah	Perumahan, Air, Listrik, dan BBRT
10	Cabai Merah	Makanan, Minuman, dan Tembakau

Sumber: BPS, diolah

Tabel 3.2 Komoditas Utama Penyumbang Inflasi (yoy) pada Triwulan IV 2025

NO	KOMODITI	KELOMPOK
1	Emas Perhiasan	makanan, minuman dan tembakau
2	Beras	makanan, minuman dan tembakau
3	Sigaret Kretek Mesin	pendidikan
4	Bawang Merah	makanan, minuman dan tembakau
5	Cabai Rawit	makanan, minuman dan tembakau
6	Nasi Dengan Lauk	makanan, minuman dan tembakau
7	Daging Ayam Ras	pendidikan
8	Tarif Rumah Sakit	perawatan pribadi dan jasa lainnya
9	Sewa Rumah	makanan, minuman dan tembakau
10	Cabai Merah	transportasi

Sumber: BPS, diolah

Tabel 3.3 Komoditas Utama Penyumbang Deflasi (yoy) pada Triwulan IV 2025

NO	KOMODITI	KELOMPOK
1	Tarif Parkir	Transportasi
2	Tomat	Makanan, Minuman, dan Tembakau
3	Ikan Gabus	Makanan, Minuman, dan Tembakau
4	Bawang Putih	Makanan, Minuman, dan Tembakau
5	Bayam	Makanan, Minuman, dan Tembakau
6	Jagung Manis	Makanan, Minuman, dan Tembakau
7	Ikan Patin	Makanan, Minuman, dan Tembakau
8	Sawi Hijau	Makanan, Minuman, dan Tembakau
9	Ikan Nila	Makanan, Minuman, dan Tembakau
10	Pengharum Cucian	Perlengkapan, Peralatan, dan Pemeliharaan Rutin Rumah Tangga

Sumber: BPS, diolah

3.2 INFLASI BERDASARKAN KELOMPOK PENGELUARAN

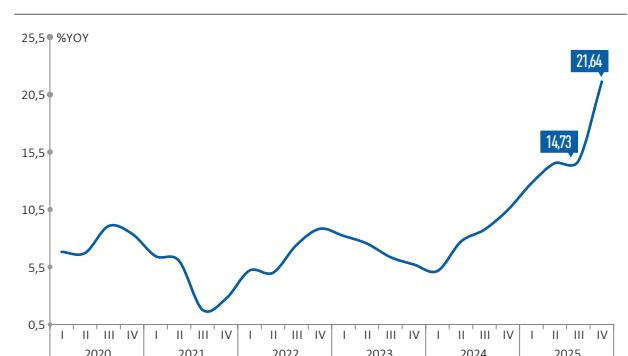
Berdasarkan kelompok Pengeluaran, inflasi pada triwulan IV 2025 didorong oleh peningkatan tekanan inflasi pada kelompok Perawatan Pribadi dan Jasa Lainnya

(andil 1,63%, yoy); kelompok Makanan, Minuman, dan Tembakau (andil 1,22%, yoy); kelompok Penyediaan Makanan dan Minuman/Restoran (andil 0,27%, yoy); kelompok Pendidikan (andil 0,14%, yoy); kelompok Kesehatan (andil 0,12%, yoy); kelompok Transportasi (andil 0,11%, yoy); kelompok Pakaian dan Alas Kaki (andil 0,10%, yoy); kelompok Perumahan, Air, Listrik, dan Bahan Bakar Rumah Tangga (andil 0,08%, yoy); dan kelompok Perlengkapan, Peralatan dan Pemeliharaan Rutin Rumah Tangga (andil 0,02%, yoy). Di sisi lain, kelompok Rekreasi, Olahraga, dan Budaya tidak mengalami perubahan inflasi (andil 0,00%, yoy). Sedangkan, kelompok Informasi, Komunikasi, dan Jasa Keuangan tercatat mengalami deflasi dengan andil sebesar -0,03% (yoy).

3.2.1 Kelompok Perawatan Pribadi dan Jasa Lainnya

Kelompok Perawatan Pribadi dan Jasa Lainnya pada triwulan IV 2025 tercatat mengalami inflasi sebesar 21,64% (yoy), meningkat dibandingkan triwulan sebelumnya sebesar 14,73% (yoy) (Grafik 3.4).

Subkelompok Perawatan Pribadi Lainnya mengalami inflasi 47,58% (yoy) dan menjadi pendorong utama peningkatan inflasi kelompok Perawatan Pribadi dan Jasa Lainnya. Sementara itu, subkelompok Jasa Lainnya mengalami inflasi 1,81% (yoy), sedangkan subkelompok Perlindungan Sosial tidak mengalami perubahan. Tekanan inflasi pada kelompok Perawatan Pribadi dan Jasa Lainnya terutama disebabkan oleh peningkatan harga komoditas emas perhiasan dengan andil inflasi tahunan sebesar 1,50% (yoy). Peningkatan tersebut sejalan dengan tren peningkatan harga emas dunia yang dipengaruhi oleh ketidakpastian global akibat eskalasi perang dagang dan tren penurunan suku bunga global, sehingga emas menjadi pilihan masyarakat sebagai instrumen perlindungan nilai dan diversifikasi investasi.



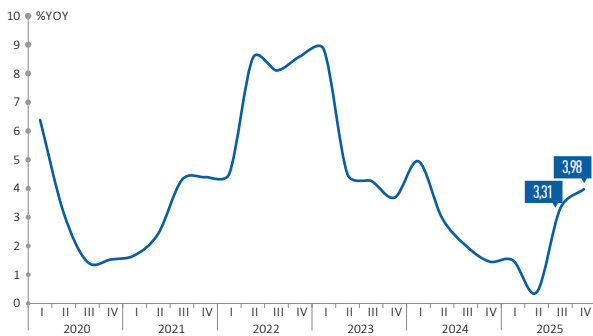
Sumber: BPS (diolah)

Grafik 3.4 Perkembangan Inflasi Kelompok Perawatan Pribadi dan Jasa Lainnya

3.2.2 Kelompok Makanan, Minuman dan Tembakau

Pada triwulan IV 2025, kelompok Makanan, Minuman dan Tembakau tercatat mengalami inflasi sebesar 3,98% (yoy), meningkat dibandingkan triwulan sebelumnya sebesar 3,31% (yoy) (Grafik 3.5).

Inflasi utamanya berasal dari subkelompok Rokok dan Tembakau yang mengalami inflasi tertinggi sebesar 5,47% (yoy) dan terendah yaitu subkelompok Makanan sebesar 3,72% (yoy). Kenaikan harga aneka rokok (a.l Sigaret Kretek Mesin/SKM) merupakan dampak penyesuaian Harga Jual Eceran (HJE) yang dilakukan secara bertahap sejak awal tahun 2025 menjadi sumber peningkatan tekanan inflasi pada subkelompok Rokok dan Tembakau. Pada subkelompok Makanan, inflasi utamanya didorong oleh bencana hidrometeorologi di sentra produksi, serta tingginya permintaan komoditas pangan di tengah pelaksanaan *festive event* Haul Guru Sekumpul yang dihadiri 4,9 juta jamaah. Harga komoditas bawang merah dan cabai rawit meningkat akibat gangguan produksi terdampak cuaca buruk di sentra produksi. Harga komoditas ikan gabus juga mengalami peningkatan seiring penurunan hasil tangkap di tengah curah hujan tinggi. Adapun, harga beras selama bulan Desember 2025 mengalami peningkatan disebabkan berakhirnya panen padi dan tingginya permintaan.

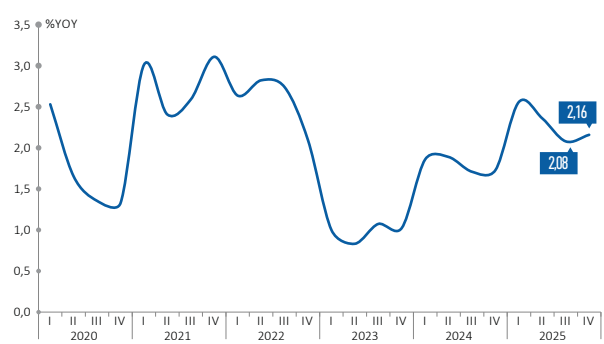


Sumber : BPS (diolah)

Grafik 3.5 Perkembangan Inflasi Kelompok Makanan, Minuman, dan Tembakau

3.2.3 Kelompok Penyediaan Makanan dan Minuman/Restoran

Pada triwulan IV 2025, kelompok Penyediaan Makanan dan Minuman/Restoran tercatat mengalami inflasi sebesar 2,16% (yoy), lebih tinggi dibandingkan dengan triwulan sebelumnya sebesar 2,08% (yoy) (Grafik 3.6). Komoditas penyumbang andil



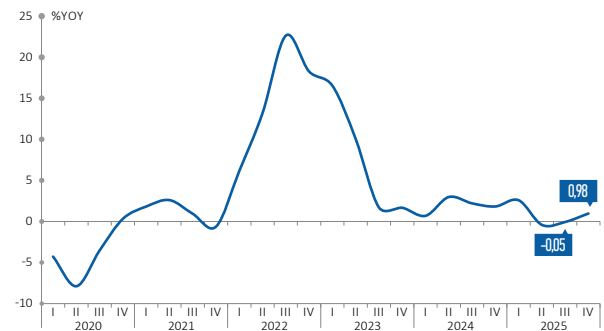
Sumber : BPS (diolah)

Grafik 3.6 Perkembangan Inflasi Kelompok Penyediaan Makanan dan Minuman/Restoran

inflasi pada kelompok ini di antaranya adalah mie, sayur olahan, ayam bakar, ayam goreng, bubur, gado-gado, ikan bakar, nasi dengan lauk, soto, sop, dan bakso siap santap. Peningkatan harga pada komoditas tersebut sejalan dengan meningkatnya harga komoditas pangan utama pada kelompok Makanan, Minuman, dan Tembakau, seperti beras, daging ayam ras, dan aneka cabai.

3.2.4 Kelompok Transportasi

Pada triwulan IV 2025, kelompok Transportasi mencatat inflasi sebesar 0,98% (yoy), lebih tinggi dibandingkan dengan triwulan sebelumnya yang mengalami deflasi sebesar 0,05% (yoy) (Grafik 3.7). Realisasi inflasi pada kelompok ini didorong oleh subkelompok Jasa Angkutan Penumpang yang mengalami inflasi sebesar 3,40% (yoy); subkelompok Pembelian Kendaraan sebesar 3,04% (yoy); dan subkelompok Jasa Pengiriman Barang sebesar 0,02% (yoy). Inflasi subkelompok Jasa Angkutan Penumpang tercatat meningkat didorong oleh peningkatan permintaan komoditas angkutan udara seiring momen Haul Guru Sekumpul dan HBKN Nataru serta peningkatan harga BBM Nonsubsidi per 1 Desember 2025.



Sumber : BPS (diolah)

Grafik 3.7 Perkembangan Inflasi Kelompok Transportasi

3.3 PERKEMBANGAN INFLASI TRIWULAN I 2026

Pada Februari 2026, inflasi di Provinsi Kalimantan Selatan lebih tinggi dibandingkan dengan Desember 2025.

Inflasi di Provinsi Kalimantan Selatan pada Februari 2026 tercatat sebesar 5,97% (yoy), lebih tinggi dibandingkan dengan bulan Desember 2025 dengan inflasi sebesar 3,66% (yoy). Realisasi inflasi tersebut lebih tinggi dibandingkan dengan inflasi nasional sebesar 4,76% (yoy) dan lebih tinggi dibandingkan dengan rata-rata historis inflasi bulan Februari selama 3 (tiga) tahun terakhir yang sebesar 3,08% (yoy).

Inflasi terutama didorong oleh kelompok Perawatan Pribadi dan Jasa Lainnya yang mengalami inflasi 23,47% (yoy), lebih tinggi dibandingkan bulan lalu sebesar 21,64% (yoy). Selanjutnya kelompok Makanan, Minuman, dan Tembakau yang mengalami inflasi sebesar 2,80% (yoy) yang lebih rendah dibandingkan Desember 2025 sebesar 3,98% (yoy). Kemudian, kelompok Penyediaan Makanan dan Minuman/Restoran mengalami inflasi sebesar 2,04% (yoy) yang lebih rendah dibandingkan bulan lalu yang sebesar 2,16% (yoy). Di sisi lain, inflasi yang lebih tinggi tertahan oleh deflasi pada kelompok Transportasi serta kelompok Informasi, Komunikasi, dan Jasa Keuangan yang masing-masing mengalami deflasi sebesar 0,46% (yoy) dan 0,30% (yoy). Adapun komoditas utama penyebab inflasi adalah emas perhiasan (Tabel 3.4), sementara komoditas deflasi disumbangkan oleh komoditas tarif parkir dan cabai merah (Tabel 3.5).

Tabel 3.4 Komoditas Utama Pendorong Inflasi bulan Januari 2026 secara tahunan (%yoy)

NO	KOMODITI	KELOMPOK
1	Emas Perhiasan	Perawatan Pribadi dan Jasa Lainnya
2	Tarif Listrik	Perumahan, Air, Listrik, dan BBRT
3	Beras	Makanan, Minuman, dan Tembakau
4	Sigaret Kretek Mesin	Makanan, Minuman, dan Tembakau
5	Ikan Papuyu	Makanan, Minuman, dan Tembakau
6	Nasi Dengan Lauk	Penyediaan Makanan dan Minuman/Restoran
7	Tarif Rumah Sakit	Kesehatan
8	Bawang Merah	Makanan, Minuman, dan Tembakau
9	Sewa Rumah	Perumahan, Air, Listrik, dan BBRT
10	Kue Basah	Makanan, Minuman, dan Tembakau

Sumber: BPS, diolah

Tabel 3.5 Komoditas Utama Penahan Inflasi bulan Januari 2026 secara tahunan (%yoy)

NO	KOMODITI	KELOMPOK
1	Tarif Parkir	Transportasi
2	Cabai Merah	Makanan, Minuman, dan Tembakau
3	Ikan Gabus	Makanan, Minuman, dan Tembakau
4	Cabai Rawit	Makanan, Minuman, dan Tembakau
5	Angkutan Udara	Transportasi
6	Bawang Putih	Makanan, Minuman, dan Tembakau
7	Ikan Nila	Makanan, Minuman, dan Tembakau
8	Cabai Hijau	Makanan, Minuman, dan Tembakau
9	Udang Basah	Makanan, Minuman, dan Tembakau
10	Pengharum Cucian	Perlengkapan, Peralatan, dan Pemeliharaan Rutin Rumah Tangga

Sumber: BPS, diolah

Pada Januari 2026, kelompok Perawatan Pribadi dan Jasa Lainnya mengalami inflasi tertinggi sebesar 23,47% (yoy) dengan andil sebesar 1,79% (Tabel 3.6).

Inflasi kelompok ini meningkat dibandingkan dengan bulan sebelumnya yang tercatat inflasi sebesar 21,64% (yoy) dengan andil tahunan sebesar 1,63% (yoy). Inflasi pada kelompok ini didorong oleh subkelompok Perawatan Pribadi Lainnya sebesar 51,81% (yoy). Tekanan inflasi pada kelompok ini terutama didorong oleh kenaikan harga emas perhiasan sejalan dengan meningkatnya harga emas dunia di tengah penurunan suku bunga global serta meningkatnya ketidakpastian global.

Tabel 3.6 Inflasi Kalimantan Selatan Januari 2026 Menurut Kelompok (yoy)

NO	KELOMPOK	INFLASI (%YOY)	ANDIL (%YOY)
1	Makanan, minuman dan tembakau	3,33	1,00
2	Pakaian dan alas kaki	1,91	0,10
3	Perumahan, air, listrik, dan bahan bakar rumah tangga	0,66	0,10
4	Perlengkapan, peralatan dan pemeliharaan rutin rumah tangga	0,47	0,02
5	Kesehatan	3,00	0,11
6	Transportasi	-0,13	-0,01
7	Informasi, komunikasi, dan jasa keuangan	-0,28	-0,03
8	Rekreasi, olahraga dan budaya	-0,05	0,00
9	Pendidikan	3,55	0,14
10	Penyediaan makanan dan minuman/restoran	2,08	0,26
11	Perawatan pribadi dan jasa lainnya	18,97	1,42

Sumber: BPS, diolah



Kemudian, kelompok Makanan, Minuman, dan Tembakau tercatat mengalami kenaikan tekanan inflasi sebesar 2,80% (yoy) dengan andil Inflasi sebesar 0,89% (yoy). Komoditas daging ayam ras menjadi pendorong utama kenaikan tekanan inflasi kelompok ini dengan andil sebesar 0,07% (yoy) sejalan dengan meningkatnya biaya *input* akibat peningkatan harga pakan ternak ayam broiler. Selain itu, komoditas aneka ikan juga tercatat mengalami kenaikan harga disebabkan oleh curah hujan yang masih tinggi menyulitkan kegiatan penangkaran.

Selanjutnya, kelompok Penyediaan Makanan dan Minuman/Restoran mengalami inflasi tahunan sebesar 2,04% (yoy) dengan andil inflasi sebesar 0,25% (yoy). Inflasi kelompok ini didorong oleh komoditas nasi dengan lauk seiring kenaikan bahan pangan utama, selain itu mie, sayur olahan, ayam bakar, ayam goreng, bubur, ikan bakar, soto, sop, dan bakso siap santap juga turut menyumbang inflasi.

Di sisi lain, kelompok Transportasi menjadi penyumbang andil deflasi sebesar 0,05% (yoy) dengan deflasi tahunan mencapai sebesar 0,46% (yoy). Deflasi pada kelompok ini terutama disebabkan oleh penurunan tarif parkir oleh Pemerintah Kota Banjarmasin per Juni 2025. Selanjutnya, penurunan harga BBM nonsubsidi pada 1 Januari 2025 juga turut menyumbang deflasi. Selain itu, tarif angkutan udara juga mengalami deflasi seiring permintaan terhadap moda transportasi udara yang mengalami penurunan di tengah harga avtur yang menurun.

Dengan perkembangan pada bulan Januari 2026, tekanan inflasi tahunan Provinsi Kalimantan Selatan pada triwulan I 2026 diperkirakan lebih tinggi dibandingkan dengan triwulan IV 2025. Kelompok Perumahan, Air, Listrik, dan Bahan Bakar Rumah Tangga diperkirakan meningkat dibandingkan triwulan IV 2025 didorong faktor *base effect* dampak kebijakan diskon tarif listrik pada tahun 2025. Selanjutnya tekanan inflasi pada kelompok transportasi diperkirakan meningkat bersumber dari peningkatan permintaan masyarakat seiring momen HBKN Ramadan dan Idul Fitri 1447 H. Memperhatikan perkembangan terkini dan risiko inflasi ke depan, secara keseluruhan inflasi Provinsi Kalimantan

Selatan pada tahun 2025 diperkirakan tetap berada dalam rentang target inflasi Nasional $2,5 \pm 1\%$.

3.4 PENGENDALIAN INFLASI DAERAH

Pengendalian inflasi tidak terlepas dari koordinasi dan sinergi kebijakan yang semakin erat antara Pemerintah Pusat dan Daerah, Bank Indonesia, serta berbagai *stakeholders* strategis di daerah. Koordinasi kebijakan baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang juga terus diperkuat. Dalam kaitan ini, koordinasi Tim Pengendalian Inflasi Pusat dan Daerah (TPIP dan TPID) perlu terus dilanjutkan didukung penguatan program Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP) di Provinsi Kalimantan Selatan. Langkah pengendalian inflasi secara rutin dilakukan antara lain melalui rapat koordinasi (rakor) atau *High Level Meeting* (HLM), dukungan penyelenggaraan operasi pasar dan pasar murah. Lebih lanjut, Bank Indonesia akan terus memperkuat respon kebijakan guna memastikan keberlanjutan upaya menjangkar ekspektasi inflasi tetap terjaga dalam kisaran $2,5 \pm 1\%$.

Beberapa rangkuman kegiatan TPID di Provinsi Kalimantan Selatan selama triwulan IV 2025 sebagai berikut:

KETERJANGKAUAN HARGA

Pengendalian harga melalui Operasi Pasar dan Pasar Murah di Provinsi Kalimantan Selatan telah diselenggarakan untuk mengendalikan komoditas bahan pokok penting seperti beras minyak goreng, tepung terigu, bawang, dan telur ayam ras. Pada triwulan IV 2025, telah dilaksanakan kegiatan Pasar Murah/Operasi Pasar yang tersebar di seluruh wilayah Kalimantan Selatan. Selain itu, penyaluran beras SPHP (realisasi 10,3 ribu ton/40,17% dari target per Desember 2025) dan program bantuan pangan pemerintah pada Juni-Juli 2025 terus disalurkan untuk memperkuat daya beli masyarakat.

KETERSEDIAAN PASOKAN

Dalam rangka menjaga ketersediaan pasokan pangan di Kalimantan Selatan telah dilaksanakan beberapa kegiatan, di antaranya kerja sama dapur MBG dengan asosiasi peternak ayam petelur dan ayam pedaging Kalimantan Selatan dalam rangka memasok kebutuhan bahan baku. Selanjutnya, telah dilaksanakan penandatanganan MoU

Kerjasama Antar Daerah (KAD) antara Kota Banjarmasin dengan Kabupaten Blitar untuk komoditas telur ayam ras. Selain itu, telah dilakukan pemberian bantuan pangan bagi masyarakat terdampak bencana banjir di Balangan guna memastikan ketersediaan pangan masyarakat. Lebih lanjut, telah dilaksanakan penambahan frekuensi penerbangan dari dan ke Kota Banjarbaru dalam rangkaantisipasi lonjakan permintaan masyarakat selama momen Haul Guru Sekumpul.

KELANCARAN DISTRIBUSI

Dalam mendukung kelancaran distribusi, telah dilaksanakan peresmian *overpass* (jembatan) Merah Putih untuk mendukung distribusi komoditas pangan dan pertambangan di Kab. Hulu Sungai Selatan. Selanjutnya, telah dilaksanakan pemberian Fasilitas Distribusi Pangan (FDP) dalam rangka dukungan KAD Kab. Tabalong dan Kab. Probolinggo untuk komoditas bawang merah. Selain itu, juga telah diberikan dukungan subsidi ongkos angkut sebagai dukungan implementasi program Gerakan Pangan Murah yang dilaksanakan di lebih dari 100 selama triwulan pertama 2026. Selanjutnya, satgas pangan telah melakukan pengawasan jalur distribusi di berbagai titik

tersebut guna memastikan pengiriman pasokan bahan pangan berjalan lancar selama pelaksanaan kegiatan Haul Guru Sekumpul dan HBKN Nataru 2025.

KOMUNIKASI EFEKTIF

Dalam rangka pengendalian inflasi, diperlukan adanya sinergi dan koordinasi dalam merumuskan serta melaksanakan upaya pengendalian inflasi pangan. Oleh karena itu, sebagai bentuk perwujudan komunikasi efektif, telah dilaksanakan beberapa kegiatan di antaranya:

- Pelaksanaan *Capacity Building* TPID Kabupaten Tanah Bumbu pada 18 Desember 2025.
- Pelaksanaan sosialisasi belanja bijak menjelang momen HBKN Nataru dan pelaksanaan Haul Guru Sekumpul oleh TPID Provinsi Kalimantan Selatan dan TPID Kota Banjarmasin.
- Pelaksanaan kegiatan HLM TPID Kabupaten Tanah Laut pada 22 Desember 2025.
- Pelaksanaan sidak pasar oleh satgas pangan dan SKPD menjelang HBKN Nataru dan Haul Guru Sekumpul guna memastikan terjaganya pasokan dan kestabilan harga.

04

Pembiayaan Daerah, Serta Pengembangan Akses Keuangan dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)





Pertumbuhan ekonomi Kalimantan Selatan pada triwulan IV 2025 yang positif turut didukung peningkatan fungsi intermediasi perbankan yang tumbuh solid, walaupun lebih rendah dibandingkan triwulan sebelumnya. Kredit perbankan tumbuh positif sebesar 5,88% (yoy) dengan *outstanding* Rp108,33 triliun, lebih rendah dibandingkan dengan triwulan III 2025 yang tumbuh 13,36% (yoy) dengan *outstanding* Rp106,43 triliun; serta diikuti dengan kualitas kredit yang baik, tecermin dari NPL yang terjaga pada level 2,14%.

Kredit Konsumsi pada triwulan IV 2025 dengan *outstanding* sebesar Rp35,69 triliun, tumbuh 5,96% (yoy), lebih rendah dibandingkan dengan triwulan sebelumnya yang tumbuh sebesar 7,01% (yoy) dengan *outstanding* sebesar Rp35,16 triliun, sejalan dengan indeks ekspektasi yang masih dalam rentang optimis. Berdasarkan distribusinya, Kredit Multiguna memiliki pangsa sebesar 42,93%, Kredit Kepemilikan Rumah (KPR) sebesar 37,86% dan Kredit Kendaraan Bermotor (KKB) sebesar 7,03% serta Kredit Konsumsi lainnya meliputi Kredit Ruko/Rukan, Apartemen, dan Elektronik sebesar 12,10%.

Penyaluran Kredit Korporasi pada triwulan IV 2025 mengalami pertumbuhan sebesar 6,24% (yoy) dengan *outstanding* senilai Rp53,81 triliun, lebih rendah dibandingkan dengan triwulan sebelumnya yang tumbuh 21,67% (yoy) dengan *outstanding* senilai Rp52,13 triliun. Melambatnya pertumbuhan pada Kredit Korporasi terutama bersumber dari melambatnya penyaluran pembiayaan korporasi pada LU Pertambangan (dengan proporsi terbesar mencapai 53,39% dari kredit korporasi) yang tumbuh 4,90% (yoy) dengan *outstanding* senilai Rp29,18 triliun, melambat dibandingkan triwulan sebelumnya yang tumbuh 44,89% (yoy) dengan *outstanding* senilai Rp28,10 triliun.

Pada triwulan IV 2025, Kredit UMKM di Kalimantan Selatan berkontraksi 4,29% (yoy) dengan *outstanding* senilai Rp22,85 triliun, menurun dibandingkan dengan triwulan sebelumnya yang tumbuh sebesar 0,73% (yoy) dengan *outstanding* senilai Rp23,15 triliun. Pangsa Kredit UMKM terhadap total kredit pada triwulan IV 2025 tercatat sebesar 21,09%, lebih rendah dibandingkan dengan pangsa pada triwulan sebelumnya sebesar 21,75%.

4.1 PEMBIAYAAN DAERAH

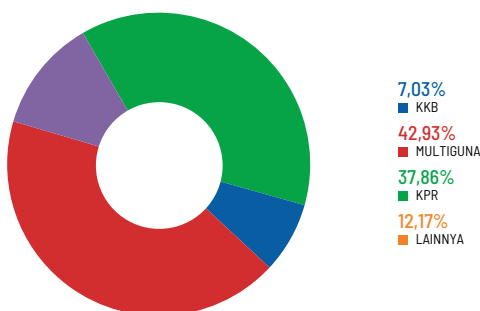
Pertumbuhan ekonomi Kalimantan Selatan pada triwulan IV 2025 tetap kuat didukung oleh fungsi intermediasi perbankan yang tumbuh terbatas.

Kredit Perbankan tumbuh sebesar 5,88% (yoy) dengan *outstanding* Rp108,33 triliun, tumbuh lebih rendah dibandingkan triwulan III 2025 yang tumbuh 13,36% (yoy) dengan *outstanding* Rp106,43 triliun; serta diikuti dengan kualitas kredit yang baik, tercermin dari NPL yang tetap terjaga pada level 2,14% (triwulan IV 2025). Pertumbuhan yang lebih rendah ini terutama bersumber dari pertumbuhan kredit pada LU Pertambangan yang melambat, serta realisasi Kredit Investasi (KI), Kredit Modal Kerja (KMK), dan Kredit Konsumsi yang lebih rendah. Selain itu, Kredit UMKM pada triwulan IV 2025 berkontraksi sebesar 4,29% (yoy), lebih dalam dibandingkan pertumbuhan Kredit UMKM pada triwulan sebelumnya yang juga berkontraksi sebesar 0,73% (yoy). Kontraksi yang lebih dalam pada Kredit UMKM dipicu oleh melambatnya penyaluran kredit pada seluruh skala UMKM pada triwulan berjalan.

4.1.1 Pembiayaan Rumah Tangga (RT)

Kredit Konsumsi pada triwulan IV 2025 dengan *outstanding* sebesar Rp35,69 triliun, tumbuh 5,96% (yoy), lebih rendah dibandingkan dengan triwulan III 2025 yang tumbuh sebesar 7,01% (yoy) dengan *outstanding* sebesar Rp35,16 triliun. Berdasarkan komponennya, perlambatan Kredit Konsumsi terutama diakibatkan oleh melambatnya pertumbuhan Kredit Multiguna dan Kredit Kendaraan Bermotor (KKB). Kredit Multiguna merupakan kontributor Kredit Konsumsi terbesar (42,93%) (Grafik 4.1).

Pada triwulan IV 2025, penyaluran Kredit Multiguna tumbuh sebesar 6,98% (yoy) dengan *outstanding*

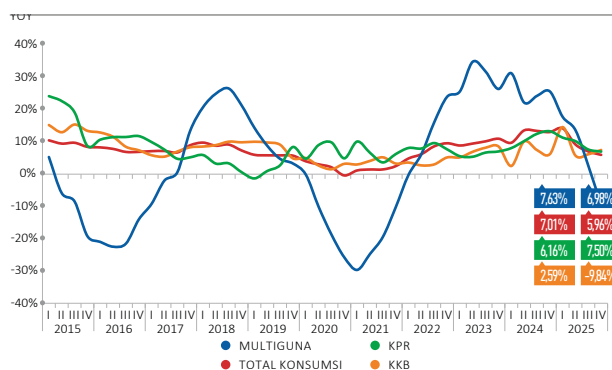


Sumber : LBU Bank Indonesia

Grafik 4.1 Distribusi Kredit Konsumsi Periode Triwulan IV 2025

sebesar Rp15,32 triliun, lebih rendah dibandingkan triwulan sebelumnya yang tumbuh 7,63% (yoy) dengan *outstanding* Rp14,98 triliun.

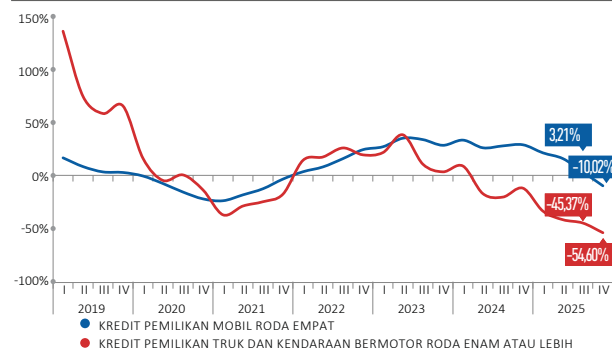
Lebih lanjut, penyaluran KKB pada triwulan IV 2025 juga tumbuh melambat. KKB berkontraksi sebesar 9,84% (yoy) dengan *outstanding* senilai Rp2,50 triliun, menurun dibandingkan dengan triwulan sebelumnya dengan *outstanding* senilai Rp2,66 triliun atau tumbuh sebesar 2,59% (yoy) (Grafik 4.2). Penurunan tersebut bersumber dari kontraksi pertumbuhan penyaluran Kredit Kepemilikan Mobil Roda Empat yang memiliki proporsi terbesar (89,40%) serta Kredit Kepemilikan Truk dan Kendaraan Roda Enam (1,78%).



Sumber : LBU Bank Indonesia

Grafik 4.2 Pertumbuhan Kredit Konsumsi Berdasarkan Jenisnya Periode Triwulan IV 2025

KKB Roda Empat berkontraksi 10,02% (yoy) dengan *outstanding* Rp2,24 triliun pada triwulan laporan, melambat dibandingkan triwulan sebelumnya yang dapat tumbuh sebesar 3,21% (yoy) dengan *outstanding* sebesar Rp2,39 triliun. Sementara itu, Kredit Pemilikan Truk dan Kendaraan Roda Enam mengalami kontraksi yang lebih dalam, yaitu sebesar 54,60% (yoy) setelah mengalami kontraksi sebesar 45,37% (yoy) pada triwulan III 2025 (Grafik 4.3). Hal ini diperkirakan sejalan dengan melambatnya permintaan pembiayaan Truk dan

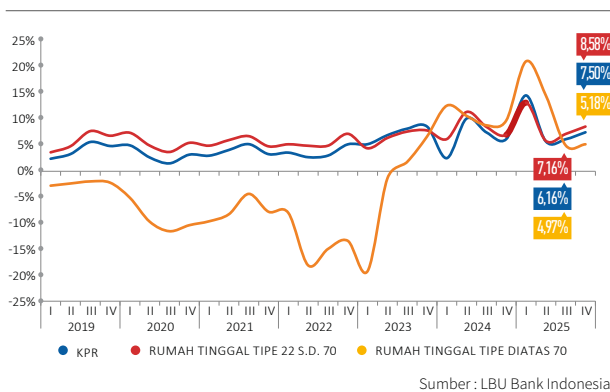


Sumber : LBU Bank Indonesia

Grafik 4.3 Pertumbuhan Kredit Konsumsi Pemilikan Mobil Roda Empat, Truk dan Kendaraan Roda Enam atau Lebih Periode Triwulan IV 2025

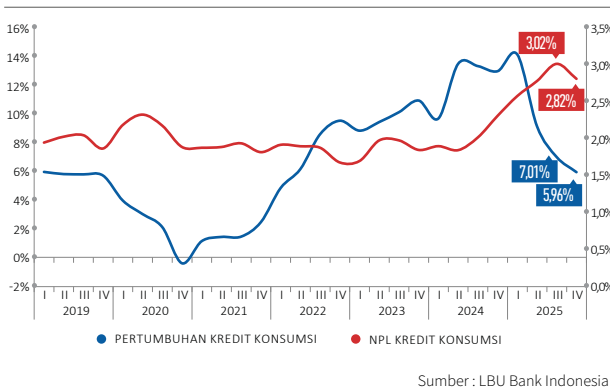
Kendaraan Roda Enam akibat menurunnya kegiatan pertambangan batubara.

Perlambatan penyaluran Kredit Konsumsi yang lebih dalam tertahan oleh pertumbuhan KPR. Pada triwulan IV 2025, Kredit Kepemilikan Rumah (KPR) tumbuh 7,50% (yoy), meningkat dibanding triwulan III 2025 yang tumbuh sebesar 6,16% (yoy). Lebih tingginya pertumbuhan KPR didorong oleh meningkatnya penyaluran Kredit KPR tipe 22 s.d. 70 m² serta Kredit Rumah Tinggal Tipe Diatas 70 m². Kredit untuk Rumah Tinggal Tipe 22 s.d. 70 m² yang memiliki pangsa terbesar (93,10%) dalam penyaluran KPR tumbuh 8,58% (yoy), lebih tinggi dibandingkan dengan triwulan sebelumnya yang tumbuh 7,16% (yoy). (Grafik 4.3). Selain itu, Kredit untuk Rumah Tinggal Tipe Diatas 70 m² tumbuh sebesar 5,18% (yoy), lebih tinggi dibandingkan triwulan sebelumnya sebesar 4,97% (yoy).



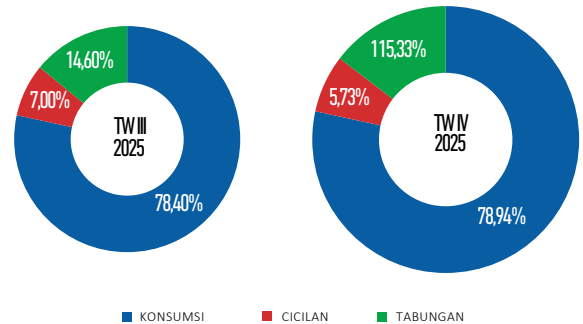
Grafik 4.4 Pertumbuhan Kredit Konsumsi – Kredit Pemilikan Rumah, KPR Tipe 22 s.d. 70 dan Kredit Pemilikan Rumah Tipe diatas 70.

Perlambatan Kredit Konsumsi diikuti oleh penurunan risiko kredit. Pada triwulan IV 2025, NPL Kredit Konsumsi menurun menjadi sebesar 2,82% dibanding triwulan sebelumnya dengan NPL sebesar 3,02% (Grafik 4.5).



Grafik 4.5 Pertumbuhan dan NPL Kredit Konsumsi Periode Triwulan IV 2025

Penurunan NPL utamanya terjadi pada segmen kredit KPR, khususnya Tipe 22 s.d 70 m² akibat kemampuan bayar debitur berpenghasilan rendah hingga menengah yang meningkat.

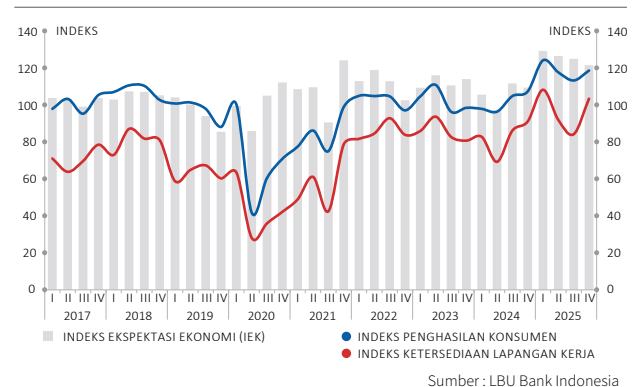


Sumber : Survei Konsumen (diolah)

Grafik 4.6 Presentase Penggunaan Penghasilan RT Periode Triwulan IV 2025

Kredit Konsumsi yang melambat pada triwulan IV 2025 juga sejalan dengan peningkatan preferensi untuk menabung serta cicilan. Berdasarkan Survei Konsumen (SK) Bank Indonesia pada triwulan IV 2025, penggunaan penghasilan untuk konsumsi tercatat meningkat terbatas sebesar 78,94% dibandingkan triwulan sebelumnya sebesar 78,40%. Penggunaan penghasilan untuk tabungan di sisi lain meningkat dari 14,60% menjadi 15,33%. Sementara itu, penggunaan penghasilan untuk cicilan menurun dari 7,00% menjadi 5,73% (Grafik 4.6).

Pertumbuhan penyaluran Kredit Konsumsi yang melambat sejalan dengan menurunnya Indeks Ekspektasi Ekonomi pada triwulan berjalan. Pada triwulan IV 2025, Indeks Ekspektasi Ekonomi tercatat sebesar 122,36, lebih rendah dibandingkan triwulan sebelumnya yang tercatat sebesar 125,80 (Grafik 4.7). Masyarakat diperkirakan lebih berhati-hati dalam mengakses pembiayaan dari



Grafik 4.7 Indeks Penghasilan Konsumen & Ketersediaan Lapangan Kerja Saat Ini Periode Triwulan IV 2025

Tabel 4.2 Perubahan Tingkat Pendapatan RT Triwulan IV 2025

KONDISI PENGHASILAN RT	TW III'24	TW IV'24	TW I'25	TW II'25	TW III'25	TW IV'25
Meningkat cukup banyak	0,4%	0,8%	2,9%	3,8%	1,7%	0,8%
Sedikit meningkat	19,6%	22,5%	39,2%	37,9%	30,4%	41,3%
Sama	57,1%	62,5%	47,5%	32,5%	45,4%	42,1%
Sedikit menurun	20,8%	13,3%	10,0%	24,2%	22,1%	13,8%
Menurun cukup banyak	4,2%	0,8%	0,4%	1,7%	0,4%	2,1%

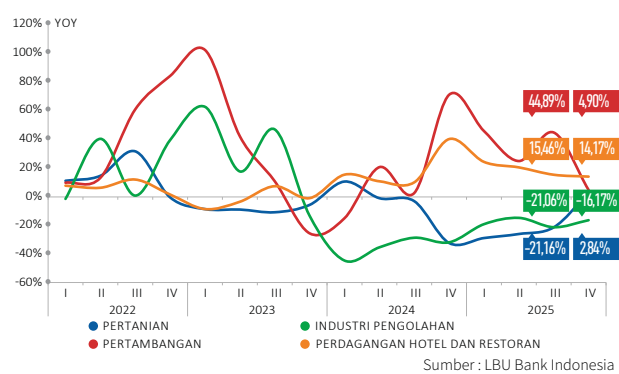
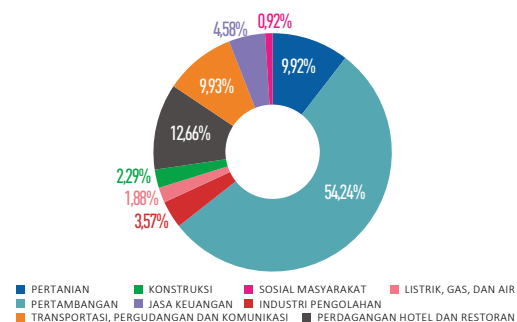
Sumber: Survei Konsumen, Bank Indonesia (Diolah)

perbankan untuk keperluan konsumsi, sejalan dengan perlambatan indeks ekspektasi kedepan tersebut, walaupun masih tergolong optimis. Hal ini terkonfirmasi dari penurunan responden yang menjawab pendapatan menurun (“menurun cukup banyak”) pada triwulan IV 2025 dibandingkan dengan triwulan III 2025.

4.1.2 Pembiayaan Korporasi

Penyaluran Kredit Korporasi pada triwulan IV 2025 mengalami pertumbuhan sebesar 6,24% (yoy) atau dengan *outstanding* senilai Rp53,81 triliun, melambat dibandingkan dengan triwulan sebelumnya yang juga tumbuh sebesar 21,67% (yoy) atau dengan *outstanding* senilai Rp52,13 triliun. Perlambatan Kredit Korporasi bersumber dari LU Pertambangan yang termoderasi sehingga tumbuh sebesar 4,90%% (yoy), lebih rendah dibandingkan triwulan sebelumnya yang tumbuh 44,89% (yoy). Selain itu, pertumbuhan yang melambat ini juga didorong oleh perlambatan Kredit LU Perdagangan. LU tersebut tumbuh 14,17% (yoy). lebih rendah dibandingkan triwulan sebelumnya yang tumbuh sebesar 15,46 (yoy) (Grafik 4.8). Namun, pertumbuhan yang lebih rendah tertahan oleh penyaluran kredit pada LU Pertanian yang kembali tumbuh sebesar 2,84% (yoy) setelah mengalami kontraksi sebesar 21,16% (yoy) seiring dengan prospek kinerja LU Pertanian yang membaik. Lebih lanjut, Kredit Industri Pengolahan juga mengalami perbaikan kontraksi sebesar 16,17% yoy, setelah sebelumnya mengalami kontraksi sebesar 21,06% (yoy) (Grafik 4.8).

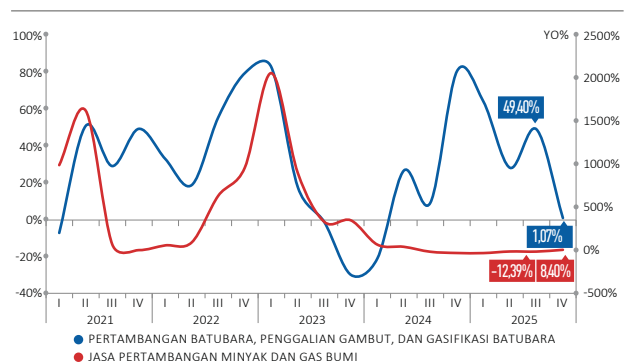
Berdasarkan pangsaanya, Kredit Korporasi paling besar disalurkan kepada LU Pertambangan. Pada triwulan IV 2025, mayoritas Kredit Korporasi disalurkan pada sektor utama, yaitu LU Pertambangan (pangsa 54,24%), LU Perdagangan, Hotel, dan Restoran (pangsa 12,65%), LU Transportasi dan Pergudangan (pangsa 9,93%), dan LU Pertanian (pangsa 9,92%) (Grafik 4.9).

**Grafik 4.8** Pertumbuhan Kredit Korporasi Berdasarkan Lapangan Usaha Ekonomi Utama Periode Triwulan IV 2025

Sumber: LBU Bank Indonesia

Grafik 4.9 Komposisi Kredit Korporasi Periode Triwulan IV 2025

Perlambatan kredit di LU Pertambangan terutama didorong oleh melambatnya penyaluran kredit pada sub-Lapangan Usaha (Sub-LU) Pertambangan Batu Bara, Penggalian Gambut, dan Gasifikasi Batu Bara yang memiliki proporsi terbesar pada LU pertambangan (proporsi sebesar 89,22%) yang tumbuh 1,07% (yoy) atau dengan *outstanding* senilai Rp26,03 triliun, melambat dibandingkan triwulan sebelumnya yang tumbuh 49,40% (yoy) atau dengan *outstanding* senilai Rp25,19 triliun. Di sisi lain, perlambatan Kredit Korporasi pada LU Pertambangan tertahan oleh kinerja Sub-LU Jasa Pertambangan Minyak dan Gas Bumi yang tumbuh 8,40%



Sumber: LBU Bank Indonesia

Grafik 4.10 Pertumbuhan Kredit Korporasi sub-LU Pertambangan dan Penggalian Periode Triwulan IV 2025

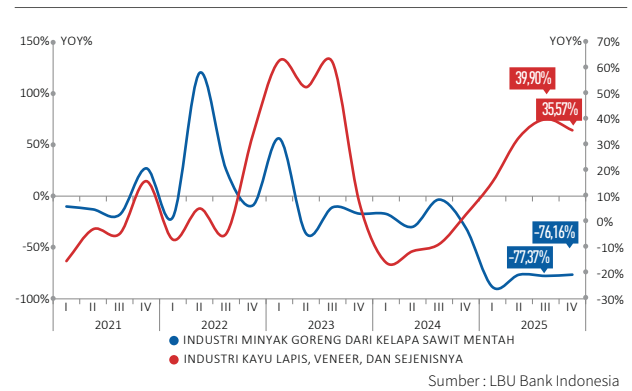
(yoy) dengan *outstanding* Rp2,22 Triliun, lebih tinggi dibandingkan triwulan sebelumnya yang berkontraksi 12,39% yoy dengan *outstanding* Rp2,01 Triliun (Grafik 4.10).

Lebih lanjut, perbaikan kontraksi Kredit Sektor Pertanian utamanya didorong oleh Sub-LU Perkebunan Kelapa Sawit. Kredit di subsektor ini (pangsa sebesar 87,96%) mengalami perbaikan kontraksi menjadi sebesar 19,64% (yoy) dengan *outstanding* Rp4,69 triliun, tidak sedalam triwulan sebelumnya yang berkontraksi 36,66% (yoy) dengan *outstanding* Rp4,74 triliun. Perbaikan kontraksi LU Pertanian tertahan oleh semakin dalam kontraksi kredit Sub-LU Pengusahaan Hutan Alam (pangsa kedua terbesar sebesar 1,96%). Kredit pada Sub-LU ini kontraksi 42,99% dengan *outstanding* Rp108,97 miliar pada triwulan III 2025, berkontraksi lebih dalam sebesar 48,11% (yoy) dengan *outstanding* Rp104,43 miliar pada triwulan IV 2025. (Grafik 4.11).



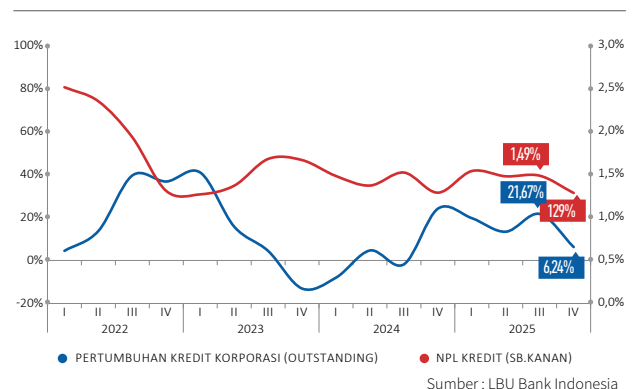
Grafik 4.11 Pertumbuhan Kredit Korporasi Sub-LU Pertanian Periode Triwulan IV 2025

Perbaikan kinerja Kredit Korporasi LU Industri Pengolahan utamanya disebabkan oleh membaiknya penyaluran kredit pada Sub-LU Industri Minyak Goreng dari Kelapa Sawit. Kredit Sub-LU ini (pangsa 7,02%) berkontraksi sebesar 76,16% (yoy) atau dengan *outstanding* senilai Rp134,75 miliar, tidak lebih dalam dibandingkan triwulan III 2025 yang berkontraksi 77,37% (yoy) atau dengan *outstanding* senilai Rp184,65 miliar. Sementara itu, Sub-LU Industri Kayu Lapis, Veneer, dan Sejenisnya (pangsa 53,97%) tercatat mengalami pertumbuhan sebesar 35,57% (yoy) atau dengan *outstanding* senilai Rp1,03 triliun, lebih rendah dibandingkan dengan triwulan III 2025 yang tumbuh 39,90% (yoy) atau dengan *outstanding* senilai Rp976,93 miliar (Grafik 4.12).



Grafik 4.12 Pertumbuhan Kredit Korporasi sub-LU Industri Pengolahan Periode Triwulan IV 2025

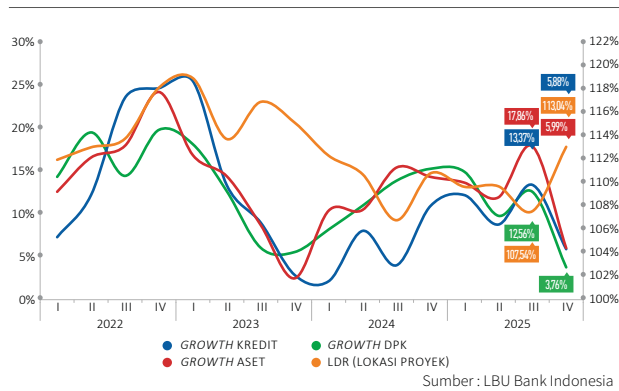
Kualitas Kredit Korporasi terjaga di level yang rendah. Pada triwulan IV 2025, NPL kredit korporasi tercatat sebesar 1,29%, membaik dibandingkan dengan triwulan sebelumnya sebesar 1,49% (Grafik 4.13). Penurunan NPL ini terjadi pada sektor industri perdagangan dimana NPL turun dari 3,81% pada triwulan III 2025 menjadi 2,51% pada triwulan laporan.



Grafik 4.13 NPL Kredit Korporasi Periode Triwulan IV 2025

4.1.3 Total Aset dan Intermediasi Perbankan

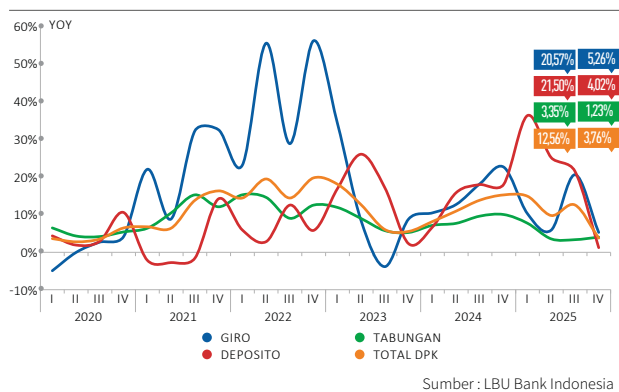
Pada triwulan IV 2025, Total Aset Perbankan di Kalimantan Selatan tumbuh sebesar 5,99% (yoy) atau senilai Rp123,40 triliun, meningkat dibandingkan dengan triwulan sebelumnya yang tumbuh 17,86% (yoy) atau senilai Rp133,72 triliun. Dana Pihak Ketiga (DPK) tercatat tumbuh 3,76% (yoy) dengan nilai Rp95,83 triliun, menurun dibandingkan dengan triwulan sebelumnya yang tumbuh 12,56% (yoy) dengan nilai Rp98,97 triliun (Grafik 4.14). Di sisi lain, penyaluran kredit juga tercatat tumbuh 5,88% (yoy) dengan nilai Rp108,33 triliun, lebih rendah dibandingkan triwulan sebelumnya yang tumbuh 13,37% (yoy) atau senilai dengan Rp103,60 triliun (Grafik 4.14). Seiring dengan perkembangan tersebut, fungsi intermediasi perbankan yang tercermin



Grafik 4.14 Pertumbuhan Aset, DPK, Kredit dan LDR Periode Triwulan IV 2025

dari perbandingan antara Penyaluran Kredit/Pembiayaan terhadap Penghimpunan Dana Pihak Ketiga (DPK) atau disebut *Loan-to-Deposit Ratio* (LDR) berdasarkan lokasi proyek di Provinsi Kalimantan Selatan mengalami sedikit peningkatan, menandakan pertumbuhan kredit yang lebih tinggi dibandingkan penghimpunan DPK. Hal tersebut mengindikasikan peningkatan fungsi intermediasi, menyebabkan likuiditas perbankan relatif tumbuh terbatas dibandingkan triwulan sebelumnya. LDR tercatat sebesar 113,04% (yoy), sedikit lebih rendah dibandingkan dengan triwulan sebelumnya yang sebesar 107,54% (yoy).

Perlambatan DPK didorong oleh pertumbuhan Giro dan Deposito yang melambat sejalan dengan siklus anggaran pemerintah daerah serta meningkatnya realisasi belanja pemerintah daerah di akhir tahun. Pada triwulan IV 2025, Giro tumbuh 5,26% (yoy) dengan *outstanding* Rp28,55 triliun, meningkat dibandingkan triwulan sebelumnya yang tumbuh 20,57% (yoy) dengan *outstanding* Rp25,73 triliun. Selain itu, Deposito tercatat tumbuh 1,23% (yoy) dengan *outstanding* Rp20,88 triliun, lebih rendah dibandingkan triwulan sebelumnya yang tumbuh 21,50% (yoy).

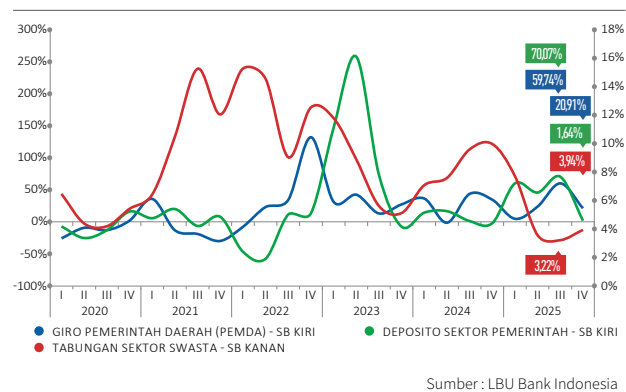


Grafik 4.15 Pertumbuhan DPK Periode Triwulan IV 2025

(yoy) dengan *outstanding* Rp29,61 triliun. Pertumbuhan DPK yang lebih rendah tertahan oleh melambatnya tabungan. Tabungan tumbuh 4,02% (yoy) dengan *outstanding* Rp46,39 triliun, melambat dibandingkan triwulan sebelumnya yang tumbuh 3,35% (yoy) dengan *outstanding* Rp43,61 triliun. (Grafik 4.15).

Peningkatan Giro utamanya bersumber dari Giro Pemerintah. Pada triwulan laporan, Giro Pemerintah Daerah tumbuh 20,91% (yoy) dengan *outstanding* Rp11,28 triliun, lebih tinggi dibandingkan triwulan sebelumnya yang tumbuh 59,74% (yoy) dengan *outstanding* Rp12,92 triliun. Selain itu, Giro BUMD juga turut mendorong pertumbuhan Giro Sektor Pemerintah. Giro BUMD tumbuh 17,76% (yoy) dengan *outstanding* Rp280,39 miliar pada triwulan laporan, lebih tinggi dibandingkan triwulan III 2025 yang terkontraksi 11,30% (yoy) dengan *outstanding* Rp271,43 miliar. Selain itu, Deposito juga melambat terutama bersumber dari Deposito pada sektor pemerintah sejalan dengan siklus anggaran akhir tahun. Deposito dari Sektor Pemerintah (pangsa 24,50%) tercatat tumbuh 1,64% (yoy) dengan *outstanding* senilai Rp1,52 triliun, lebih rendah dibandingkan triwulan sebelumnya yang tumbuh 70,07% (yoy) dengan *outstanding* senilai Rp9,11 triliun.

Di sisi lain, perlambatan DPK tertahan oleh Tabungan yang tumbuh lebih tinggi. Peningkatan pada Tabungan bersumber dari pertumbuhan Tabungan Sektor Swasta. Golongan pemilik Tabungan Sektor Swasta (pangsa 99,58%) tumbuh 3,94% (yoy) dengan *outstanding* senilai Rp46,20 triliun, melambat dibandingkan triwulan sebelumnya yang tumbuh 3,22% (yoy) dengan *outstanding* senilai Rp43,44 triliun. (Grafik 4.16)



Grafik 4.16 Pertumbuhan Giro Pemda, Deposito Pemerintah, dan Tabungan Swasta Periode IV 2025

Secara spasial, sebagian besar DPK terhimpun di kota Banjarmasin. DPK di Kota Banjarmasin tercatat sebesar Rp57,78 triliun atau dengan proporsi 60,30%, diikuti Kab. Tanah Bumbu Rp6,89 triliun (proporsi 7,19%, Kota Banjarbaru Rp6,47 triliun (proporsi 6,76%), dan Kab. Banjar Rp4,16 triliun (proporsi 4,53%) (Tabel 4.2). Dari sisi kinerja, pertumbuhan DPK tertinggi pada triwulan IV 2025 berada di Kab. Tanah Bumbu sebesar 35,18% (yoy); sementara pertumbuhan DPK terendah pada triwulan IV

2025 berada di Kab. Kotabaru yang terkontraksi 52,67% (yoy) (Tabel 4.2).

Dari sisi pembiayaan, Kredit Perbankan pada triwulan IV 2025 tumbuh 5,88% (yoy) atau dengan *outstanding* senilai Rp108,32 triliun, lebih rendah dibandingkan triwulan sebelumnya yang dapat tumbuh 13,36% (yoy) atau dengan *outstanding* senilai Rp106,43 triliun (Grafik 4.17).

Tabel 4.2 Perkembangan DPK di Kalimantan Selatan secara Spasial Periode Triwulan IV 2025 (Lokasi KC/KCP)

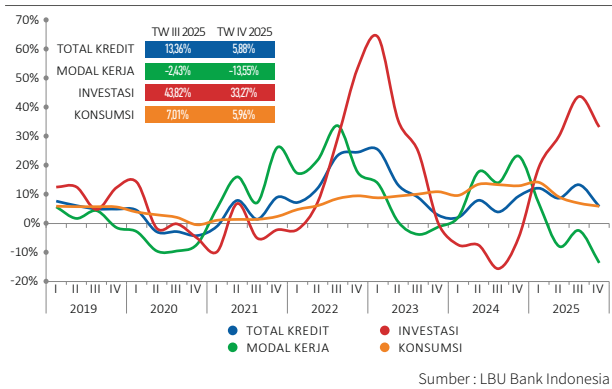
NO	KABUPATEN/KOTA	DPK TW IV 2024	PERTUMBUHAN		
		RP. (MILIAR)	TW III 2025 (YOY)	TW IV 2025 (YOY)	ARAH PERTUMBUHAN
1	Kab. Banjar	4.167,99	8,71%	1,39%	↓
2	Kab. Tanah Laut	2.136,71	11,22%	-2,50%	↓
3	Kab. Tapin	2.964,99	13,49%	33,57%	↑
4	Kab. Hulu Sungai Selatan	1.943,90	12,86%	10,28%	↓
5	Kab. Hulu Sungai Tengah	2.471,69	-0,08%	-6,80%	↓
6	Kab. Hulu Sungai Utara	2.294,31	32,41%	10,93%	↓
7	Kab. Barito Kuala	1.084,71	-0,14%	3,56%	↑
8	Kab. Kota Baru	1.853,94	-29,08%	-52,67%	↓
9	Kab. Tabalong	4.349,88	35,52%	13,71%	↓
10	Kab. Tanah Bumbu	6.893,56	27,17%	35,18%	↑
11	Kab. Balangan	1.412,99	23,88%	16,19%	↓
12	Kota Banjarmasin	57.784,05	11,75%	2,14%	↓
13	Kota Banjarbaru	6.475,68	19,54%	14,07%	↓
Prov. Kalimantan Selatan		95.834,40	12,56%	3,76%	↓

Sumber: LBU Bank Indonesia
Angka dalam Rp Miliar

Tabel 4.3 Perkembangan DPK di Kalimantan Selatan secara Spasial Periode Triwulan IV 2025 (Lokasi KC/KCP)

NO	KABUPATEN/KOTA	KREDIT TW IV 2024	PERTUMBUHAN		
		RP. (MILIAR)	TW III 2025 (YOY)	TW IV 2025 (YOY)	ARAH PERTUMBUHAN
1	Kab. Banjar	18.003,67	16,37%	21,87%	↑
2	Kab. Tanah Laut	11.143,50	65,79%	1,86%	↓
3	Kab. Tapin	6.891,82	21,70%	2,44%	↓
4	Kab. Hulu Sungai Selatan	2.064,30	-3,95%	-2,98%	↑
5	Kab. Hulu Sungai Tengah	2.029,77	5,65%	4,15%	↓
6	Kab. Hulu Sungai Utara	2.017,97	5,34%	2,68%	↓
7	Kab. Barito Kuala	3.723,57	-1,18%	-1,50%	↓
8	Kab. Kota Baru	7.421,40	16,40%	48,84%	↑
9	Kab. Tabalong	4.703,21	-14,31%	-7,73%	↓
10	Kab. Tanah Bumbu	9.113,94	-2,71%	-16,74%	↓
11	Kab. Balangan	872,73	7,51%	-1,13%	↓
12	Kota Banjarmasin	32.410,63	14,97%	5,79%	↓
13	Kota Banjarbaru	7.935,01	6,32%	5,73%	↓
Prov. Kalimantan Selatan		108.331,57	13,36%	5,88%	↓

Sumber: LBU Bank Indonesia
Angka dalam Rp Miliar



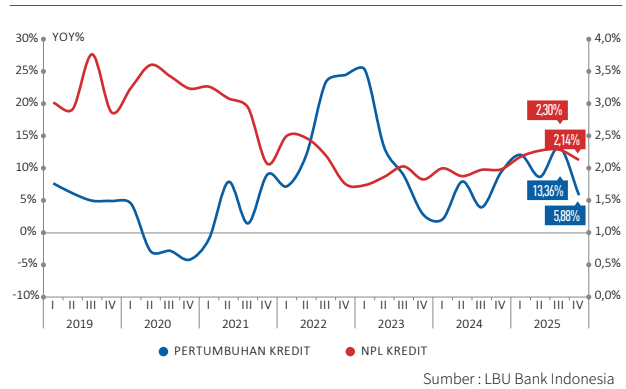
Grafik 4.17 Pertumbuhan Kredit Periode Triwulan IV 2025

Pertumbuhan kredit yang melambat tersebut bersumber dari perlambatan pertumbuhan pada seluruh jenis penggunaan kredit. Kredit Investasi (KI) tumbuh kuat namun termoderasi sebesar 33,27% (yoy) dengan *outstanding* Rp37,87 triliun pada triwulan IV 2025, setelah triwulan sebelumnya juga mengalami pertumbuhan sebesar 43,82% (yoy) dengan *outstanding* Rp36,46 triliun. Lebih lanjut, penyaluran Kredit Modal Kerja (KMK) berkontraksi lebih dalam sebesar 13,55% (yoy) dengan *outstanding* Rp34,76 triliun, lebih rendah daripada triwulan sebelumnya yang mengalami kontraksi sebesar 2,43% (yoy) dengan *outstanding* Rp34,81 triliun.

Selain itu, pertumbuhan kredit yang melambat juga dipengaruhi oleh kinerja Kredit Konsumsi. Pada triwulan IV 2025, Kredit Konsumsi melambat sebesar 5,96% (yoy) dengan *outstanding* Rp35,69 triliun, lebih rendah dibandingkan dengan periode triwulan III 2025 yang mampu tumbuh sebesar 7,01% (yoy) dengan *outstanding* Rp34,46 triliun.

Secara spasial, kredit terbesar berada di Kota Banjarmasin dengan *outstanding* senilai Rp32,41 triliun (proporsi 29,92%); Kabupaten Banjar Rp18,03 triliun (proporsi 16,62%), Kabupaten Tanah Laut Rp11,14 triliun (proporsi 10,29%); Kabupaten Tanah Bumbu Rp9,11 triliun (proporsi 8,41%) (tabel 4.3). Lebih lanjut, pertumbuhan kredit tertinggi pada triwulan IV 2025 berada di Kabupaten Kota Baru sebesar 48,84% (yoy) terendah berada di Kabupaten Tabalong yang berkontraksi 7,73% (yoy).

Pada triwulan IV 2025, risiko kredit terjaga serta kualitas penyaluran kredit tercatat meningkat. Pada triwulan laporan, NPL mencapai 2,14%, sedikit lebih tinggi



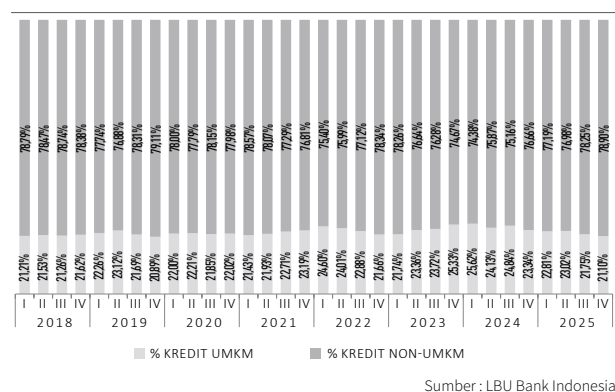
Grafik 4.18 Pertumbuhan dan NPL Kredit Periode Triwulan IV 2025

dibandingkan triwulan sebelumnya sebesar 2,30% (Grafik 4.18).

4.2 PENGEMBANGAN AKSES KEUANGAN DAN UMKM

4.2.1 Rasio Kredit UMKM

Pada triwulan IV 2025, penyaluran Kredit UMKM di Kalimantan Selatan berkontraksi 0,73% (yoy) atau dengan *outstanding* senilai Rp23,15 triliun, melambat dibandingkan dengan triwulan sebelumnya yang mampu tumbuh 3,74% (yoy) atau dengan *outstanding* senilai Rp23,15 triliun. Pangsa kredit UMKM terhadap total kredit pada triwulan III 2025 tercatat sebesar 21,75%, lebih rendah dibandingkan dengan pangsa pada triwulan sebelumnya sebesar 23,02% (Grafik 4.19).

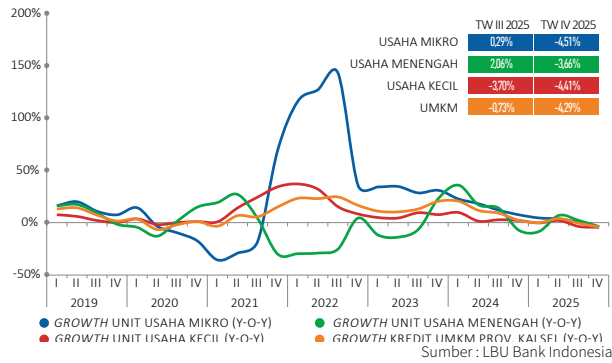


Grafik 4.19 Rasio Kredit UMKM Terhadap Total Kredit Periode Triwulan IV 2025

4.2.2 Penyaluran Kredit UMKM

Melambatnya penyaluran kredit UMKM terjadi di seluruh segmen. Pada triwulan laporan, Kredit Usaha Mikro berkontraksi 4,51% (yoy) dengan *outstanding* sebesar Rp10,18 triliun, melambat dibandingkan triwulan sebelumnya yang tumbuh 0,29% (yoy) dengan *outstanding* sebesar Rp10,49 triliun. Sementara itu, Kredit Usaha Kecil berkontraksi 4,41% (yoy) dengan *outstanding*

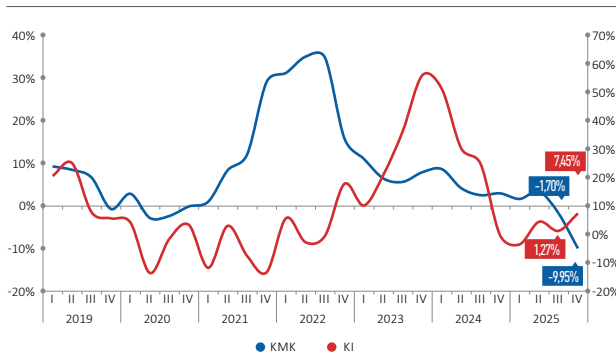
sebesar Rp7,71 triliun, lebih dalam dibandingkan triwulan sebelumnya yang berkontraksi 3,70% (yoy) dengan *outstanding* Rp7,78 triliun. Lebih lanjut, kredit usaha menengah berkontraksi 3,66% (yoy) dengan *outstanding* sebesar Rp4,95 triliun, melambat dibandingkan triwulan sebelumnya yang tumbuh 2,06% (yoy) dengan *outstanding* sebesar Rp4,88 triliun (Grafik 4.20).



Grafik 4.20 Pertumbuhan Kredit UMKM Berdasarkan Skala Usaha Periode Triwulan IV 2025

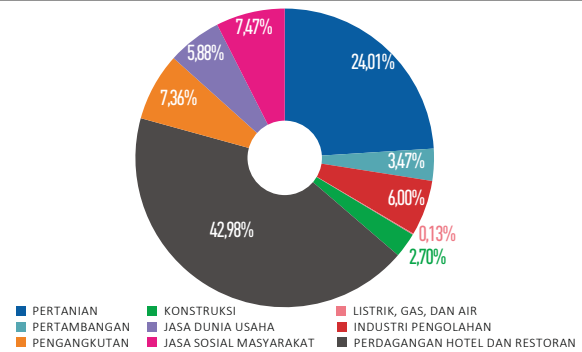
Berdasarkan jenis penggunaan, penyaluran Kredit UMKM pada triwulan IV 2025 mayoritas disalurkan pada Kredit Modal Kerja (KMK) dengan pangsa sebesar 63,51%, diikuti oleh Kredit Investasi (KI) sebesar 36,49%.

Pada triwulan IV 2025, penyaluran KMK UMKM mengalami kontraksi 9,95% (yoy) atau dengan *outstanding* senilai Rp14,51 triliun, lebih dalam dibandingkan dengan triwulan sebelumnya yang berkontraksi 1,70% (yoy) atau dengan *outstanding* senilai Rp15,42 triliun. Di sisi lain, perlambatan kredit UMKM tertahan oleh Kredit Investasi (KI) UMKM yang lebih tinggi. KI UMKM tumbuh sebesar 7,45% (yoy) atau dengan *outstanding* senilai Rp8,34 triliun, lebih tinggi dibandingkan dengan triwulan sebelumnya yang tumbuh 1,27% (yoy) atau dengan *outstanding* senilai Rp7,72 triliun (Grafik 4.21).



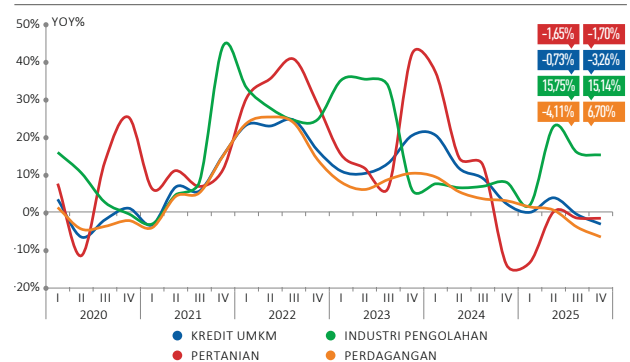
Grafik 4.21 Pertumbuhan Kredit UMKM Berdasarkan Jenis Penggunaan Periode Triwulan IV 2025

Secara sektoral, penyebab rendahnya pertumbuhan Kredit UMKM bersumber dari LU Perdagangan, Hotel dan Restoran. Pada triwulan IV 2025, Kredit sektor Perdagangan, Hotel, dan Restoran (Pangsa 42,98%) berkontraksi sebesar 6,70% (yoy). Selain sektor tersebut, sektor lainnya seperti Pertanian (Pangsa 24,01%) juga mengalami kontraksi sebesar 1,70% (yoy), dan Sektor Industri Pengolahan (Pangsa 6,00%) yang juga tumbuh melambat menjadi sebesar 15,14% (yoy). (Grafik 4.22).



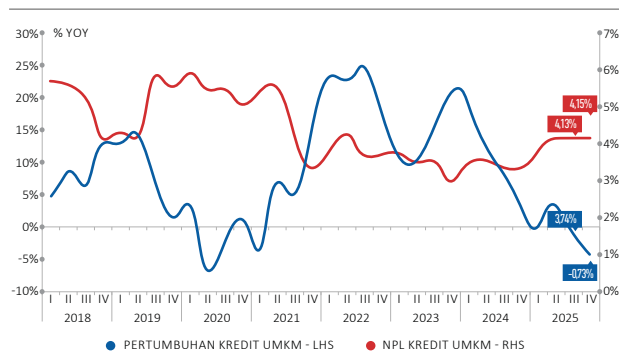
Grafik 4.22 Distribusi Kredit UMKM Berdasarkan Lapangan Usaha Periode Triwulan IV 2025

Kredit UMKM LU Perdagangan dengan pangsa terbesar berkontraksi 6,70% (yoy) dengan *outstanding* Rp9,82 triliun, lebih dalam dibanding dengan triwulan sebelumnya yang berkontraksi sebesar 4,11% (yoy) dengan *outstanding* Rp 9,92 triliun. Selain itu, LU Pertanian dengan pangsa kedua terbesar dalam kredit UMKM triwulan IV 2025 mengalami kontraksi sebesar 1,70% (yoy) dengan *outstanding* sebesar Rp5,48 triliun, lebih dalam dibanding triwulan sebelumnya yang berkontraksi sebesar 0,73% (yoy) dengan *outstanding* Rp5,63 triliun. Selain itu, LU Industri Pengolahan tumbuh namun melambat sebesar 15,14% (yoy) dengan *outstanding* Rp1,37 triliun, lebih rendah dibandingkan pertumbuhan pada triwulan sebelumnya sebesar 15,75% (yoy) dengan *outstanding* sebesar Rp1,36 triliun. (Grafik 4.23).



Grafik 4.23 Pertumbuhan Kredit UMKM Lapangan Usaha Utama Periode Triwulan IV 2025

Perlambatan Kredit UMKM diikuti dengan meningkatnya risiko kredit. Pada triwulan IV 2025, NPL UMKM sedikit meningkat menjadi sebesar 4,15%, lebih tinggi dibandingkan dengan triwulan sebelumnya sebesar 4,13% (Grafik 4.24). Peningkatan NPL ini utamanya bersumber dari peningkatan NPL LU Perdagangan dan Akmamin dari sebesar 5,25% pada triwulan IV 2025, menjadi sebesar 5,08% pada triwulan III 2025.

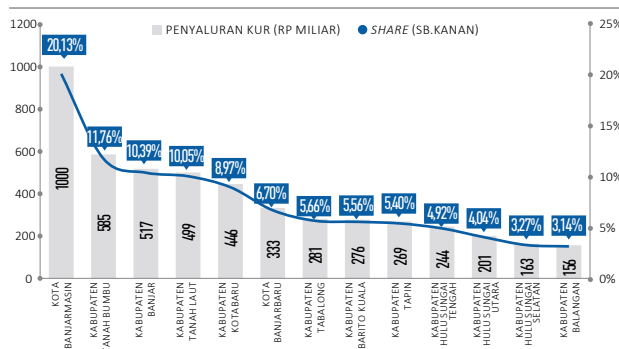


Sumber: LBU Bank Indonesia

Grafik 4.24 Pertumbuhan dan NPL Kredit UMKM Periode Triwulan IV 2025

4.2.3 Peningkatan Akses Keuangan UMKM

Dalam rangka mendukung penguatan UMKM di Kalimantan Selatan, pemerintah daerah terus mendorong penyaluran Pembiayaan Mikro dan Ultra Mikro oleh perbankan. Sampai dengan triwulan IV 2025, program KUR yang disalurkan di Kalimantan Selatan tercatat sebesar Rp4,97 triliun. Berdasarkan kabupaten/kota, realisasi KUR tertinggi terdapat di Kota Banjarmasin dengan proporsi 20,13% atau senilai Rp1,00 triliun, diikuti oleh Kabupaten Tanah Bumbu (proporsi 11,76% atau senilai Rp585,73 miliar), Kabupaten Banjar (dengan proporsi 10,39% atau senilai Rp516,73 miliar) dan Kabupaten Tanah Laut (dengan proporsi 10,05% atau senilai Rp499,42 miliar) (Grafik 4.25).

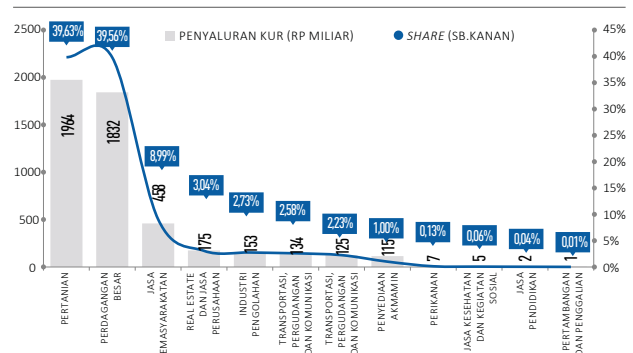


Sumber: DJPB Prov Kalsel

Grafik 4.25 Penyaluran KUR Berdasarkan Kabupaten/Kota Periode Triwulan IV 2025

Total debitur yang menerima manfaat KUR sampai dengan triwulan IV 2025 tercatat sebanyak 80,687 orang debitur dengan sebaran debitur terbanyak di Kota Banjarmasin mencapai 13,25 ribu debitur (dengan proporsi 16,43%).

Sebagian besar KUR disalurkan pada LU Pertanian dan Perdagangan. Pada triwulan IV 2025, LU Pertanian, Perburuan, dan Kehutanan menjadi LU dengan penyaluran KUR terbesar, yaitu senilai Rp1,96 triliun (pangsa 39,51%). Lebih lanjut, KUR dengan penyaluran terbesar kedua disalurkan pada LU Perdagangan Besar dan Eceran dengan proporsi mencapai 36,86% atau senilai Rp1,83 triliun; dan diikuti oleh LU Jasa Kemasyarakatan, Sosial Budaya, Hiburan, dan Perorangan Lainnya dengan proporsi mencapai 9,22% atau senilai Rp458,72 miliar dari total KUR yang disalurkan (Grafik 4.26).



Sumber: DJPB Prov Kalsel

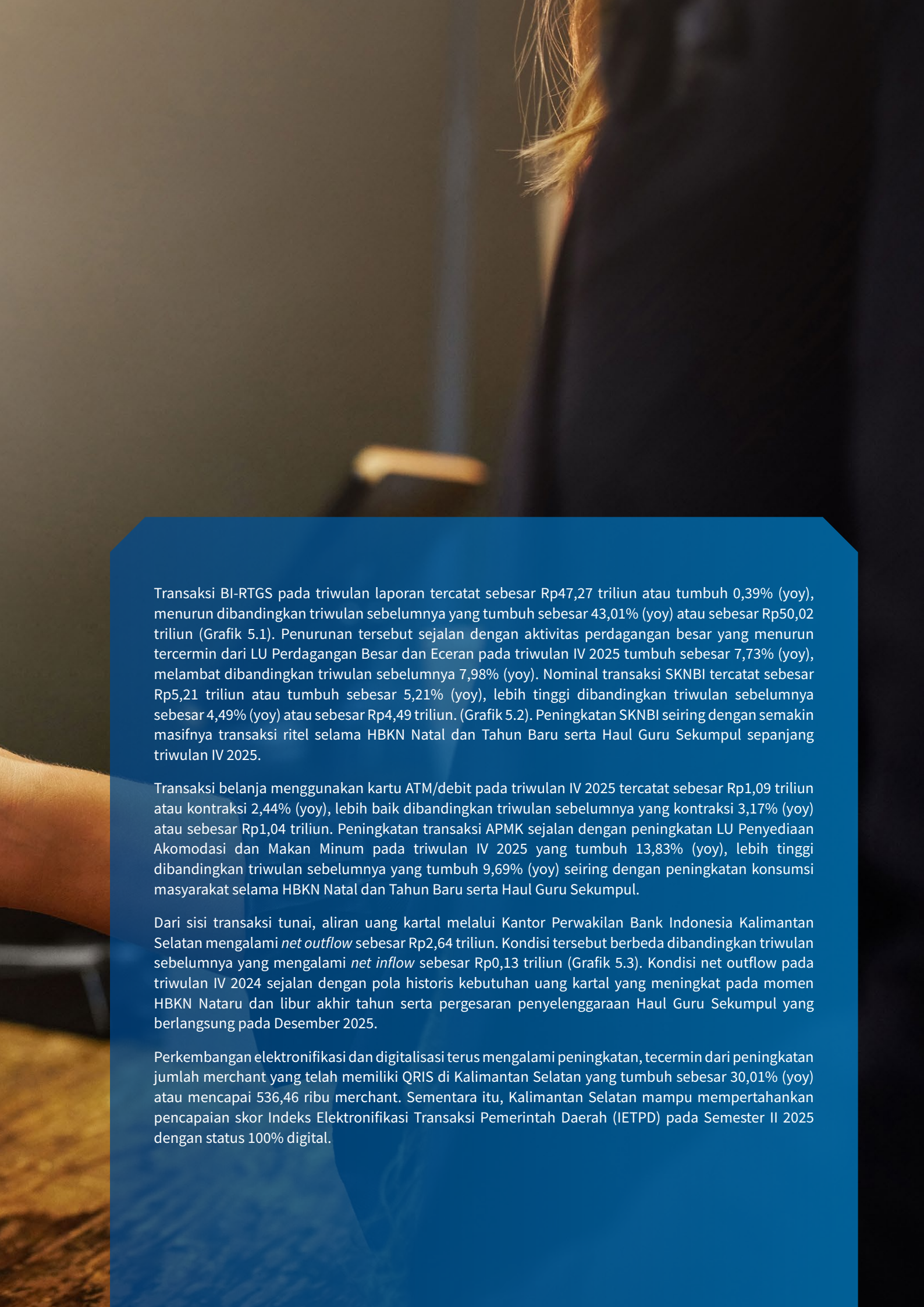
Grafik 4.26 Penyaluran KUR Berdasarkan Sektor Ekonomi Periode Triwulan IV 2025



05

Penyelenggaraan Sistem Pembayaran dan Pengelolaan Uang Rupiah





Transaksi BI-RTGS pada triwulan laporan tercatat sebesar Rp47,27 triliun atau tumbuh 0,39% (yoy), menurun dibandingkan triwulan sebelumnya yang tumbuh sebesar 43,01% (yoy) atau sebesar Rp50,02 triliun (Grafik 5.1). Penurunan tersebut sejalan dengan aktivitas perdagangan besar yang menurun tercermin dari LU Perdagangan Besar dan Eceran pada triwulan IV 2025 tumbuh sebesar 7,73% (yoy), melambat dibandingkan triwulan sebelumnya 7,98% (yoy). Nominal transaksi SKNBI tercatat sebesar Rp5,21 triliun atau tumbuh sebesar 5,21% (yoy), lebih tinggi dibandingkan triwulan sebelumnya sebesar 4,49% (yoy) atau sebesar Rp4,49 triliun. (Grafik 5.2). Peningkatan SKNBI seiring dengan semakin masifnya transaksi ritel selama HBKN Natal dan Tahun Baru serta Haul Guru Sekumpul sepanjang triwulan IV 2025.

Transaksi belanja menggunakan kartu ATM/debit pada triwulan IV 2025 tercatat sebesar Rp1,09 triliun atau kontraksi 2,44% (yoy), lebih baik dibandingkan triwulan sebelumnya yang kontraksi 3,17% (yoy) atau sebesar Rp1,04 triliun. Peningkatan transaksi APMK sejalan dengan peningkatan LU Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum pada triwulan IV 2025 yang tumbuh 13,83% (yoy), lebih tinggi dibandingkan triwulan sebelumnya yang tumbuh 9,69% (yoy) seiring dengan peningkatan konsumsi masyarakat selama HBKN Natal dan Tahun Baru serta Haul Guru Sekumpul.

Dari sisi transaksi tunai, aliran uang kartal melalui Kantor Perwakilan Bank Indonesia Kalimantan Selatan mengalami *net outflow* sebesar Rp2,64 triliun. Kondisi tersebut berbeda dibandingkan triwulan sebelumnya yang mengalami *net inflow* sebesar Rp0,13 triliun (Grafik 5.3). Kondisi net outflow pada triwulan IV 2024 sejalan dengan pola historis kebutuhan uang kartal yang meningkat pada momen HBKN Nataru dan libur akhir tahun serta pergesaran penyelenggaraan Haul Guru Sekumpul yang berlangsung pada Desember 2025.

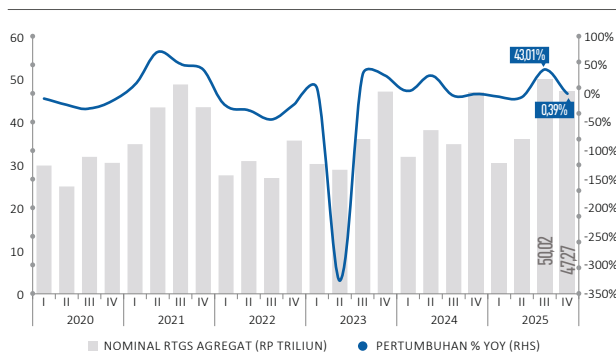
Perkembangan elektronifikasi dan digitalisasi terus mengalami peningkatan, tecermin dari peningkatan jumlah merchant yang telah memiliki QRIS di Kalimantan Selatan yang tumbuh sebesar 30,01% (yoy) atau mencapai 536,46 ribu merchant. Sementara itu, Kalimantan Selatan mampu mempertahankan pencapaian skor Indeks Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (IETPD) pada Semester II 2025 dengan status 100% digital.



5.1 PERKEMBANGAN SISTEM PEMBAYARAN DI KALIMANTAN SELATAN

5.1.1 Transaksi Bank Indonesia Real Time Gross Settlement (BI-RTGS)

Pada triwulan IV 2025, pertumbuhan nominal transaksi sistem pembayaran menggunakan Bank Indonesia Real Time Gross Settlement (BI-RTGS) mengalami penurunan. Transaksi BI-RTGS pada triwulan laporan tercatat sebesar Rp47,27 triliun atau tumbuh 0,39% (yoy), menurun dibandingkan triwulan sebelumnya yang tumbuh sebesar 43,01% (yoy) atau sebesar Rp50,02 triliun (Grafik 5.1). Penurunan tersebut sejalan dengan aktivitas perdagangan besar yang menurun tercermin dari LU Perdagangan Besar dan Eceran pada triwulan IV 2025 tumbuh sebesar 7,73% (yoy), melambat dibandingkan triwulan sebelumnya 7,98% (yoy).

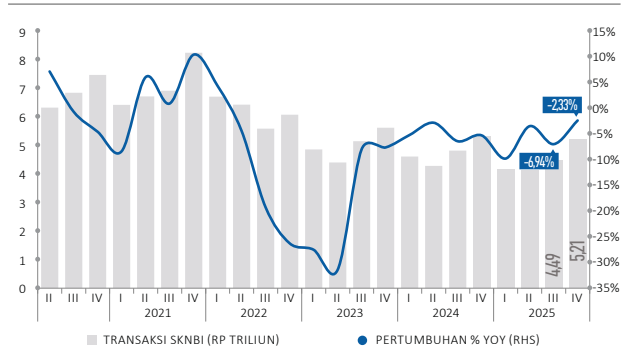


Sumber: Bank Indonesia, Transaksi RTGS

Grafik 5.1 Transaksi Bank Indonesia Real Time Gross Settlement (BI-RTGS)

5.1.2 Transaksi Sistem Kliring Nasional Bank Indonesia (SKNBI)

Berbeda dengan transaksi nilai besar (BI-RTGS), transaksi ritel yang diproses melalui SKNBI pada triwulan IV 2025 mengalami peningkatan. Nominal transaksi SKNBI tercatat sebesar Rp5,21 triliun atau tumbuh sebesar 5,21% (yoy), lebih tinggi dibandingkan triwulan sebelumnya sebesar 4,49% (yoy) atau sebesar Rp4,49 triliun. (Grafik 5.2). Peningkatan SKNBI seiring dengan semakin masifnya transaksi ritel selama HBKN Natal dan Tahun Baru serta Haul Guru Sekumpul sepanjang triwulan IV 2025.



Sumber: Bank Indonesia, Transaksi SKNBI

Grafik 5.2 Transaksi Sistem Kliring Nasional Bank Indonesia (SKNBI)

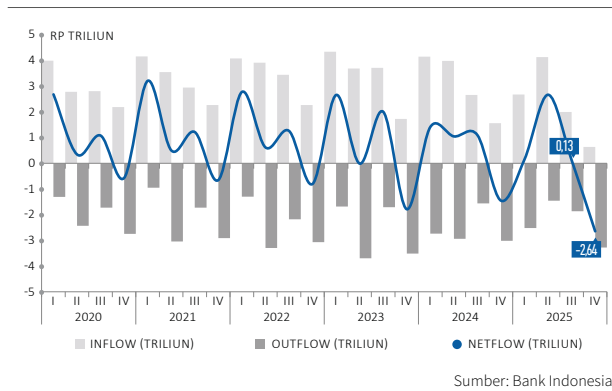
5.1.3 Transaksi Alat Pembayaran Menggunakan Kartu (APMK)

Transaksi belanja menggunakan kartu ATM/debit pada triwulan IV 2025 tercatat sebesar Rp1,09 triliun atau kontraksi 2,44% (yoy), lebih baik dibandingkan triwulan sebelumnya yang kontraksi 3,17% (yoy) atau sebesar Rp1,04 triliun. Peningkatan transaksi APMK sejalan dengan peningkatan LU Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum pada triwulan IV 2025 yang tumbuh 13,83% (yoy), lebih tinggi dibandingkan triwulan sebelumnya yang tumbuh 9,69% (yoy) seiring dengan peningkatan konsumsi masyarakat selama HBKN Natal dan Tahun Baru serta Haul Guru Sekumpul.

Sementara itu, penarikan tunai menggunakan kartu ATM pada triwulan IV 2025 tercatat sebesar Rp13,19 triliun atau tumbuh 0,54% (yoy), menurun dibandingkan triwulan sebelumnya yang tumbuh 2,79% (yoy) atau sebesar Rp13,12 triliun. Selanjutnya, transaksi belanja menggunakan kartu kredit pada triwulan IV 2025 tercatat sebesar Rp0,46 triliun atau tumbuh 0,02% (yoy), lebih rendah dibandingkan triwulan sebelumnya yang tumbuh 14,53% (yoy) atau sebesar Rp0,46 miliar.

5.1.4 Perkembangan Pengelolaan Uang Rupiah

Pada triwulan IV 2025, aliran uang kartal melalui Kantor Perwakilan Bank Indonesia Kalimantan Selatan mengalami *net outflow* sebesar Rp2,64 triliun. Kondisi tersebut berbeda dibandingkan triwulan sebelumnya yang mengalami *net inflow* sebesar Rp0,13 triliun (Grafik 5.3). Kondisi *net outflow* pada triwulan IV 2024 sejalan dengan pola historis kebutuhan uang kartal yang meningkat pada momen HBKN Nataru dan libur akhir tahun serta pergeseran penyelenggaraan Haul Guru Sekumpul yang berlangsung pada Desember 2025.



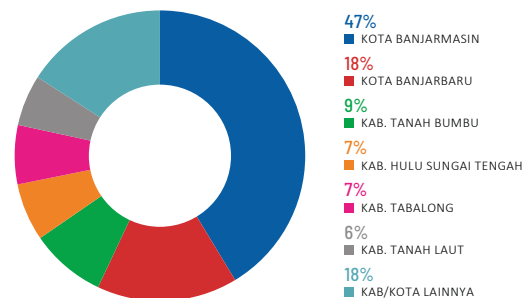
5.2 PERKEMBANGAN ELEKTRONIFIKASI DAN KEUANGAN INKLUSIF

5.2.1 Perkembangan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah

Bank Indonesia sebagai otoritas sistem pembayaran terus mendorong Gerakan Nasional Non Tunai (GNNT) melalui penggunaan instrumen non tunai (elektronifikasi), baik di lingkungan Pemerintah Daerah, masyarakat, serta penyaluran bantuan sosial. Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kalimantan Selatan bersama Pemerintah Daerah terus mendukung implementasi Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD) melalui Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) baik di tingkat Provinsi maupun Kabupaten/Kota. Indeks Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (IETPD) Kalimantan Selatan pada semester II 2025 tercatat sebesar 100% digital, berhasil mempertahankan pencapaian yang sama pada semester II 2024. Pencapaian tersebut didorong oleh implementasi kanal pembayaran digital pada transaksi Pemerintah Daerah khususnya penerimaan daerah dengan memanfaatkan berbagai kanal pembayaran seperti QRIS, *e-commerce*, *Electronic Data Capture* (EDC), serta kanal pembayaran lainnya. Upaya elektronifikasi tersebut meningkatkan kualitas pelayanan publik dan memperkuat aspek transparansi transaksi keuangan pemerintah daerah, mengoptimalkan sumber pendapatan daerah, serta memberikan kemudahan bertransaksi. Sampai dengan triwulan laporan, seluruh Pemerintah Daerah di Kalimantan Selatan telah berada dalam kategori digital.

5.2.2 Implementasi QRIS di Wilayah Kalimantan Selatan

Pada triwulan IV 2025, jumlah *merchant* yang telah memiliki QRIS di Kalimantan Selatan tumbuh lebih tinggi dibandingkan triwulan sebelumnya. Jumlah *merchant* QRIS tumbuh 30,01% (yoy) atau mencapai 536,46 ribu *merchant*, lebih tinggi dibandingkan dengan triwulan sebelumnya yang tumbuh 27,75% (yoy) atau mencapai 498,29 ribu *merchant* . Peningkatan tersebut sejalan dengan upaya Bank Indonesia dalam mendorong elektronifikasi di masyarakat. Secara spasial, jumlah *merchant* QRIS terbanyak terdapat di Kota Banjarmasin dan Kota Banjarbaru¹ (Grafik 5.4).



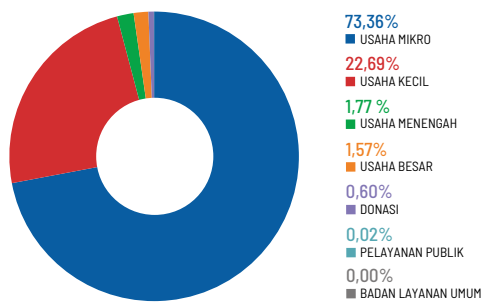
Sumber: Bank Indonesia

Grafik 5.4 Jumlah Merchant QRIS Berdasarkan Kota/Kabupaten

Dominasi jumlah *merchant* QRIS di kedua kota ini sejalan dengan posisi kedua daerah yang merupakan sentra ekonomi (Banjarmasin) serta sentra pemerintahan (Banjarbaru) di Provinsi Kalimantan Selatan. Tingginya aktivitas ekonomi pada dua kota tersebut juga ditopang banyaknya *merchant* pusat hiburan dan belanja yang telah memanfaatkan QRIS sebagai instrumen pembayaran untuk mempermudah transaksi masyarakat. Selain itu, penetrasi QRIS yang tinggi juga merupakan hasil kolaborasi yang baik antara Bank Indonesia, perbankan dan Pemerintah Daerah dalam memperkenalkan QRIS sebagai alternatif pembayaran nontunai yang CeMuMuAH (Cepat, Mudah, Murah, Aman, dan Handal).

Sementara itu, berdasarkan skala usahanya, Usaha Mikro (UMI) tercatat sebagai segmen usaha yang memiliki jumlah *merchant* QRIS terbanyak. Pada triwulan IV 2025, tercatat sebanyak 393,52 ribu *merchant* kategori UMI atau sebesar 73,36% dari total jumlah *merchant* QRIS, diikuti

1 Pada triwulan IV 2025, jumlah *merchant* QRIS di Kota Banjarmasin dan Kota Banjarbaru masing-masing sebanyak 205.983 *merchant* dan 78.064 *merchant*.



Sumber: Bank Indonesia

Grafik 5.5 Jumlah Merchant QRIS Menurut Skala Usaha

oleh Usaha Kecil (UKE) dengan 121,71 ribu *merchant* (22,69%). (Grafik 5.5)

Selain itu, untuk meningkatkan volume transaksi dan pengguna baru QRIS, dilakukan berbagai upaya sosialisasi maupun edukasi oleh KPwBI Provinsi Kalimantan Selatan. Pada triwulan IV 2025, KPwBI Provinsi Kalimantan Selatan melaksanakan sosialisasi dan edukasi seputar QRIS, Cinta Bangsa dan Paham Rupiah (CBP), dan Perlindungan Konsumen (PeKA) ke berbagai sekolah dan universitas di Kalimantan Selatan. Kegiatan tersebut bertujuan memperkenalkan dan mengedukasi masyarakat mengenai kemudahan dan keunggulan transaksi digital yang ditawarkan oleh QRIS, termasuk aspek perlindungan konsumen. Pelaksanaan kampanye tersebut bertujuan memperluas akseptasi QRIS, peningkatan literasi Ekonomi dan Keuangan Digital (EKD) serta CBP Rupiah. Selain itu, sebagai upaya mendorong transformasi ekonomi digital di Kalimantan Selatan, telah dilakukan rangkaian kegiatan Festival Antasari (Akselerasi, dan Transformasi Digital Terkini) 2025.

Selanjutnya, guna mendukung program nasional 58 juta pengguna QRIS pada tahun 2025, KPwBI Provinsi Kalimantan Selatan melanjutkan kerja sama dengan berbagai instansi dan lembaga serta melakukan sosialisasi kepada berbagai kalangan masyarakat, seperti melalui media sosial KPwBI Provinsi Kalimantan Selatan, kegiatan Pekan QRIS Nasional (PQN), dan rangkaian Festival Antasari tahun 2025 dengan *output* adanya peningkatan transaksi QRIS secara volume dan nominal transaksi serta pengguna baru. Hingga triwulan IV 2025, terdapat 801.127 pengguna QRIS di Kalimantan Selatan tumbuh 6,69% (*yoy*), melambat dibandingkan dengan triwulan sebelumnya yang tumbuh 8,54% (*yoy*).

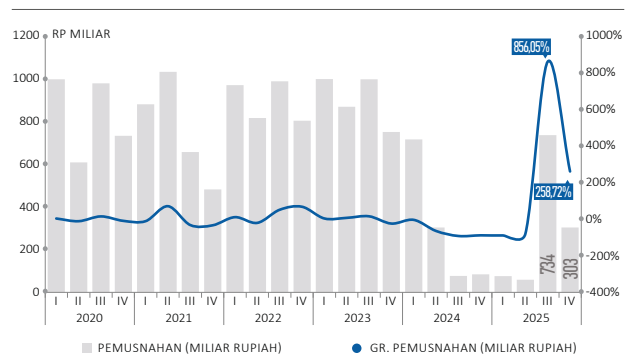
5.3 UPAYA MENJAGA KELANCARAN SISTEM PEMBAYARAN

KPwBI Provinsi Kalimantan Selatan senantiasa menciptakan inovasi dan terobosan untuk meningkatkan layanan sistem pembayaran tunai.

Beberapa hal yang telah dilakukan antara lain kerja sama penukaran uang pecahan kecil dengan perbankan; optimalisasi kas titipan dan kas keliling; dan melakukan supervisi terhadap Kegiatan Usaha Penukaran Valuta Asing (KUPVA) Bukan Bank. KPwBI Provinsi Kalimantan Selatan terus melakukan pengawasan rutin secara langsung (*on-site inspection*) maupun tidak langsung (*off-site inspection*) terhadap Kegiatan Usaha Penukaran Valuta Asing (KUPVA) Bukan Bank sebagai upaya menanggulangi risiko Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU-PPT). Saat ini, terdapat 1 KUPVA Bukan Bank terdaftar di wilayah Kalimantan Selatan.

5.3.1 Penyediaan Uang Rupiah

Bank Indonesia secara rutin melakukan kegiatan penarikan uang Rupiah yang tidak layak edar, pengolahan uang Rupiah, serta menggantinya dengan uang Rupiah layak edar sebagai bentuk penerapan *clean money policy*. Hal ini dilakukan untuk menjamin ketersediaan dan meningkatkan standar kualitas uang yang diedarkan ke masyarakat. Penerapan *clean money policy* melalui pemusnahan uang Rupiah tidak layak edar pada triwulan IV 2025 mencapai Rp303,8 miliar, menurun dibandingkan dengan triwulan sebelumnya sebesar Rp734,11 miliar (Grafik 5.6).



Sumber: Bank Indonesia

Grafik 5.6 Perkembangan Pemusnahan Uang Tidak Layak Edar (UTLE)

Dalam rangka meningkatkan kualitas dan ketersediaan uang kartal di masyarakat, KPwBI Provinsi Kalimantan

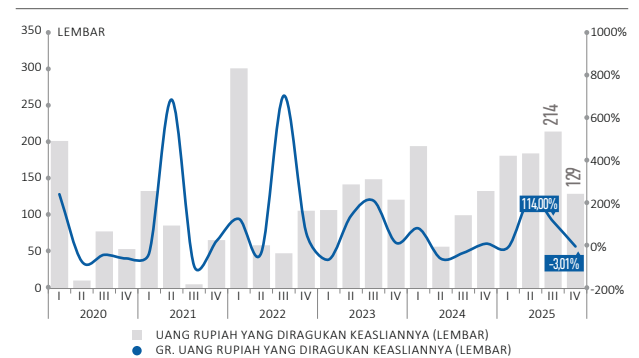
Selatan berkomitmen melaksanakan program pelayanan perkasas yang semakin baik. Salah satu di antaranya melalui program kas keliling yang bertujuan menyerap langsung uang tidak layak edar di masyarakat.

Selanjutnya, dalam upaya menjaga ketersediaan uang rupiah, saat ini terdapat 2 (dua) lokasi kas titipan yang terletak di Batulicin, Kabupaten Tanah Bumbu dan Tanjung, Kabupaten Tabalong. Total distribusi uang dari Kas Titipan selama triwulan IV 2025 sebesar Rp741,36 miliar atau kontraksi 13,24% (yoy), menurun dibandingkan triwulan sebelumnya yang tumbuh sebesar 11,55% (yoy) atau sebesar Rp705,86 miliar (Tabel 5.1). Sementara itu, total penukaran uang oleh masyarakat di loket Bank Indonesia pada triwulan laporan sebesar Rp9,92 miliar atau kontraksi sebesar 9,77% (yoy), menurun dibandingkan triwulan sebelumnya yang tumbuh 36,03% (yoy) atau sebesar Rp13,62 miliar (Tabel 5.2).

5.3.2 Penanganan Uang Rupiah Yang Diragukan Keasliannya

Jumlah uang Rupiah yang diragukan keasliannya pada triwulan IV 2025 menurun. Pada triwulan laporan, temuan uang Rupiah yang diragukan keasliannya mencapai 129 lembar atau kontraksi 3,01% (yoy), lebih rendah dibandingkan triwulan sebelumnya yang tumbuh 114,00% (yoy) atau sebanyak 214 lembar

(Grafik 5.7). Penurunan pertumbuhan jumlah uang Rupiah yang diragukan keasliannya tersebut seiring dengan menurunnya aliran uang masuk melalui Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kalimantan Selatan. KPwBI Kalimantan Selatan secara aktif melakukan berbagai langkah untuk meminimalisir persebaran uang Rupiah yang diragukan keasliannya, yaitu dengan konsisten meningkatkan fitur keamanan uang, mendorong keterjangkauan dan ketersediaan Uang Layak Edar (ULE) secara luas di masyarakat, mendorong penggunaan pembayaran nontunai guna meminimalkan peluang pemalsuan uang, serta meningkatkan kesadaran dan pemahaman masyarakat tentang ciri-ciri keaslian uang Rupiah.



Sumber: Bank Indonesia

Grafik 5.7 Perkembangan Temuan Uang Rupiah yang Diragukan Keasliannya

Tabel 5.1 Data Triwulanan Kas Titipan Triwulan IV 2025 (Rp Juta)

PERIODE	PECAHAN UANG KERTAS								PECAHAN UANG LOGAM						GRAND TOTAL
	100.000	75.000	50.000	20.000	10.000	5.000	2.000	1.000	1.000	500	200	100	50	25	
Oktober	174.200	-	82.850	500	690	560	80	40	15	5	0	2			258.942
November	198.700	-	75.650	1.560	770	890	188	75	15	8	6	3			277.865
Desember	113.500	-	88.300	900	590	780	330	122	5	0	0	0			204.527
Tw IV	486.400	-	246.800	2.960	2.050	2.230	598	237	35	13	6	5	-	-	741.334

Sumber: Bank Indonesia Provinsi Kalimantan Selatan

Tabel 5.2 Data Triwulanan Penukaran Uang Kartal Triwulan III 2025 (Rp Juta)

PERIODE	PECAHAN UANG KERTAS								PECAHAN UANG LOGAM						GRAND TOTAL
	100.000	75.000	50.000	20.000	10.000	5.000	2.000	1.000	1.000	500	200	100	50	25	
Oktober	834	-	704	185	1.006	801	243	100	45	27	3	1	-	-	7.820
November	1.328	-	500	250	804	673	279	116	26	18	3	1	-	-	7.946
Desember	448	-	183	228	515	367	136	51	28	18	5	1	-	-	3.907
Tw IV	2.610	-	1.386	663	2.325	1.841	658	267	99	63	11	3	-	-	19.673

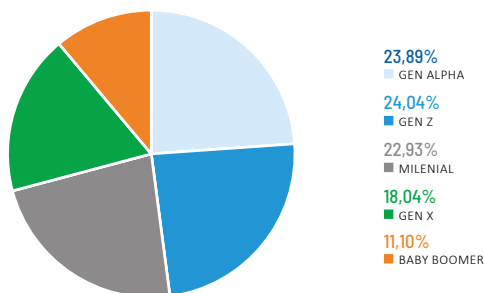
Sumber: Bank Indonesia Provinsi Kalimantan Selatan

BOKS 3

Festival ANTASARI 2026, Mengakselerasi Akseptasi QRIS di Kalimantan Selatan

Ke depan, perkembangan Ekonomi Keuangan Digital (EKD) diperkirakan semakin cepat. Mengacu pada *Blueprint Sistem Pembayaran Indonesia 2030*, terdapat 3 (tiga) lingkungan strategis utama yang akan menentukan arah digitalisasi sistem pembayaran Indonesia, yaitu; (i) menguatnya partisipasi ekonomi generasi milenial, Z, dan Alpha; (ii) derasnya inovasi pembayaran digital; dan (iii) menguatnya interkoneksi pembayaran lintas negara.

Populasi Indonesia kini didominasi oleh penduduk dalam usia produktif. Struktur demografi Indonesia yang muda mendukung adopsi layanan digital secara masif. Komposisi demografi Indonesia yang didominasi oleh generasi milenial, generasi Z, dan generasi Alpha yang memiliki karakteristik *digital savvy* mendorong luasnya akseptasi digital di dalam negeri (Grafik B3.1).

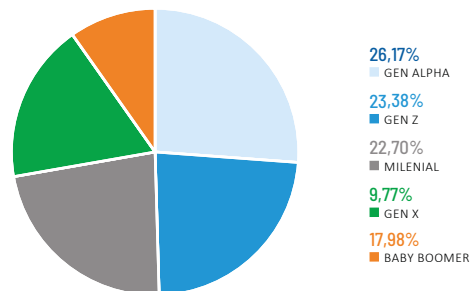


Sumber : BPS, diolah

Grafik B3.1

Komposisi Penduduk Indonesia Berdasarkan Kelompok Generasi

Kondisi serupa turut terjadi di Provinsi Kalimantan Selatan, di mana total komposisi generasi milenial, generasi Z, dan generasi Alpha mencapai 72,25% dari keseluruhan jumlah penduduk Kalimantan Selatan (Grafik B3.2).



Sumber : BPS, diolah

Grafik B3.2

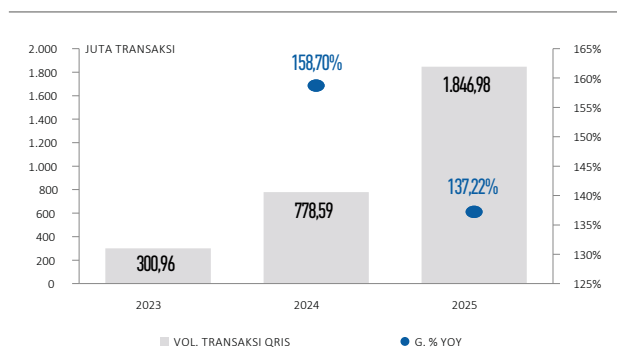
Komposisi Penduduk Kalimantan Selatan Berdasarkan Kelompok

Pada lingkungan strategis yang kedua, inovasi pembayaran di Indonesia yang terus berkembang turut menjadi pendorong akselerasi EKD. Kemajuan *fintech* dan *e-commerce* membuka jalan bagi lebih banyak perusahaan rintisan (*start-up*) atau pelaku nonbank untuk memasuki pasar dan menawarkan solusi pembayaran yang lebih cepat, aman, dan efisien. Inovasi seperti *e-wallet*, *QR code payment*, dan integrasi layanan pembayaran dengan platform digital lainnya diperkirakan terus meluas. Solusi berbasis API dan teknologi generasi berikutnya memungkinkan pembayaran bersifat lebih customer-centric. Lebih lanjut, dengan memanfaatkan data *fintech* dan *e-commerce* yang diintegrasikan dengan data pembayaran, Penyedia Jasa Pembayaran di masa depan berpeluang memberikan layanan yang lebih personal, serta mengidentifikasi peluang pasar secara lebih akurat.

Lebih lanjut, arus transaksi pembayaran digital ke depan diprediksi terus meningkat, seiring dengan komitmen internasional dalam meningkatkan efisiensi layanan pembayaran lintas negara. Pada tahun 2020 yang lalu, melalui forum G20 disepakati bahwa pembayaran lintas negara menjadi salah satu area prioritas pengembangan ke depan. *Financial Stability*

Board (FSB) bersama-sama dengan *Bank for International Settlements' Committee on Payments and Market Infrastructure (BISCPMI)* menjadi pemegang mandat G20 untuk mengembangkan roadmap atau peta jalan guna meningkatkan efisiensi pembayaran lintas negara.

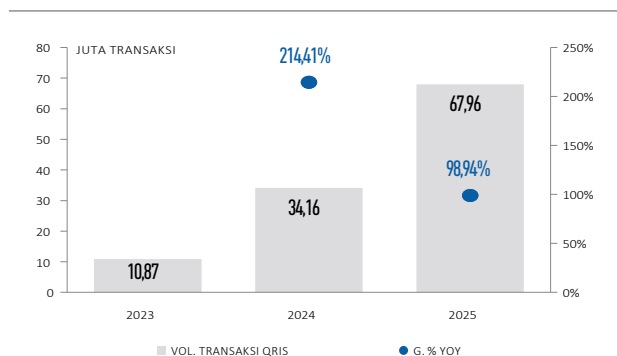
Dari sisi domestik, transaksi digital di Indonesia terus meningkat secara eksponensial dalam beberapa tahun terakhir. Akselerasi pembayaran digital tersebut salah satunya tercermin dari pertumbuhan volume transaksi QRIS nasional yang mencapai 137,22% (yoy) atau sebanyak 1,85 miliar transaksi (Grafik B3.3).



Sumber : Bank Indonesia

Grafik B3.3 Perkembangan Volume Transaksi QRIS Nasional

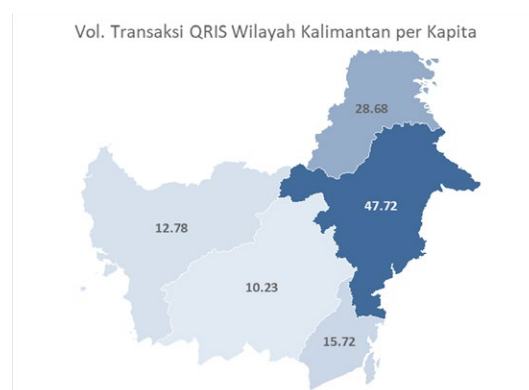
Akselerasi transaksi digital tersebut turut terjadi di Provinsi Kalimantan Selatan, mencatatkan pertumbuhan sebesar 98,94% (yoy) atau sebanyak 67,96 juta transaksi (Grafik B5.4). Lebih lanjut, pertumbuhan volume transaksi tersebut turut disertai dengan pertumbuhan nominal transaksi QRIS yang tercatat tumbuh sebesar 75,74% (yoy) dengan nilai mencapai Rp8,04 triliun.



Sumber : Bank Indonesia

Grafik B3.4 Perkembangan Volume Transaksi QRIS Kalimantan Selatan

Walaupun memiliki peningkatan yang cukup tinggi, akseptasi QRIS di Kalimantan Selatan masih lebih rendah dari beberapa provinsi lain di wilayah Kalimantan. Volume transaksi QRIS Kalimantan Selatan per kapita pada tahun 2025 berada pada urutan ketiga, lebih rendah dibandingkan Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara (Gambar B5.1). Dengan kondisi tersebut, transaksi keuangan digital, khususnya QRIS di wilayah Kalimantan Selatan masih berpotensi untuk ditingkatkan lebih lanjut.



Sumber : Bank Indonesia

Gambar B5.1 Volume Transaksi QRIS per Kapita Wilayah Kalimantan

Melihat peluang dan tantangan tersebut di atas, **Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kalimantan Selatan, berpedoman pada *Blueprint Sistem Pembayaran Indonesia 2030*, menyusun suatu rangkaian kegiatan Festival ANTASARI (Akselerasi dan TrAnsformaSi ekonomi digital terkini)** yang bertujuan untuk meningkatkan akseptasi QRIS serta menginternalisasikan penggunaan kanal pembayaran digital, khususnya QRIS di Provinsi Kalimantan Selatan. Festival ANTASARI pertama kali diluncurkan pada tahun 2021 dan telah menjadi salah satu kegiatan tahunan Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kalimantan Selatan.

Dengan target capaian QRIS yang lebih masif, rangkaian Festival ANTASARI 2026 berlangsung dengan periode yang lebih lama, dari bulan Januari s.d. Desember 2026, diawali dengan kegiatan *Kick-off* Rangkaian Festival ANTASARI 2026 yang dilaksanakan pada tanggal 24 Januari 2026 (Gambar B5.2). Pada tahun 2026, rangkaian Festival ANTASARI 2026 berkolaborasi



Sumber : Bank Indonesia

Gambar B5.1 Volume Transaksi QRIS per Kapita Wilayah Kalimantan

dengan 10 Penyedia Jasa Pembayaran (PJP) dan 5 mitra strategis lainnya.

Adapun beberapa fokus kegiatan yang akan dilaksanakan pada rangkaian Festival ANTASARI 2026, di antaranya adalah QRIS Racing Festival ANTASARI (Februari – November 2026), Banua QRISTival & Race to Banua QRISTival (Mei 2026), QRIS Jelajah Indonesia Wilayah Kalimantan (Juli 2026), Pekan QRIS Nasional (Agustus 2026), dan Malam Apresiasi Festival ANTASARI 2026 (Desember 2026).

Pada rangkaian Festival ANTASARI 2026, salah satu kegiatan yang menjadi *highlight* utama adalah QRIS Racing Festival ANTASARI. QRIS Racing Festival ANTASARI merupakan suatu kompetisi yang diinisiasi oleh Bank Indonesia, berkolaborasi dengan Penyelenggara Jasa Pembayaran (PJP) Bank dan Non Bank, yang ditujukan untuk seluruh lapisan masyarakat di Kalimantan Selatan. Kompetisi tersebut berfokus mengajak masyarakat dan *merchant* untuk berlomba/*racing* dalam meningkatkan volume transaksi QRIS di Kalimantan Selatan.

Berdasarkan hasil evaluasi program serupa pada tahun 2025, program QRIS racing pada kegiatan “Race to Banua QRISTival 2025” terbukti efektif dalam memperluas akseptasi QRIS, dengan akuisisi volume transaksi QRIS mencapai 1 juta volume transaksi dalam periode 1 bulan pelaksanaan kegiatan. Belajar dari

pengalaman tersebut, pada tahun 2026, pelaksanaan QRIS Racing Festival ANTASARI akan dilaksanakan dengan periode yang lebih panjang, yakni pada bulan Februari – November 2026.

Lebih lanjut, sebagai provinsi yang didominasi oleh sektor pertambangan dan sektor pertanian, perkebunan dan perikanan, dalam rangka meningkatkan akseptasi QRIS di kawasan tersebut, telah dilakukan uji coba pengembangan ekosistem *closed-loop* sistem pembayaran digital pada salah satu perusahaan pertambangan di Kalimantan Selatan. Ekosistem *closed-loop* sistem pembayaran pada kawasan pertambangan/perkebunan merupakan suatu ekosistem transaksi terintegrasi yang menghubungkan seluruh alur keuangan pekerja dan pelaku usaha dalam satu sistem digital yang saling terkoneksi. Dalam skema ini, pembayaran gaji karyawan dilakukan secara non-tunai melalui kanal digital, yang selanjutnya dapat langsung dimanfaatkan untuk berbagai kebutuhan transaksi sehari-hari di lingkungan pertambangan/perkebunan dan sekitarnya menggunakan QRIS. Dengan integrasi tersebut, perputaran dana tetap berada dalam ekosistem yang sama, meningkatkan efisiensi, transparansi, serta keamanan transaksi, sekaligus mendorong inklusi keuangan dan memperkuat aktivitas ekonomi lokal di kawasan perkebunan.

Pada tahun 2025 KPwBI Kalimantan Selatan berkolaborasi dengan salah satu PJP mengembangkan ekosistem *closed-loop* pembayaran digital pada salah satu kawasan pertambangan dan berhasil mengakuisisi volume transaksi QRIS hingga 238 ribu volume transaksi selama periode kegiatan. Tidak hanya penambahan volume transaksi, program tersebut juga berhasil meningkatkan jumlah pengguna baru QRIS hingga 7.565 orang.

Pada tahun 2026, ekosistem *closed-loop system* pembayaran pada kawasan pertambangan dan perkebunan akan kembali dikembangkan dengan strategi dan berkolaborasi dengan lebih banyak PJP dan mitra strategis lainnya.



06

Ketenagakerjaan dan Kesejahteraan





Kondisi ketenagakerjaan Provinsi Kalimantan Selatan pada semester II 2025 berada pada level yang sedikit lebih rendah dibandingkan dengan semester II 2024. Meskipun demikian Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kalimantan Selatan menurun sejalan dengan peningkatan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK). Berdasarkan lapangan usaha (LU), penyerapan tenaga kerja di Provinsi Kalimantan Selatan pada November 2025 didominasi oleh sektor Pertanian, Perdagangan, Akomodasi dan Penyediaan Makan Minum, serta Industri Pengolahan. LU Pertanian menjadi penyerap tenaga kerja terbesar dengan pangsa 28,77% dengan peningkatan tenaga kerja hingga 39,72 ribu orang dibandingkan Agustus 2025.

Optimisme daya beli masyarakat pada triwulan IV 2025 masih terjaga, meskipun mengalami penurunan dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Hal ini tercermin dari Indeks Penghasilan Konsumen saat ini yang tercatat sebesar 119,44, lebih rendah dibandingkan 125,38 pada triwulan IV 2024.

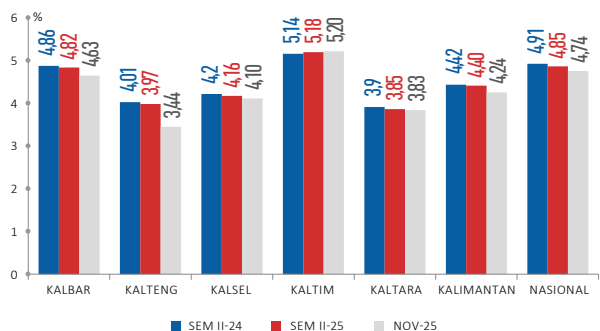
Pada tahun 2025, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Provinsi Kalimantan Selatan tercatat sebesar 76,10, meningkat dibandingkan tahun 2024 yang sebesar 75,19. Peningkatan IPM Kalimantan Selatan bersumber dari peningkatan seluruh dimensi umur panjang dan hidup sehat (UHH), serta pengetahuan yakni Harapan Lama Sekolah (HLS) dan Rata-rata Lama Sekolah (RLS) serta Standar Hidup Layak (pengeluaran per kapita).

6.1 KONDISI KETENAGAKERJAAN

Kondisi ketenagakerjaan Provinsi Kalimantan Selatan pada semester II 2025 berada pada level yang sedikit lebih rendah dibandingkan dengan semester II 2024. Hal tersebut terkonfirmasi dari penurunan jumlah Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) meskipun Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) mengalami sedikit penurunan.

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kalimantan Selatan menurun sejalan dengan peningkatan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK). Pada November 2025, TPT tercatat sebesar 4,10%, lebih rendah dibandingkan Semester II tahun 2025 yang sebesar 4,16%. Penurunan ini mengindikasikan perbaikan kondisi pasar tenaga kerja, yang didukung oleh meningkatnya serapan tenaga kerja pada beberapa sektor utama (Tabel 6.2). Selain itu, pelaksanaan *Job Fair* oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan yang menyediakan hingga 164 lowongan pekerjaan turut berkontribusi dalam memperluas kesempatan kerja dan menekan tingkat pengangguran.

Secara spasial, TPT seluruh provinsi di Kalimantan mengalami penurunan kecuali Kalimantan Timur. Hal ini sejalan dengan kondisi TPT Nasional yang juga mengalami penurunan dari 4,85% pada semester II 2025 (Agustus 2025) menjadi 4,74% pada November 2025. Dalam tiga tahun terakhir, TPT Kalimantan Selatan selalu di bawah TPT nasional (Grafik 6.1), mencerminkan kinerja pasar kerja daerah yang relatif lebih baik. Kondisi ini menunjukkan bahwa penyerapan tenaga kerja di Kalimantan Selatan tetap terjaga, sejalan dengan meningkatnya jumlah penduduk bekerja (Tabel 6.1) dan peningkatan TPAK (Grafik 6.2).

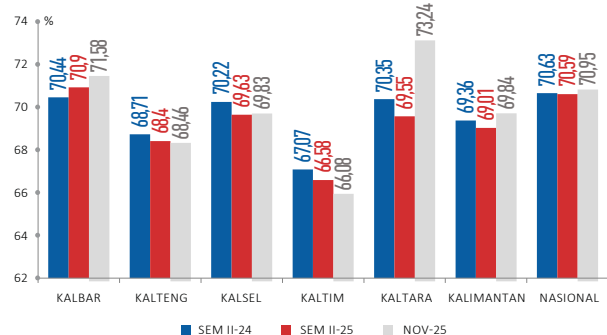


Sumber: BPS Nasional, diolah

Grafik 6.1 Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) pada November 2025 di Provinsi Kalimantan Selatan menunjukkan peningkatan dibandingkan dengan Semester II 2025. TPAK pada periode November 2025 tercatat sebesar 69,83%, lebih tinggi dibandingkan semester II 2025 sebesar 69,63%. Berdasarkan jenis kelamin, TPAK Perempuan bulan November 2025 meningkat sebesar 0,43%, disamping TPAK Laki-laki yang menurun hingga 0,52% dibandingkan data Semester II 2025 (Agustus 2025). Perkembangan tersebut mencerminkan pergeseran dinamika ketenagakerjaan yang semakin inklusif serta terbukanya peluang kerja bagi tenaga kerja perempuan.

Apabila ditinjau secara spasial, TPAK Provinsi Kalimantan Selatan menempati posisi tertinggi ketiga di Pulau Kalimantan, yakni sebesar 69,83%, setelah Kalimantan Barat yang mencapai 71,58% dan Kalimantan Utara yang meningkat signifikan hingga 73,24%. Meskipun demikian, capaian tersebut sedikit lebih rendah dibandingkan dengan TPAK nasional yang sebesar 70,95% (Grafik 6.2). Kondisi ini menunjukkan bahwa partisipasi angkatan kerja di Kalimantan Selatan relatif terjaga. Berbagai upaya dalam mendorong peningkatan partisipasi dan kualitas tenaga kerja Kalimantan Selatan pada tahun 2025 turut menambah serapan tenaga kerja formal di daerah, antara lain melalui pelaksanaan program magang Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker), dan penyelenggaraan *job fair* untuk mempertemukan pencari kerja dengan dunia usaha.



Sumber: BPS Nasional, diolah

Grafik 6.2 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)

Jumlah penduduk usia kerja di Provinsi Kalimantan Selatan pada November 2025 meningkat dibandingkan dengan semester II 2025 (Agustus 2025). Pada periode tersebut, jumlah penduduk usia

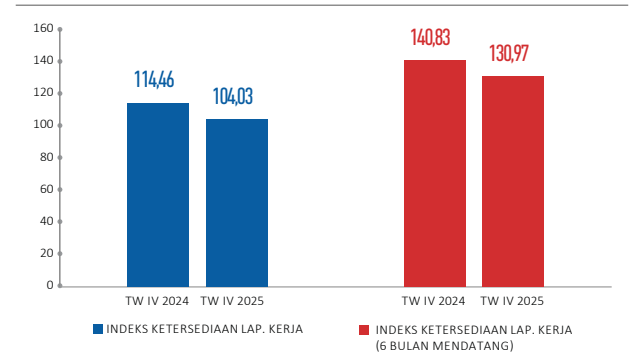
kerja tercatat sebesar 3,22 juta jiwa, atau meningkat sebanyak 11,28 ribu jiwa dibandingkan Agustus 2025. Peningkatan jumlah penduduk usia kerja ini terutama bersumber dari kenaikan jumlah angkatan kerja yang tumbuh 4,62 ribu jiwa dibandingkan 3 bulan sebelumnya. Namun demikian, jumlah penduduk bukan angkatan kerja juga tercatat meningkat sebesar 6,66 ribu jiwa pada November 2025 (Tabel 6.1).

Kenaikan pada kelompok bukan angkatan kerja ini menunjukkan bahwa sebagian penduduk usia kerja belum berpartisipasi aktif dalam pasar tenaga kerja, baik karena melanjutkan pendidikan, mengurus rumah tangga, atau belum memperoleh pekerjaan yang sesuai. Meskipun demikian, pertumbuhan positif jumlah angkatan kerja menandakan tetap terjaganya partisipasi aktif masyarakat dalam kegiatan ekonomi, terutama di sektor-sektor utama Kalimantan Selatan.

Indikator ketenagakerjaan menunjukkan bahwa persepsi konsumen terhadap ketersediaan lapangan kerja di Kalimantan Selatan relatif melemah.

Nilai Indeks Ketersediaan Lapangan Kerja triwulan IV 2025 tercatat sebesar 104,03, menurun dibandingkan dengan 114,46 pada triwulan IV 2024. Sementara itu, Indeks Ketersediaan Lapangan Kerja untuk enam bulan mendatang juga mengalami penurunan dari 140,83 pada triwulan IV 2024 menjadi 130,97 pada triwulan IV 2025. Berdasarkan hasil survey konsumen penurunan ini diakibatkan oleh terbatasnya lapangan pekerjaan,

potensi PHK, serta ketatnya persaingan kerja antar lulusan perguruan tinggi (Grafik 6.3).



Sumber: Survei Bank Indonesia, diolah

Grafik 6.3 Indeks Ketersediaan Lapangan Kerja

Berdasarkan Lapangan Usaha (LU), penyerapan tenaga kerja di Provinsi Kalimantan Selatan pada November 2025 didominasi oleh sektor Pertanian, Perdagangan, Akomodasi dan Penyediaan Makan Minum, serta Industri Pengolahan. Pada periode tersebut, LU Pertanian menjadi penyerap tenaga kerja terbesar sebesar 28,77% dengan peningkatan tenaga kerja hingga 39,72 ribu orang dibandingkan Agustus 2025, diikuti oleh LU Perdagangan sebesar 18,16%, dan LU Akomodasi dan Penyediaan Makan Minum sebesar 10,06%. LU Pertanian masih mampu menyerap tambahan tenaga kerja seiring dengan mundurnya musim panen, yang memperpanjang kebutuhan tenaga kerja di lapangan.

Tabel 6.1 Perkembangan Kondisi Ketenagakerjaan

URAIAN	SEM II-21	SEM II-22	SEM II-23	SEM II-24	SEM II-25	NOV-25	PERUBAHAN	
	RIBU JIWA	RIBU JIWA	RIBU JIWA	RIBU JIWA	RIBU JIWA	RIBU JIWA	RIBU JIWA	PERSEN
Penduduk Usia Kerja	3.204,52	3.251,34	3.115,51	3.165,08	3.212,47	3.223,74	11,28	0,35
1. Penduduk Angkatan Kerja	2.219,40	2.196,25	2.173,26	2.222,53	2.246,55	2.251,17	4,62	0,21
a. Bekerja	2.109,43	2.092,23	2.079,68	2.129,28	2.153,14	2.158,96	5,82	0,27
b. Pengangguran	109,97	104,03	93,58	93,26	93,41	92,21	-1,20	-1,29
2. Penduduk Bukan Angkatan Kerja	985,12	1.055,09	942,25	942,54	965,92	972,57	6,66	0,69
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (%)	69,26	67,55	69,76	70,22	69,93	69,83	-0,10	-0,14
Laki-Laki (%)	83,55	82,97	85,52	84,71	84,48	84,04	-0,44	-0,52
Perempuan (%)	54,72	51,90	53,75	55,52	55,18	55,42	0,24	0,43
Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	4,95	4,74	4,31	4,20	4,16	4,10	-0,06	-1,44
Perkotaan (%)	6,66	6,24	5,42	5,51	5,10	4,76	-0,34	-6,67
Pedesaan (%)	3,53	3,40	3,24	2,91	3,10	3,34	0,24	7,74

Sumber: BRS Keadaan Ketenagakerjaan Provinsi Kalimantan Selatan Agustus 2025, BPS Kalsel (diolah)

Selain itu, peningkatan jumlah SPPG turut mendorong penambahan tenaga kerja, khususnya pada sektor terkait seperti penyediaan akomodasi dan makan minum. Perkembangan ini mencerminkan adanya realokasi tenaga kerja secara sektoral yang dipengaruhi oleh faktor musiman dan dinamika aktivitas ekonomi daerah pada akhir tahun 2025.

Tabel 6.2 Perkembangan Serapan Tenaga Kerja Sektoral

LAPANGAN PEKERJAAN UTAMA	NOV 25 (%)	PERUBAHAN AGS - NOV 2025 (RIBU ORANG)
Pertanian, Kehutanan & Perikanan	28,77	39,72
Perdagangan Besar & Eceran; Reparasi & Perawatan Mobil & Sepeda Motor	18,16	-17,4
Penyediaan Akomodasi & Penyediaan Makan Minum	10,06	25,33
Industri Pengolahan	7,76	-16,44
Pendidikan	6,2	0,54
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan & Jaminan Sosial Wajib	5,95	12,51
Konstruksi	4,88	-3,99
Pertambangan & Penggalian	4,39	0,51
Jasa Lainnya	3,85	-11,48
Pengangkutan & Pergudangan	3,72	-25,57
Aktivitas Kesehatan Manusia & Aktivitas Sosial	2,31	5,05
Informasi & Komunikasi; Aktivitas Keuangan & Asuransi; Real Estat	1,92	1,45
Jasa Profesional & Perusahaan	1,17	-4,89
Pengadaan Listrik, Gas, Uap/Air Panas & Udara Dingin; Treatment Air, Limbah & Sampah; Aktivitas Remediasi	0,86	0,49

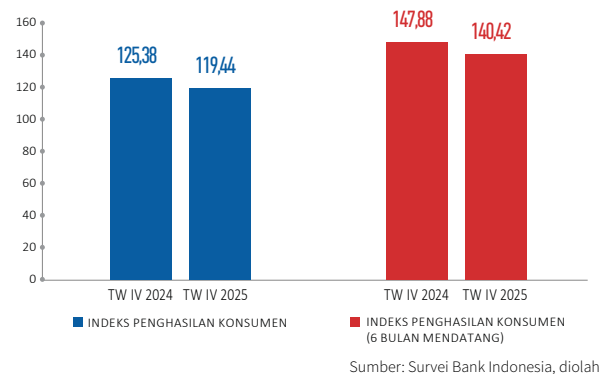
Sumber: BPS Kalsel (diolah)

6.2 KONDISI KESEJAHTERAAN

6.2.1 Daya Beli Masyarakat

Optimisme daya beli masyarakat pada triwulan IV 2025 masih terjaga, meskipun mengalami penurunan dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Hal ini tercermin dari Indeks Penghasilan Konsumen saat ini yang tercatat sebesar 119,44, lebih rendah dibandingkan 125,38 pada triwulan IV 2024. Hal ini menunjukkan bahwa sebagian konsumen merasakan penurunan pendapatan aktual, sejalan dengan penurunan pada komponen ketersediaan lapangan pekerjaan, yang dipicu oleh kekhawatiran

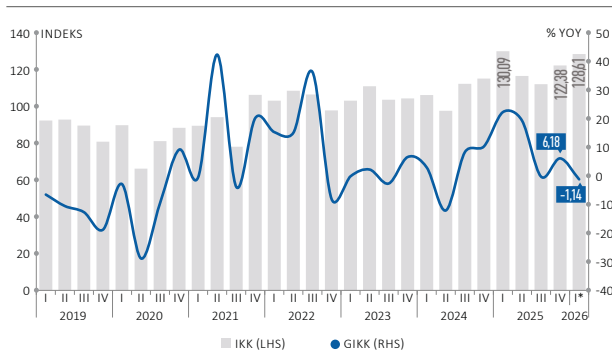
masyarakat terhadap terbatasnya peluang kerja di tengah meningkatnya jumlah pencari kerja baru, serta persyaratan rekrutmen yang semakin selektif. Sejalan dengan ekspektasi masyarakat terhadap penghasilan di masa mendatang yang menurun, tercermin dari Indeks Penghasilan Konsumen enam bulan mendatang turun dari 147,88 pada triwulan IV 2024 menjadi 140,42 pada triwulan IV 2025. Penurunan ini diakibatkan adanya persepsi meningkatnya biaya kebutuhan hidup yang dinilai berpotensi menekan daya beli serta ruang peningkatan pendapatan rumah tangga ke depan. (Grafik 6.4).



Grafik 6.4 Indeks Penghasilan Konsumen

Indeks Keyakinan Konsumen Bank Indonesia pada triwulan I 2026 menunjukkan penurunan dibandingkan dengan triwulan I 2025. Nilai Indeks Keyakinan Konsumen (IKK) pada triwulan I 2026 tercatat sebesar 128,61. Indeks tersebut sedikit lebih rendah dibanding dengan triwulan yang sama pada tahun sebelumnya sebesar 130,09. Meskipun masih berada di zona optimis, persepsi terhadap kondisi ekonomi saat ini belum sepenuhnya diikuti oleh penguatan ekspektasi konsumen ke depan (Grafik 6.5). Penurunan IKK terutama disebabkan oleh melemahnya komponen Indeks Ekspektasi Konsumen (IEK). IEK tercatat mengalami penurunan dipengaruhi oleh adanya persepsi meningkatnya persaingan usaha, seiring bertambahnya jumlah pelaku usaha, khususnya di sektor UMKM dan LU Perdagangan yang belum diimbangi dengan pertumbuhan dari sisi permintaan.

Di sisi lain, Indeks Kondisi Ekonomi (IKE) justru mengalami peningkatan, yang mencerminkan persepsi masyarakat bahwa kondisi ekonomi saat ini relatif membaik. Namun demikian, penguatan IKE belum mampu sepenuhnya menahan penurunan IKK secara keseluruhan akibat tekanan yang lebih besar berasal dari sisi ekspektasi.



Sumber: Survei Konsumen Bank Indonesia, diolah

Grafik 6.5 Indeks Keyakinan Konsumen (IKK)

6.2.2 Nilai Tukar Petani

Pada triwulan I 2026, Nilai Tukar Petani (NTP) Kalimantan Selatan tercatat sebesar 121,10 lebih tinggi dibanding triwulan IV 2025 yang sebesar 118,30. Sejalan dengan harga yang diterima petani (It) lebih tinggi dari indeks harga yang dibayar petani (Ib) sehingga kesejahteraan petani Kalimantan Selatan relatif masih berada pada level yang menguntungkan.

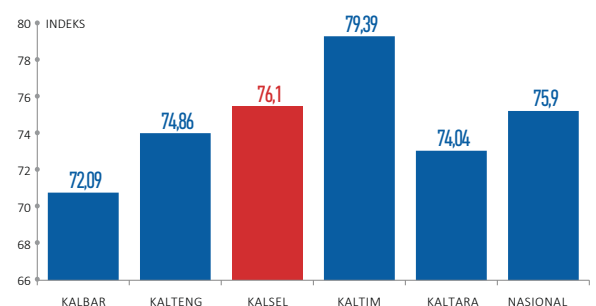
Peningkatan Indeks Harga yang Diterima (It) oleh petani secara triwulanan didorong oleh peningkatan NTP pada seluruh sektor. NTP Tanaman Pangan meningkat dari 104,82 pada triwulan IV 2025 menjadi 109,08 pada triwulan I 2026 (naik 4,06%, qtq), sementara NTP Hortikultura meningkat 3,50% (qtq), NTP Tanaman Perkebunan Rakyat naik dari 149,31 menjadi 150,33 atau naik sebesar 0,68% (qtq), NTP Peternakan dan Perikanan juga meningkat secara qtq sebesar 1,68% dan 1,48%. Kenaikan tersebut menunjukkan adanya perbaikan harga komoditas utama yang dihasilkan oleh petani.

Dengan demikian, kesejahteraan petani Kalimantan Selatan pada triwulan I 2026 masih terjaga, sejalan dengan meningkatnya kemampuan petani dalam memenuhi kebutuhan produksi dan konsumsi rumah tangga. Secara tahunan, NTP juga tumbuh 0,34% (yoy), mencerminkan daya beli petani yang relatif stabil di tengah fluktuasi harga pangan dan biaya produksi.

6.2.3 Indeks Pembangunan Manusia

Pada tahun 2025, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Provinsi Kalimantan Selatan tercatat sebesar 76,10, meningkat dibandingkan tahun 2024 yang sebesar 75,19. Peningkatan IPM Kalimantan Selatan bersumber dari seluruh komponen penyusunnya. Umur Harapan Hidup (UHH) meningkat dari 74,18 tahun pada 2024 menjadi 74,49 tahun pada 2025, sejalan dengan pengeluaran per kapita yang disesuaikan naik dari Rp13,399 juta menjadi Rp13,757 juta, menunjukkan adanya peningkatan kemampuan daya beli masyarakat dan perbaikan kesejahteraan ekonomi rumah tangga di Kalimantan Selatan.

Di sisi lain, dimensi pendidikan menunjukkan perkembangan positif, tercermin dari Harapan Lama Sekolah (HLS) yang meningkat dari 12,87 tahun menjadi 13,12 tahun, serta Rata-rata Lama Sekolah (RLS) yang naik dari 8,62 tahun menjadi 8,81 tahun. Hal ini mengindikasikan adanya peningkatan akses dan partisipasi masyarakat terhadap pendidikan formal. Secara umum, IPM Kalimantan Selatan telah menunjukkan kemajuan yang cukup pesat dan berstatus tinggi dengan capaian IPM di atas 70 meski masih berada di bawah Kalimantan Timur untuk wilayah Kalimantan¹¹. Selama periode 2020 - 2025, IPM Kalimantan Selatan rata-rata tumbuh sebesar 0,81% per tahun dan berada di atas nilai 70 sejak tahun 2020 (Grafik 6.6).



Sumber : Badan Pusat Statistik

Grafik 6.6 IPM Provinsi di Kalimantan dan Nasional

11 Situs resmi BPS Indonesia: IPM <60 = Rendah; 60 ≤ IPM <70 = Sedang; 70 ≤ IPM < 80 = Tinggi; ≥80 = Sangat Tinggi

Tabel 6.3 Perkembangan Nilai Tukar Petani (NTP)

SEKTOR, KELOMPOK DAN SUBKELOMPOK	2023				2024				2025				2026	PERUBAHAN	
	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I*	%QTQ	%YOY
Nilai Tukar Petani															
Tanaman Pangan	111,36	109,21	110,79	114,24	115,85	103,99	102,48	99,33	104,20	99,43	102,23	104,82	109,08	4,06	4,68
Holtikultura	95,02	98,42	99,22	105,48	101,72	99,74	99,23	97,88	109,81	104,38	102,57	96,10	99,47	3,50	-9,42
Tanaman Perkebunan Rakyat	111,61	109,79	109,78	115,45	122,79	133,61	135,86	148,12	154,51	142,56	143,98	149,31	150,33	0,68	-2,71
Peternakan	101,86	103,15	105,32	103,88	105,06	106,75	105,78	106,06	107,00	105,67	104,68	106,72	108,51	1,68	1,41
Perikanan	98,11	100,29	98,83	98,11	100,83	99,73	98,87	98,86	98,26	98,73	97,08	97,24	98,68	1,48	0,43
Gabungan															
Nilai Tukar Petani	109,08	107,81	108,65	112,36	115,59	113,19	112,74	115,43	120,69	113,96	115,53	118,30	121,10	2,37	0,34
Indeks Harga yang diterima petani (%)	126,47	126,04	127,02	131,76	137,75	137,40	135,63	140,41	144,12	140,54	142,69	146,85	151,96	3,48	5,44
Indeks Harga yang dibayar petani (%)	115,95	116,91	116,90	117,26	119,16	121,38	120,30	121,64	121,20	123,33	123,52	124,13	125,48	1,09	3,53
a. Indeks Konsumsi Rumah Tangga	115,85	116,85	116,93	117,67	119,57	122,38	120,87	122,71	120,04	125,42	124,72	125,48	127,29	1,44	6,04
b. Indeks BPPBM	123,67	116,91	117,34	118,02	118,33	119,23	119,32	119,28	119,61	120,69	121,00	121,04	121,08	0,03	1,23

Sumber: BPS Kalsel (diolah)

Tabel 6.4 Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

	SATUAN	2020	2021	2022	2023	2024	2025	PERGERAKAN
Umur harapan hidup saat lahir (UHH)	Tahun	73,28	73,43	73,70	73,97	74,18	74,49	
Harapan lama sekolah (HLS)	Tahun	12,52	12,81	12,82	12,86	12,87	13,12	
Rata-rata lama sekolah (RLS)	Tahun	8,29	8,34	8,46	8,55	8,62	8,81	
Pengeluaran per kapita disesuaikan	Rp. 000	12.032	12.143	12.469	12.953	13.399	13.757	
IPM		73,09	73,45	74,00	74,66	75,19	76,10	
Pertumbuhan IPM	% yoy		0,49	0,75	0,89	0,71	1,21	

Sumber: BPS Kalsel (diolah)



07 **Prospek Perekonomian**





Perekonomian Provinsi Kalimantan Selatan tahun 2026 diperkirakan tetap tumbuh positif pada kisaran 5,0%-5,8% (yoy). Pertumbuhan positif ini ditopang oleh kinerja LU Industri Pengolahan yang diperkirakan masih akan tumbuh tinggi serta permintaan konsumsi rumah tangga yang masih tetap kuat sejalan dengan program ekonomi kerakyatan dan stimulus fiskal pemerintah tahun 2026.

Dari sisi penawaran, peningkatan pertumbuhan ekonomi didorong oleh tumbuhnya kinerja LU Pertanian, LU Industri Pengolahan, LU Konstruksi dan LU Perdagangan. Peningkatan LU Pertanian seiring dengan prakiraan peningkatan produksi padi sejalan dengan masifnya program Oplah dan mulai berproduksinya program cetak sawah, serta potensi peningkatan produksi TBS dan karet seiring dengan prakiraan cuaca yang lebih baik di 2026. Sementara itu, prakiraan peningkatan LU Industri Pengolahan didorong potensi peningkatan produksi beras dan aktivitas produksi CPO dan biodiesel sejalan dengan program mandatori B40 serta peningkatan produksi minyak goreng. Selain itu, mulai beroperasinya smelter pig iron dan prekursor nikel pada tahun 2026 diperkirakan turut mendorong kinerja LU Industri pengolahan. Selanjutnya, LU Konstruksi diperkirakan meningkat seiring dengan aktivitas investasi sektor swasta yang meningkat dan aktivitas konstruksi sektor pemerintah yang lebih akseleratif (a.l Jembatan Pulau Laut, gerai KDKMP, dan dapur MBG). LU Perdagangan diperkirakan tetap tumbuh solid ditopang oleh masih kuatnya daya beli masyarakat, tercermin dari optimisme konsumen terhadap perekonomian ke depan yang tetap kuat akibat meningkatnya kinerja LU Pertanian dan LU Industri Pengolahan serta masifnya program stimulus fiskal pemerintah sepanjang tahun 2026. Namun demikian, pertumbuhan yang lebih tinggi berpotensi tertahan oleh penurunan kinerja LU Pertambangan yang diperkirakan lebih terbatas dampak rencana pemangkasan RKAB.

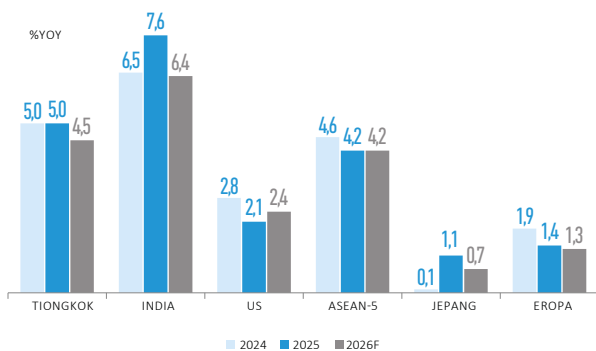
Dari sisi pengeluaran, kinerja ekonomi Kalimantan Selatan ditopang oleh peningkatan kinerja Konsumsi Rumah Tangga, PMTB dan Ekspor. Kinerja Konsumsi RT diperkirakan tumbuh positif sejalan dengan daya beli masyarakat yang masih tumbuh kuat didukung program ekonomi kerakyatan dan stimulus fiskal. Berbagai program pennebalan bantuan sosial serta program ketahanan pangan pemerintah pusat diperkirakan menopang tingkat konsumsi dan mendukung terjaganya optimisme masyarakat Kalimantan Selatan. Kinerja PMTB diperkirakan meningkat seiring dengan aktivitas industri hilirisasi di KI/KEK dan program ekonomi kerakyatan. Sementara itu, peningkatan kinerja ekspor diperkirakan didorong oleh peningkatan produksi CPO dan turunnya serta mulai berproduksinya smelter pig iron dan nikel pada tahun 2026.

Secara keseluruhan 2026, inflasi Provinsi Kalimantan Selatan diperkirakan lebih rendah dibandingkan dengan tahun 2025 dan berada dalam rentang sasaran $2,5\% \pm 1\%$ (yoy). Perkiraan tekanan inflasi yang lebih rendah disebabkan penurunan seluruh kelompok, terutama dari kelompok Perawatan Pribadi dan Jasa Lainnya diperkirakan meningkat didorong oleh harga emas perhiasan seiring harga emas global yang diperkirakan melambat sejalan dengan harga emas global yang meningkat lebih terbatas seiring telah dilakukan pemotongan suku bunga The Fed pada tahun Desember 2025. Selanjutnya, dari kelompok Transportasi diperkirakan lebih rendah sejalan dengan harga minyak global yang lebih rendah seiring kondisi pasokan yang memadai dari negara-negara OPEC+. Lebih lanjut, kelompok Makanan, Minuman, dan Tembakau diperkirakan melambat sejalan dengan harga aneka rokok yang tidak mengalami kenaikan harga seiring Harga Jual Eceran (HJE) dan cukai rokok yang tidak mengalami perubahan pada tahun 2026. Lebih lanjut, upaya perbaikan produksi tanaman pangan melalui program intensifikasi lahan, seperti Optimasi Lahan (OPLAH) penggunaan bibit unggul juga diperkirakan dapat menahan tekanan inflasi kelompok makanan, minuman dan tembakau.



7.1 PRAKIRAAN KONDISI MAKRO EKONOMI

Secara umum, perekonomian dunia diperkirakan melemah sejalan dengan divergensi pertumbuhan ekonomi, peningkatan ketidakpastian global, dan dampak implementasi tarif resiprokal Amerika Serikat (AS) serta krisis geopolitik yang mendisrupsi rantai pasok komoditas. Berbagai indikator menunjukkan bahwa kebijakan tarif AS memperlemah kinerja perdagangan global, tecermin dari melambatnya ekspor dan impor di sebagian besar negara. Lebih lanjut, pertumbuhan ekonomi Tiongkok, negara mitra dagang utama Kalimantan Selatan, diperkirakan melambat. Ekonomi Tiongkok pada 2026 diproyeksikan tumbuh 4,5% (yoy), lebih rendah dibandingkan tahun 2025 yang tumbuh sebesar 5,0% (yoy). Hal ini terutama disebabkan belum pulihnya krisis di sektor properti serta pelemahan konsumsi rumah tangga, meski pemerintah Tiongkok telah menyalurkan stimulus fiskal tambahan. Di sisi lain, perekonomian India, yang juga merupakan mitra dagang utama Kalimantan Selatan, diperkirakan tumbuh 6,4% (yoy), lebih rendah dibandingkan tahun 2025 yang tumbuh 7,3% (yoy) (Grafik 7.1).



Sumber: World Economic Outlook Jan 2026, International Monetary Fund

Grafik 7.1 Kondisi Negara Mitra Dagang Tahun 2025 dan Prospek pertumbuhan 2026

Perekonomian Provinsi Kalimantan Selatan tahun 2026 diperkirakan tetap solid mendekati batas atas proyeksi pada kisaran 5,0% – 5,8% (yoy).

Dari sisi penawaran, peningkatan pertumbuhan ekonomi Kalimantan Selatan didorong oleh tumbuhnya kinerja LU Pertanian, Industri Pengolahan, LU Konstruksi dan LU Perdagangan. Peningkatan LU Pertanian seiring dengan prakiraan peningkatan produksi padi sejalan dengan masifnya

program Oplah dan mulai berproduksinya program cetak sawah, serta potensi peningkatan produksi TBS dan karet seiring dengan prakiraan cuaca yang lebih baik di 2026. Prakiraan peningkatan LU Industri Pengolahan didorong prakiraan naiknya produksi beras dan aktivitas produksi CPO dan biodiesel sejalan dengan program mandatori B40 serta peningkatan produksi minyak goreng. Selain itu, mulai beroperasinya *smelter pig iron* dan prekursor nikel pada tahun 2026 diperkirakan turut mendorong kinerja LU Industri pengolahan. LU Konstruksi diperkirakan meningkat seiring dengan aktivitas investasi sektor swasta yang diperkirakan meningkat dan aktivitas konstruksi sektor pemerintah yang lebih akseleratif (a.l Jembatan Pulau Laut, gerai KDKMP, dan dapur MBG). LU Perdagangan diperkirakan tetap tumbuh solid ditopang oleh masih kuatnya daya beli masyarakat, tercermin dari optimisme konsumen terhadap perekonomian ke depan yang tetap kuat akibat meningkatnya kinerja LU Pertanian dan LU Industri Pengolahan serta masifnya program stimulus fiskal pemerintah sepanjang tahun 2026. Namun demikian, pertumbuhan yang lebih tinggi berpotensi tertahan oleh penurunan kinerja LU Pertambangan yang diperkirakan lebih terbatas dampak rencana pemangkasan RKAB.

Sementara itu, kinerja LU Pertambangan diperkirakan menurun seiring dengan rencana pemangkasan kuota RKAB produksi batu bara, dan peningkatan produksi serta diversifikasi pasar oleh Tiongkok dan India, di tengah akselerasi penggunaan EBT yang lebih tinggi. Pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi tahun 2026 diperkirakan tertahan oleh penurunan aktivitas dan produksi sektor pertambangan sebagai dampak langsung pemangkasan RKAB. Dampak lanjutan dari pemangkasan RKAB tahun 2026 ini menimbulkan ketidakpastian pasokan batu bara Indonesia di pasar global sehingga mendorong negara mitra dagang utama seperti Tiongkok dan India untuk meningkatkan produksi dan mendiversifikasi negara pemasok batu bara untuk mengurangi ketergantungan pasokan dari Indonesia.

Dari sisi pengeluaran, peningkatan kinerja ekonomi Kalimantan Selatan terutama ditopang oleh peningkatan kinerja Konsumsi Rumah Tangga, PMTB dan Ekspor. Kinerja Konsumsi RT diperkirakan

tumbuh positif sejalan dengan daya beli masyarakat yang masih tumbuh kuat didukung program ekonomi kerakyatan dan stimulus fiskal. Berbagai program pennebalan bantuan sosial serta program ketahanan pangan pemerintah pusat juga diperkirakan menopang tingkat konsumsi dan mendukung terjaganya optimisme masyarakat Kalimantan Selatan. Sedangkan komponen lainnya diperkirakan meningkat terbatas dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

Lebih lanjut, Kinerja PMTB diperkirakan meningkat seiring dengan aktivitas industri hilirisasi di KI/KEK dan program ekonomi kerakyatan. Berlanjutnya pengerjaan berbagai proyek *multi years* baik pembangunan infrastruktur oleh pemerintah maupun swasta, antara lain perbaikan jalan, pembangunan bendungan, jembatan, irigasi, pembangunan pusat perbelanjaan dan kantor pemerintah daerah, berlanjutnya pembangunan swasta khususnya di Kawasan Investasi (KI) dan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK), serta pembangunan proyek strategis di Kalimantan Selatan diperkirakan meningkatkan kinerja PMTB di tahun 2026. Selain itu, konstruksi program Cetak Sawah (CS) di Kalimantan Selatan diperkirakan rampung di tahun 2026.

Sementara itu, peningkatan kinerja ekspor diperkirakan didorong oleh peningkatan produksi CPO dan turunnya serta mulai berproduksinya *smelter pig iron* dan nikel pada tahun 2026. Di sisi lain, pemangkasan RKAB batu bara menjadi risiko dan penahan pertumbuhan kinerja ekspor di tengah kebijakan energi Tiongkok dan India yang memprioritaskan pemenuhan kebutuhan energi domestik melalui peningkatan kapasitas pembangkit berbasis Energi Baru Terbarukan (EBT) serta akselerasi produksi batu bara dalam negeri. Dari sisi domestik, kebijakan peningkatan bea ekspor CPO menjadi 10 persen diperkirakan dapat mengurangi keunggulan kompetitif CPO di pasar global, sehingga membatasi potensi ekspor ke negara-negara mitra dagang utama.

Kinerja impor Kalimantan Selatan diperkirakan tumbuh lebih tinggi sejalan dengan prakiraan peningkatan aktivitas ekonomi dan investasi tahun 2026 di Kalimantan Selatan. Akselerasi impor tersebut diperkirakan didorong impor barang

modal dan manufaktur terutama mesin, alat berat, dan kapal. Sementara itu, impor bahan baku industri juga diperkirakan masih meningkat, seiring masih tingginya kebutuhan bahan baku dalam proses pengolahan industri turunan CPO, terutama untuk biodiesel.

Konsumsi Pemerintah tahun 2026 diperkirakan tumbuh lebih tinggi, sejalan dengan program stimulus dan ekonomi kerakyatan yang lebih masif di tahun 2026. Penurunan pendapatan TKDD setelah adanya kebijakan realokasi anggaran diperkirakan lebih rendah dibandingkan dengan peningkatan realisasi spending pemerintah pada anggaran sosial seperti belanja bansos dan subsidi untuk ketahanan pangan dan energi, realisasi program Makan Bergizi Gratis (MBG), dan KDKMP sehingga diperkirakan lebih akseleratif dalam meningkatkan daya beli masyarakat di Kalimantan Selatan.

7.2 PRAKIRAAN INFLASI

Tekanan inflasi Provinsi Kalimantan Selatan pada keseluruhan tahun 2026 diperkirakan lebih rendah dibandingkan dengan tahun 2025 dan berada dalam rentang sasaran $2,5 \pm 1\%$ (yoy). Menurunnya tekanan inflasi pada keseluruhan tahun 2026 dapat dilihat melalui sisi penawaran yang dipengaruhi oleh meningkatnya luasan lahan pertanian seiring implementasi program Optimasi Lahan (Oplah) dan Cetak Sawah Rakyat (CSR). Selanjutnya, prospek cuaca yang didominasi oleh fase netral juga diperkirakan meningkatkan produksi bahan makanan. Lebih lanjut, pasokan minyak mentah dunia yang dimiliki oleh negara-negara OPEC+ yang mengalami *oversupply* diperkirakan menurunkan harga bahan bakar.

Perkiraan tekanan inflasi yang lebih rendah bersumber dari penurunan seluruh kelompok, terutama kelompok Perawatan Pribadi dan Jasa Lainnya; kelompok Transportasi; dan kelompok Makanan, Minuman, dan Tembakau. Kelompok Perawatan Pribadi dan Jasa Lainnya diperkirakan melambat sejalan dengan harga emas global yang meningkat lebih terbatas seiring telah dilakukan pemotongan suku bunga The Fed pada tahun Desember 2025. Selanjutnya, dari kelompok

Transportasi diperkirakan lebih rendah sejalan dengan harga minyak global yang lebih rendah seiring kondisi pasokan yang memadai dari negara-negara OPEC+. Lebih lanjut, kelompok Makanan, Minuman, dan Tembakau diperkirakan melambat sejalan dengan harga aneka rokok yang tidak mengalami kenaikan harga seiring Harga Jual Eceran (HJE) dan cukai rokok yang tidak mengalami perubahan pada tahun 2026. Lebih lanjut, upaya perbaikan produksi tanaman pangan melalui program intensifikasi lahan, seperti Optimasi Lahan (OPLAH) penggunaan bibit unggul juga diperkirakan dapat menahan tekanan inflasi kelompok makanan, minuman dan tembakau.

Strategi pengendalian inflasi melalui KAD dan optimalisasi Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)

atau Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) menjadi bagian penting dalam menyelesaikan permasalahan struktural disparitas harga antarwilayah dan antarwaktu, serta inefisiensi tata niaga pangan. Lebih lanjut, saat ini kendala logistik dan distribusi masih menjadi permasalahan utama untuk melaksanakan KAD secara lebih efisien. Oleh karena itu, pembentukan KAD secara formal perlu didorong, baik untuk meningkatkan kepastian pasokan di Kalimantan Selatan sebagai pembeli maupun meningkatkan kepastian penyerapan pasokan di sentra produksi. Optimalisasi KAD perlu didorong dengan meningkatkan keterlibatan BUMD Pangan melalui skema *business to business* dengan daerah sentra produksi dilengkapi dengan *transfer technology* kepada petani lokal di Kalimantan Selatan.

Tabel 7.1 Risiko PDRB Prov. Kalsel Tahun 2026

FAKTOR PENDORONG/PENAHAN	ARAH
Peningkatan produksi padi yang didorong program swasembada pangan berupa Optimasi lahan (Oplah) dan Cetak Sawah (CS)	↑
Peningkatan aktivitas konstruksi dan investasi seiring dengan berlanjutnya PSN Jembatan Pulau Laut dan penambahan lini produksi smelter di KI/KEK	↑
Peningkatan aktivitas produksi dan hilirisasi di KI/KEK seiring dengan rencana produksi pig iron dan prekursor nikel	↑
Program ekonomi kerakyatan (a.l MBG dan KDKPM) yang diperkirakan lebih akseleratif	↑
Ketidakpastian perekonomian global dampak peningkatan tensi geopolitik timur tengah	↑
Dampak pengalihan aset kebun sawit yang disita kepada PT. Agrinas	↑
Pemangkasn RKAB dan pencabutan izin operasi perusahaan tambang batu bara	↑

Tabel 7.2 Risiko Inflasi Prov. Kalsel Tahun 2026

FAKTOR PENDORONG/PENAHAN	ARAH
Peningkatan harga emas yang lebih terbatas seiring telah dilakukan pemotongan suku bunga The Fed pada akhir tahun 2025	↑
Perbaikan produksi tanaman pangan melalui implementasi program Optimasi Lahan (Oplah) dan Cetak Sawah Rakyat (CSR)	↑
Harga minyak global yang lebih rendah seiring pasokan yang memadai dari negara-negara OPEC+	↑
Permintaan bahan pangan strategis seiring akselerasi program MBG	↑
Kebijakan impor bungkil kedelai sebagai bahan baku pakan ayam yang meningkatkan harga komoditas daging ayam ras	↑





Daftar Istilah

Administered Price (AP)

Inflasi yang dominan dipengaruhi oleh *shocks* (kejutan) berupa kebijakan harga Pemerintah, seperti harga BBM bersubsidi, tarif listrik, tarif angkutan, dan lain-lain.

Andil inflasi

Sumbangan perkembangan harga suatu komoditas/kelompok barang/kota terhadap tingkat inflasi secara keseluruhan.

APBD

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan peraturan daerah.

Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS)

Program pemerintah dalam kesatuan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang diresmikan pada tanggal 31 Desember 2013. Untuk BPJS Kesehatan mulai beroperasi sejak tanggal 1 Januari 2014, sedangkan BPJS Ketenagakerjaan mulai beroperasi sejak 1 Juli 2014.

BI 7 Days Reverse Repo Rate

Suku bunga referensi kebijakan moneter dan ditetapkan dalam Rapat Dewan Gubernur setiap bulannya.

BI RTGS

Bank Indonesia *Real Time Gross Settlement*, merupakan penyelesaian kewajiban bayar-membayar (*settlement*) yang dilakukan secara *online* atau seketika untuk setiap intruksi transfer dana.

Bobot inflasi

Besaran yang menunjukkan pengaruh suatu komoditas terhadap tingkat inflasi secara keseluruhan, yang diperhitungkan dengan melihat tingkat konsumsi masyarakat terhadap komoditas tersebut.

BU BBN

Merupakan singkatan dari Badan Usaha Bahan Bakar Nabati, yakni perusahaan atau organisasi yang terlibat dalam bisnis bahan bakar nabati, seperti biodiesel, di Indonesia.

CPO

CPO singkatan dari *Crude Palm Oil* atau minyak sawit mentah yang dihasilkan melalui proses ekstraksi dari daging buah kelapa sawit.

CSR

Singkatan dari Cetak Sawah Rakyat, merupakan program pemerintah yang bertujuan untuk meningkatkan produksi pangan dan kesejahteraan petani melalui penciptaan lahan sawah baru di daerah-daerah yang potensial.

Dana Perimbangan

Sumber pendapatan daerah yang berasal dari APBN untuk mendukung pelaksanaan kewenangan pemerintah daerah dalam mencapai tujuan pemberian otonomi daerah.

Dana Pihak Ketiga (DPK)

Dana masyarakat (berupa tabungan, deposito, giro, dll) yang disimpan di suatu bank.

Ekspor dan Impor

Dalam konteks PDRB adalah mencakup perdagangan barang dan jasa antar negara dan antar provinsi.

Financing to Deposit Ratio (FDR) atau Loan to Deposit Ratio (LDR)

Rasio pembiayaan atau kredit terhadap dana pihak ketiga yang diterima oleh bank, baik dalam rupiah maupun valas. Terminologi FDR untuk bank syariah sementara LDR untuk bank konvensional.

Indeks Ekspektasi Konsumen

Salah satu pembentuk IKK. Indeks yang menunjukkan level keyakinan konsumen terhadap ekspektasi kondisi ekonomi 6 bulan mendatang, dengan skala 1–100.

Indeks Harga Konsumen (IHK)

Sebuah indeks yang merupakan ukuran perubahan rata-rata harga barang dan jasa yang dikonsumsi masyarakat pada suatu periode tertentu.

Indeks Kondisi Ekonomi

Salah satu pembentuk IKK. Indeks yang menunjukkan level keyakinan konsumen terhadap kondisi ekonomi saat ini, dengan skala 1–100.

Indeks Keyakinan Konsumen (IKK)

Indeks yang menunjukkan level keyakinan konsumen terhadap kondisi ekonomi saat ini dan ekspektasi kondisi ekonomi enam bulan mendatang, dengan skala 1–100.

Daftar Istilah

Inflasi Inti

Komponen inflasi yang cenderung menetap atau persisten (persistent component) di dalam pergerakan inflasi dan dipengaruhi oleh faktor fundamental, seperti interaksi permintaan-penawaran, lingkungan eksternal (nilai tukar, harga komoditi internasional, inflasi mitra dagang), serta ekspektasi inflasi dari pedagang dan konsumen.

Inflow

Uang yang diedarkan aliran masuk uang kartal ke Bank Indonesia.

Investasi

Kegiatan meningkatkan nilai tambah suatu kegiatan produksi.

Liaison

Kegiatan pengumpulan data/statistik dan informasi yang bersifat kualitatif dan kuantitatif yang dilakukan secara periodik melalui wawancara langsung kepada pelaku ekonomi mengenai perkembangan dan arah kegiatan ekonomi dengan cara yang sistematis dan didokumentasikan dalam bentuk laporan.

MtM

Month to month. Perbandingan antara data satu bulan dengan bulan sebelumnya.

Non Performing Loan (NPL) atau Non Performing Financing (NPF)

Ratio pembiayaan atau kredit macet terhadap total penyaluran pembiayaan atau kredit oleh bank, baik dalam rupiah dan valas. Terminologi NPF dan pembiayaan untuk bank syariah, sedangkan NPL dan kredit untuk bank konvensional.

Oplah

Singkatan dari Optimalisasi Lahan, merupakan program pemerintah untuk meningkatkan produktivitas pertanian, khususnya produksi padi dan jagung, serta mendukung swasembada pangan.

Outflow

Aliran keluar uang kartal dari Kantor Bank Indonesia.

PDRB

Produk Domestik Regional Bruto. Pendapatan suatu daerah yang mencerminkan hasil kegiatan ekonomi yang ada di suatu wilayah tertentu.

Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Pendapatan yang diperoleh dari aktivitas ekonomi suatu daerah seperti hasil pajak daerah, retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah.

QtQ

Quarter to quarter. Perbandingan antara data suatu triwulan dengan triwulan sebelumnya.

Sistem Kliring Nasional Bank Indonesia (SKNBI)

Sistem pertukaran data keuangan elektronik dan/atau warkat antar peserta kliring baik atas nama peserta maupun atas nama nasabah yang perhitungannya diselesaikan pada waktu tertentu.

TBS

Singkatan dari Tandan Buah Segar, adalah buah kelapa sawit yang sudah matang dan siap dipanen.

TPID, TPIP

Merupakan singkatan dari Tim Pengendalian Inflasi Pusat (TPIP), Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Provinsi dan Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Kabupaten/Kotat. TPID dan TPIP merupakan anggota dari TPIN (Tim Pengendalian Inflasi Nasional) yang terbentuk atas dasar Keputusan Presiden No 23 Tahun 2017 tentang Tim Pengendalian Inflasi Nasional.

YoY

Year on year. Perbandingan antara data satu tahun dengan tahun sebelumnya.



Tim Penyusun

KANTOR PERWAKILAN BANK INDONESIA PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PENANGGUNG JAWAB

Fadjar Majardi

Aloysius Donanto H. W.

EDITOR

Erwin Syafii

Irfan Farulian

Prayudhi Azwar

Teguh Arifyanto

TIM PENULIS

Mohammad Fikry Aly

Megananda A.C Dwieartha

Rivaldi

Prima Putra Pamungkas

Resti Nisaidha Rahmi

Faiz Galih Aryanata

Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kalimantan Selatan Kelompok Perumusan KEKDA Wilayah dan Provinsi

Jl. Lambung Mangkurat No.15 Banjarmasin Telp. +62 511 3352027

Fax. +62 511 3354678

Email:

prima_putra@bi.go.id

prima_mega@bi.go.id



Google

 Laporan Perekonomian Kalsel

**KANTOR PERWAKILAN BANK INDONESIA
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN**

Jl. Lambung Mangkurat No. 15
Banjarmasin 70111
Telp. (0511) 4368182, Fax (0511) 3354678